

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DATA SOSIAL EKONOMI DI LOKASI FOREST PROGRAM V DI KABUPATEN SANGGAU DAN KABUPATEN SIKKA

TIM KONSULTAN: YKMI-FKKM

1. Mangarah Silalahi S.Sos, MSc. MT
2. Andri Santosa, SP
3. Yulius Regang S.Fil
4. Alfeus Segapuldes S.E

RINGKASAN EKSEKUTIF

Studi ini bertujuan untuk membuat data dasar pendapatan rumah tangga Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan dua dari lima lokasi proyek *Forest Program V* (FP V). Studi baseline ini dilakukan bulan November dan Desember 2023. Sumber data berasal dari data sekunder yaitu berupa laporan, profil KPS, hasil studi dan publikasi terkait PS di dua kabupaten tersebut. Sedangkan data primer didapatkan melalui penyebaran kuesioner, diskusi kelompok terfokus, interview dan observasi lapangan. Untuk data dasar pendapatan dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner untuk 168 responden dari 24 KPS di Kabupaten Sikka dan 119 responden dari 17 KPS di Kabupaten Sanggau, sehingga total responden menjadi 287 orang. Analisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan kuantitatif sederhana.

Sumber pendapatan rumah tangga KPS yang berasal dari areal PS di kedua Kabupaten tersebut, berasal dari komoditas yang dikonsumsi sendiri dan komoditas yang dijual. Komoditas yang dikonsumsi sendiri berupa tanaman pangan, tanaman buah-buahan, kacang-kacangan, sayuran, dan bahan untuk upacara ritual. Sedangkan Sumber pendapatan dari komoditas yang dijual umumnya adalah tanaman tahunan di antaranya kemiri, jambu mete, pisang, kelapa, karet, durian, petai, jengkol, kakao, dan lain-lain. Selain itu komoditas tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, dan bumbu. Pendapatan dari komoditas yang dijual adalah pendapatan bersih setelah dipotong biaya produksi. Hasil survey menghasilkan data dasar pendapatan rata-rata per keluarga dari areal PS sebagai berikut :

- Kabupaten Sikka adalah **Rp.15.188.250/tahun** atau **Rp.1.265.688 /bulan**
- Kabupaten Sanggau adalah **Rp.13.061.333 /tahun** atau **Rp.1.088.444/bulan**

Selain dari areal PS, anggota KPS juga mendapatkan penghasilan lain yang berasal dari berbagai pekerjaan seperti sebagai buruh tani, buruh bangunan, berjualan/buka kios, karyawan swasta, wiraswasta dan kerja serabutan, dan lainnya. Pendapatan rata-rata per keluarga yang berasal dari luar PS adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Sikka **Rp.5.835.119/tahun** atau **Rp.486.260/bulan**
- Kabupaten Sanggau **Rp.7.973.412/tahun** atau **Rp.664.451/bulan**

Dengan demikian, data dasar penghasilan rata-rata per keluarga bagi rumah tangga KPS baik yang berasal dari PS dan non PS di Kabupaten Sikka adalah **Rp.21.023.369/tahun** atau **Rp.1.751.947/bulan**, dan di Kabupaten Sanggau adalah **Rp. 21.034.745 /KK/tahun** atau **Rp. 1.752.895 /KK** per bulan.

Dari data pendapatan di atas, disimpulkan bahwa pendapatan rumah tangga KPS di Sikka yang berasal dari areal PS adalah 72 % sementara di Kabupaten Sanggau adalah 64 %. Jika dibandingkan dengan data BPS 2023 tentang garis kemiskinan di mana pendapatan per keluarga minimal Rp.2.300.000/bulan, maka pendapatan rata-rata per keluarga baik itu di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sanggau adalah kategori miskin. Namun demikian, anggota KPS di kedua Kabupaten tersebut mendapatkan berbagai benefit lainnya yang belum di hitung. Keberadaan PS yang diberikan izin/persetujuan pengelolaan oleh KLHK ke KPS telah memberikan kepastian pengelolaan hutan/lahan, areal PS sebagai sumber pangan, sebagai sumber utama ekonomi, sumber papan, dan memberikan benefit lainnya seperti penyediaan air, penyeimbang iklim mikro, penyedia sumber protein, dan tempat melanjutkan budaya bagi masyarakat adat.

Data dasar pendapatan rumah tangga KPS di kabupaten Sikka dan Sanggau ini akan menjadi salah satu tolak ukur kinerja program FP V di mana di akhir proyek pendapatan ekonomi masyarakat akan meningkat 15 %. Untuk memastikan peningkatan ekonomi masih diperlukan studi pendapatan rumah tangga di pertengahan sisa proyek untuk melihat apakah intervensi program masih *on the track* atau butuh intervensi lain, dan juga pengukuran pendapatan rumah tangga KPS pada masa akhir proyek.

Untuk mencapai peningkatan ekonomi rumah tangga KPS tersebut, maka beberapa rekomendasi adalah: meningkatkan penanaman tanaman cepat menghasilkan (*cash crop/short crop*), budidaya tanaman menengah dengan dapat menghasilkan 3-4 tahun (*medium crop*) seperti vanili, kakao, pisang, kopi, durian dan tanaman buah-buahan lainnya, membuat nilai tambah produk-produk tanaman tahunan yang sudah ada, membuat dan

menciptakan akses pasar, akses transportasi, akses pasar (digital dan non digital). Selain itu, pendampingan yang intensif dari fasilitator pendamping PS dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tentang budidaya pertanian, pengolahan produk, pengemasan dan pemasaran produk sangat penting. Untuk itu, diperlukan penguatan dan peningkatan ketrampilan bagi pendamping PS dalam hal komunikasi efektif, fasilitator independen dan kemampuan tata kelola kawasan, kelola usaha (mulai budidaya tanaman, menciptakan produk turunan, pengemasan dan pemasaran) dan kelola kelembagaan.

KPS-KPS di kedua kabupaten tersebut memiliki modal sosial yang kuat yang dapat digunakan untuk pengelolaan hutan dan peningkatan ekonomi, memiliki pendamping PS satu orang per KPS, tanaman tahunan yang telah diwariskan oleh orang tua mereka, serta ketrampilan budidaya tradisional untuk tanaman pangan, dan buah-buahan. Beberapa KPS juga dikelola secara komunal seperti HTR Meranti dan Keruing dan HA yang ada di Sanggau. Selain itu, pengetahuan adat dan manajemen hutan berdasarkan areal lindung dan pemanfaatan, serta aset dasar produksi telah dimiliki.

Untuk mencapai kenaikan pendapatan KPS sebesar 15% dari baseline saat ini, masih banyak ditemui tantangan dan ancaman. Di Kabupaten Sikka terdapat tantangan internal seperti masyarakat ingin cepat dapat uang sehingga menjual hasil produk PS yang bahan mentah, terjerat sistem ijon sehingga diharuskan menjual ke toke lokal, rendahnya ketrampilan anggota KPS/KUPS dalam membangun jaringan dan menciptakan pasar, serta mendapatkan permodalan. Yang menjadi ancaman adalah kebakaran, kekeringan, dan gagal panen karena serangan hama. Untuk mengatasi ancaman tersebut diperlukan intervensi penanaman areal-areal terdegradasi dengan tanaman HHBK *middle dan long term crop*, menjaga areal tersebut dari ancaman kebakaran dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengendalian hama.

Sementara di Kabupaten Sanggau, tantangan utama adalah masih rendahnya ketrampilan budidaya tanaman, pengolahan produk, dan akses pemasaran produk. Dengan kekuatan yang ada di KPS Sanggau, maka diperlukan peningkatan ketrampilan dalam budidaya tanaman unggulan, mengolah dan menambah nilai tambah produk PS, serta menciptakan akses pasar produk PS. Ancaman utama dalam peningkatan ekonomi di Kabupaten Sanggau adalah ekspansifnya pengembangan kelapa sawit dengan harga yang cenderung stabil, sementara harga karet cenderung menurun, adanya konflik perambahan yang berasal dari luar anggota KPS bahkan desa lain. Strategi menekan ancaman tersebut, diperlukan suatu regulasi yang kuat secara internal untuk tidak mengembangkan tanaman kelapa sawit, memperkaya tanaman sawit yang sudah terlanjur, membentuk tim patroli di masing-masing KPS dan juga membuat sanksi-sanksi adat bagi pelanggar yang menanam sawit, maupun yang merambah kawasan.

Para anggota KPS di kedua Kabupaten yang menjadi target FP V di atas, merasa sangat senang dengan diberikan izin/persetujuan PS oleh pemerintah dikarenakan: adanya kepastian dalam pengelolaan hutan dan lahan, menurunnya konflik pengelolaan hutan dan lahan, mendapatkan sumber-sumber pangan dan ekonomi rumah tangga dari areal PS, mendapatkan pendampingan fasilitator, adanya dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah dan FP V.

Data dasar pendapatan rumah tangga KPS di Kedua Kabupaten ini akan menjadi tolok ukur bagi kinerja program FP V dan KLHK dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga KPS. Data dasar ini didukung oleh data excel *by name by adress*, "karakteristik responden, pendapatan responden dari areal PS dan juga sumber pendapatan lain yang dari luar PS sebagai acuan dalam penilaian di pertengahan sisa proyek dan penilaian di akhir proyek.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan kehendakNya maka Laporan Penyusunan Baseline Data Sosial Ekonomi di Lokasi *Forest Program V* (FPV) di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sikka dapat diselesaikan dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kerangka menjelaskan sistem mata pencaharian masyarakat penerima manfaat dari FPV di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sikka, serta menganalisis keterkaitan pendapatan masyarakat dengan Perhutanan Sosial. Hasil kegiatan ini menjadi data dasar (*baseline data*) Pendapatan Rumah Tangga Anggota KPS dan deskripsi sosial ekonomi di tingkat masyarakat penerima manfaat di lokasi FPV khususnya di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sikka, serta mengintegrasikannya dengan sistem monitoring evaluasi FP V

Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku *Project Executing Agency Forest Programme V* mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung kegiatan ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada Tim Konsultan YKMI-FKKM yang telah dengan serius dan berkomitmen melakukan dan menyelesaikan pekerjaan ini.

Kami menyadari laporan ini belum sempurna dan belum dapat memenuhi harapan semua pihak yang terlibat, tetapi kami berharap laporan ini dapat bermanfaat dalam membangun *baseline data* sosial ekonomi dalam sistem monitoring dan evaluasi Forest Program V.

Jakarta, 16 Desember 2023

Plt. Direktur PKTHA
selaku *Project Executing Agency* FP V,

Ir. Muhammad Said, MM
NIP. 19630318 198901 1 002

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	I
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR LAMPIRAN	VII
I.PENDAHULUAN	1
II.TUJUAN DAN LUARAN	2
2.1 Tujuan Penelitian	2
2.2 Luaran Penelitian	2
III.METODOLOGI	3
3.1 Pengumpulan Data Sekunder	3
3.2 Pengumpulan Data Primer	3
3.2.1 Penyebaran Kuesioner ke Responden.....	3
3.2.2 Diskusi Kelompok Terfokus.....	4
3.2.3. Observasi Lapangan	5
3.3 Analisis Data	5
IV.HASIL PENELITIAN.....	7
4.1 Kabupaten Sikka.....	7
4.1.1 Gambaran Singkat Perkembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Sikka	7
4.1.2 Hasil Studi Baseline Pendapatan Rumah Tangga Anggota KPS di Kabupaten Sikka	8
4.2 Kabupaten Sanggau	29
4.2.1 Gambaran Singkat Kabupaten Sanggau dan Perkembangan Perhutanan Sosial	29
4.2.2. Studi Baseline Pendapatan Rumah Tangga Anggota KPS di Kabupaten Sanggau	30
V.KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Rekomendasi	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kawasan Hutan dan Areal Perhutanan Sosial di Kabupaten Sikka	7
Gambar 2. Responden Berdasarkan Usia	9
Gambar 3 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka	9
Gambar 4 Responden Berdasarkan Asal-usul.....	9
Gambar 5. Peran Dominan Anggota Keluarga dalam Penentuan Jenis Tanaman dan Pengolahan Lahan	11
Gambar 6. Peran Dominan Anggota Keluarga dalam Pemeliharaan Tanaman dan Panen	11
Gambar 7. Pendidikan Responden dan Keluarga 593 Jiwa.....	11
Gambar 8. Anak Wajib dan Putus Sekolah pada KPS Sikka	12
Gambar 9. Tipe Rumah Responden.....	12
Gambar 10. Status Kepemilikan Rumah.....	12
Gambar 11. Kepemilikan Aset Produktif	13
Gambar 12. Akses Anggota KPS di Sikka terhadap Listrik.....	13
Gambar 13. Penggunaan Energi Anggota KPS di Sikka	14
Gambar 14. Akses Anggota KPS terhadap Air Bersih dan Sumber-sumber Air Bersih	14
Gambar 15. Sumber Pendapatan untuk Komoditi yang dikonsumsi Sendiri	16
Gambar 16. Pendapatan Komoditi PS yang di jual	18
Gambar 17. Pendapatan dari Komoditi Dijual di KPS Sikka Berdasarkan KPS.....	20
Gambar 18. Sumber Pendapatan Lain diluar Agroforestri.....	20
Gambar 19. Analisis SWOT KPS di Kabupaten Sikka.....	24
Gambar 20. Peta Kawasan hutan dan Areal Perhutanan Sosial di Kabupaten Sanggau.....	29
Gambar 21. Responden Berdasarkan Usia	30
Gambar 22. Responden berdasarkan Jenis Kelamin Asal usul	31
Gambar 23. Rata-rata jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga	32
Gambar 24. Peran anggota keluarga dalam penentuan budidaya tanaman dan pemasaran	33
Gambar 25. Pendidikan Anggota Keluarga Responden.....	33
Gambar 26. Jumlah anak wajib sekolah Kab. Sanggau	34
Gambar 27. Tipe Rumah Responden.....	34
Gambar 28. Status Kepemilikan Rumah.....	35
Gambar 29. Kepemilikan aset produktif	35
Gambar 30. Rumah Tangga yang memiliki akses listrik	36
Gambar 31. Penggunaan bahan bakar	36
Gambar 32. Sumber air bersih.....	36
Gambar 33. Rumah tangga yang memiliki MCK	37
Gambar 34. Pendapatan dari komoditi yang dikonsumsi sendiri berdasarkan jenis tanaman.	38
Gambar 35. Pendapatan PS yang dikonsumsi Sendiri di Kabupaten Sanggau Berdasarkan KPS	40
Gambar 36. Pendapatan Komoditas PS dijual berdasarkan jenis komoditi.....	41
Gambar 37. Sumber Pendapatan Lain dari Luar Agroforestry Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	42
Gambar 38. Analisis SWOT KPS Di Kabupaten Sanggau	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kelompok Umur Responden Berdasarkan Umur di Kabupaten Sikka.....	8
Tabel 2. Penguasaan Areal PS Rata-rata oleh Anggota KPS/KK	10
Tabel 3. Summary Pendapatan Anggota KPS Kabupaten Sikka dari areal PS dan Non PS.....	15
Tabel 4. Jenis Komoditas PS yang dikonsumsi di Kabupaten Sikka	17
Tabel 5. Sumber Pendapatan Anggota KPS dari Komoditas yang dijual.....	19
Tabel 6. Sumber Pendapatan Lain di Luar Agroforesti Anggota KPS di Kabupaten Sikka.....	21
Tabel 7. Paska Panen dan Pemasaran Jenis Komoditi PS di Kabupaten Sikka.....	22
Tabel 8. Perbedaan Persepsi dan Pengelolaan Areal PS Sebelum di berikan Izin dan Setelahnya.....	26
Tabel 9. Tematik dan Kebutuhan Keterampilan Anggota KPS dalam Peningkatan Pendapatan	26
Tabel 10. Kelompok Umur responden berdasarkan umur di Kabupaten Sanggau.....	31
Tabel 11. Pendidikan Anggota Keluarga KPS di Kabupaten Sanggau	34
Tabel 12. Ringkasan Baseline Data Pendapatan Rumah Tangga KPS di Kabupaten Sanggau	38
Tabel 13. Komoditas PS yang dikonsumsi sendiri Per Responden/RT.....	39
Tabel 14. Pendapatan Anggota KPS di Kabupaten Sanggau Per Komoditas.....	41
Tabel 15. Pendapatan anggota KPS dari luar /PS berdasarkan pekerjaan	42
Tabel 16. Paska Panen dan Pemasaran Produk PS di Kabupaten Sanggau	43
Tabel 17. Persepsi Masyarakat berdasarkan tematik sebelum dan setelah ada izin	48
Tabel 18. Keterampilan yang Dimiliki Anggota KPS Sanggu dan yang Dibutuhkan.....	49
Tabel 19. Summary Baseline data pendapatan rumah tangga petani KPS berdasarkan Kabupaten	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pengelolaan Persetujuan HKm di Kabupaten Sikka.....	57
Lampiran 2. Daftar Pengelolaan Persetujuan HKm di Kabupaten Sanggau	58
Lampiran 3. Daftar Pengelolaan Persetujuan HKm di Kabupaten Sanggau	59
Lampiran 4. Daftar Penetapan Hutan Adat di Kabupaten Sanggau	60
Lampiran 5. Kuesioner Survei Pendapatan Rumah Tangga Anggota KPS	61
Lampiran 6. Daftar Enumerator Kabupaten Sikka.....	67
Lampiran 7. Daftar Enumerator Kabupaten Sanggau	68
Lampiran 8. Dokumentasi Pembekalan Enumerator Kabupaten Sikka	69
Lampiran 9. Dokumentasi FGD & Observasi di Kabupaten Sikka.....	70
Lampiran 10. Pengambilan Data Lapangan Dengan Kuesioner di Kabupaten Sikka	72
Lampiran 11. Dokumentasi Pembekalan Enumerator Kabupaten Sanggau	73
Lampiran 12. Dokumentasi FGD & Observasi di Kabupaten Sanggau	74
Lampiran 13. Pengambilan Data Lapangan Dengan Kuesioner di Kabupaten Sanggau	75
Lampiran 14. Data Base Sosek- Pendapatan Rumah Tangga KPS Kabupaten Sikka	76
Lampiran 15. Data Base Sosek- Pendapatan Rumah Tangga KPS Kabupaten Sanggau	77

I. PENDAHULUAN

Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan di kawasan hutan negara, hutan hak, atau hutan adat dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat atau lembaga pemerintah desa sebagai pelaku utama, untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya berupa Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Praktik Perhutanan Sosial sebenarnya sudah diterapkan sejak lama sebagai bagian dari tata cara untuk mengelola hutan secara lestari dalam bentuk agroforestri (wana-tani), silvo-pasture (wana-ternak) dan silvofishery (wana-mina).

Capaian Perhutanan Sosial per 13 September 2023 adalah seluas 6.371.773,42 hektar atau 9.642-unit SK untuk 1. 287.710 Kepala Keluarga. Dengan rincian Hutan Desa seluas 2.809.215,77 hektar, Hutan Kemasyarakatan seluas 1.180.267,09 hektar, Hutan Tanaman Rakyat 363.248,08 hektar, Kemitraan Kehutanan yang berupa Kulin KK seluas 562.395,24 hektar dan Kemitraan Kehutanan yang berupa IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) seluas 18.036,99 hektar, serta yang berupa HA seluas 1.399.121,25 hektar. Luas Hutan Adat tersebut 250.971 hektar sudah berupa Penetapan HA dan 1.088.149 hektar merupakan indikatif HA.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan upaya untuk memobilisasi sumberdaya dalam mendukung target utama program Perhutanan Sosial yaitu distribusi akses legal 12,7 juta hektar dan peningkatan kualitas Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) paska mendapatkan persetujuan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Republik Jerman berkolaborasi melalui Forest Program V (FP V) untuk mendukung target utama program Perhutanan Sosial dengan mengharmonisasikan pembangunan ekonomi dengan perlindungan iklim dan sumberdaya alam.

Tujuan FP V adalah untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menerapkan manajemen sumberdaya hutan yang berkarakter ekologi sosial serta berkelanjutan pada area Perhutanan Sosial yang telah ditentukan, yaitu di Kabupaten Sikka, Madiun, Garut, dan kabupaten Sanggau. Diharapkan 11.701 rumah tangga sebagai bagian dari KPS menjadi penerima manfaat dari project FP V ini. FP V akan memberikan dukungan berupa penanaman hutan, perbaikan hutan, pengembangan agroforestry, perlindungan hutan, dan peningkatan kapasitas berbagai institusi terkait. Salah satu indikator kinerja dari tujuan tersebut adalah “Pendapatan (kelompok masyarakat) yang diperoleh dari penjualan kayu dan non-kayu yang dihasilkan di bawah lima skema Perhutanan Sosial meningkat sebesar 15%.”

Dalam mencapai tujuan tersebut, sebuah sistem Monitoring Evaluasi dibangun di awal project FP V yaitu pembuatan Data Dasar (*Baseline*) Sosial Ekonomi. Selain itu, baseline tutupan hutan dan biomassa pada area Perhutanan Sosial di lokasi project FP V juga akan disusun dalam kerangka Monitoring dan Evaluasi. Baseline sosial ekonomi (Pendapatan rumah tangga) anggota KPS pada lokasi project FP V, kemudian akan diukur untuk melihat peningkatan pendapatan anggota KPS setelah dilakukan intervensi project.

Dalam rangka menyiapkan data dasar sosial ekonomi di Kabupaten Sikka Provinsi NTT dan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalbar, Direktorat PKTHA dan Forest Program V menunjuk YKMI-FKKM menjadi konsultan pelaksana. Pelaksanaan pekerjaan penyusunan baseline dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender dimulai pada tanggal 7 November dan selesai 6 Desember 2023.

II. TUJUAN DAN LUARAN

2.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian atau penyusunan Data Sosial Ekonomi di Lokasi Forest Program V (FP V) di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sikka adalah:

1. Menjelaskan Sistem Mata Pencarian pada Masyarakat Penerima Manfaat FP V dan Menganalisis Keterkaitan Pendapatan Masyarakat dengan Kegiatan FP V.
2. Membangun Data Dasar (*Baseline*) Ekonomi Sosial di Tingkat Masyarakat Penerima Manfaat dan Mengintegrasikannya dengan Sistem Monitoring dan Evaluasi FP V.

2.2 Luaran Penelitian

Adapun luaran dari kegiatan penelitian ini adalah:

1. Data pendapatan rumah tangga dari anggota KPS di Kabupaten Sikka dan Sanggau sebagai dasar untuk monitoring dan evaluasi proyek.
2. Informasi tentang produk kayu dan non kayu serta kegiatan usaha lain yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat pada KPS di Kabupaten Sikka dan Sanggau.
3. Informasi tentang pelatihan yang dibutuhkan untuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan Kelompok Perhutanan Sosial dalam rangka peningkatan pendapatan anggota KPS.

III. METODOLOGI

Hipotesis yang dibangun dalam program FP V ini adalah “Anggota KPS akan meningkatkan pendapatannya dari hasil hutan bukan kayu di areal PS sebagai dampak intervensi dari proyek FP V”. Untuk mengukur peningkatan tersebut diperlukan *baseline* pendapatan Anggota KPS saat ini, terutama yang berasal dari hasil hutan bukan kayu di areal PS. Proses penyusunan data dasar sosial ekonomi dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu: (1) Pengumpulan Data dan Informasi; (2) Analisis Data dan Informasi; serta (3) Pembuatan Laporan dan Rekomendasi. Data yang akan dikumpulkan adalah data sekunder dan primer. Data sekunder dan primer dianalisis melalui metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif dilakukan untuk mengkategorisasi data-data yang bersumber dari wawancara, FGD dan observasi. Sementara metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis data-data hasil kuisioner.

3.1 Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder berupa profil KPS, profil desa yang ada KPS nya, laporan perkembangan desa dan penggunaan dana-dana desa, informasi dan berita terkait perhutanan sosial, laporan FP V, peta dan rencana kerja KPS yang ada di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sanggau.

Metode pengumpulan data sekunder adalah mendapatkan data melalui penelusuran di internet dan meminta langsung dokumen, laporan, publikasi dan peta yang relevan kepada para pihak mulai dari : Kelompok Perhutanan Sosial, Kepala Desa, KPH, Pemerintah Daerah, BPSKL, FP V, BPS Kabupaten Sikka, BPS Kabupaten Sanggau, serta lembaga/institusi lain yang relevan.

3.2 Pengumpulan Data Primer

Data primer adalah data-data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti dari objek penelitian. Metode pengumpulan data primer adalah melalui wawancara oleh *enumerator* dengan menyebar kuisioner, pengumpulan data dan informasi melalui diskusi kelompok terfokus dengan mengundang beberapa perwakilan anggota KPS, melakukan interview pada key informan, dan melakukan observasi areal PS dan desa-desa.

3.2.1 Penyebaran Kuisioner ke Responden Penyusunan dan Finalisasi Kuisioner

Draft kuisioner yang telah dibuat oleh tim konsultan YKMI-FKKM dipadukan dengan kuisioner yang disiapkan oleh National Consultant Monitoring Evaluation FP V. Sehingga kuisioner lengkap yang melingkupi:

1. Lembar Persetujuan Responden dan informasi dasar rumah tangga responden
2. Pendidikan
3. Infrastruktur Rumah Tangga Responden
4. Sumber Pendapatan Rumah Tangga
5. Survei Persepsi Masyarakat Terkait Perhutanan Sosial dan masukan terhadap FP

Kuisioner survey data dasar Pendapatan Rumah Tangga KPS di Kabupaten Sikka dan Sanggau dapat dilihat pada lampiran 3.

Penentuan Sampel

"Teknik Sampling adalah Teknik atau proses penentuan sampel responden dari populasi sehingga dapat mewakili populasi tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sampel (objek sampling) yang benar-benar sesuai dan dapat menggambarkan populasi dari subjek penelitian." *Sampling* dipilih 6 responden per KPS secara *purposive* dan ditambah sepuluh persen sehingga jumlah sampling setiap KPS berjumlah 7 orang. Dengan demikian jumlah sampling di KPS Sikka 24 KPS x 7 responden menjadi 168 responden dan di Kabupaten Sanggau 17 KPS x 7 respondon menjadi 119

responden. Tujuan menambah 10 % ini adalah untuk mengantisipasi jika ada kuesioner yang tidak lengkap. Namun jika lengkap, maka kesemuanya akan dijadikan responden.

Adapun kriteria responden yang diambil berdasarkan :

- (1) Anggota KPS yang aktif mengelola areal PS,
- (2) Memiliki komoditas usaha atau komoditas unggulan, dan
- (3) Sudah berproduksi.

Selain itu, dengan memperhatikan keterwakilan responden dari aspek gender dan juga representasi dari anggota KPS. Penentuan nama responden dipilih berdasarkan masukan dari konsultan FP V, Koordinator Kabupaten, Koordinator Pendamping, dan Pendamping PS di Kabupaten Sikka dan Sanggau. Nama-nama responden dapat dilihat pada lampiran 4 untuk Kabupaten Sikka dan Lampiran 5 untuk Kabupaten Sanggau.

Pembekalan *Enumerator*

Enumerator adalah individu dalam hal ini pendamping KPS program FP V yang dilatih khusus untuk mengumpulkan data melalui survey dengan penyebaran kuesioner. Terdapat 24 *enumerator* di Kabupaten Sikka dan 17 *enumerator* di Kabupaten Sanggau (nama *enumerator* dapat dilihat pada lampiran 4). Pembekalan *enumerator* di Kabupaten Sikka dilakukan pada tanggal 17 November 2023 di Hotel Pelita, Kota Maumere dan di Kabupaten Sanggau dilakukan pada tanggal 23 November 2023 di Balai Desa Mobui, Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau.

Pembekalan *enumerator* dilakukan dengan melibatkan Kepala Seksi Wilayah Nusa Tenggara Timur Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Dan koordinator Provinsi FP V di Kabupaten Sanggau. Selain penjelasan tentang kuesioner yang akan dipergunakan dalam pengambilan data melalui wawancara *enumerator* dilakukan praktek dengan menghadirkan dua anggota KPS di Kabupaten Sikka dan 3 orang anggota KPS di Kabupaten Sanggau. Dalam pembekalan *enumerator* penggunaan bahasa lokal sangat penting dilakukan oleh *enumerator* sehingga responden paham dan dapat menjawab lebih baik dan valid.

Pelaksanaan Survey dan *entry data*

Pelaksanaan survei di Kabupaten Sikka dilakukan dari tanggal 18 November hingga tanggal 25 November 2023. Sedangkan pelaksanaan survei di Kabupaten Sanggau dilakukan dari tanggal 24 November hingga tanggal 30 November 2023. Data Kuesioner kemudian di *-entry* ke dalam format excel oleh Tenaga ahli Lokal YKMI.

3.2.2 Diskusi Kelompok Terfokus

Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terfokus adalah metode pengumpulan data secara kualitatif dengan mengumpulkan 7-15 peserta dari anggota KPS dan dengan tema tertentu serta menggali informasi yang dibutuhkan. FGD ini dilakukan Tim Konsultan YKMI-FKKM bersama Pendamping PS dengan beberapa anggota KPS, baik di Kabupaten Sikka maupun di Kabupaten Sanggau. FGD dilakukan 4 kali yaitu:

1. Anggota KPS Tere Wetan Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dengan peserta sebanyak 25 anggota KPS. Selain dengan Pengurus KPS dan KUPS, diskusi juga diikuti oleh kaum perempuan yang juga merupakan Anggota KPS. Areal HKm seluas 403 hektar itu dikelola secara berkelompok dalam 6 blok. Kelompok ini sangat solid dalam pengerjaan lahan maupun kegiatan sosial lainnya. Gotong royong dalam menggarap lahan menjadi tradisi dalam kelompok blok ini.
2. Anggota KPS Wair Wuat Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka dengan peserta sebanyak 13 orang, dimana 5 diantaranya perempuan. Diskusi juga diikuti oleh 2 Pendamping PS dari FP V.

3. Anggota KPS 21 orang di Desa Mobui, kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Peserta FGD sebanyak 10 orang terdiri dari 9 laki-laki dan 1 orang ditambah 2 Pendamping Perempuan PS dari FP V.
4. Diskusi juga dilakukan dengan 2 orang Anggota Masyarakat hukum Adat (MHA) dari Ketemenggungan Sisang di Kampung Segumun. Diskusi juga diikuti oleh Pendamping PS perempuan dan Koordinator Kabupaten FP V.

3.2.3. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan di areal PS untuk mendapatkan gambaran situasi areal PS, tanaman dan sumberdaya hutan yang ada, lanskapnya serta aktifitas anggota KPS. Observasi dilakukan di areal HKm Hoder Ruha Nukak di Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka. Luas HKm Hoder Ruha Nukak adalah 408 hektar di mana tanaman dominannya adalah Kemiri, Jambu Mete, dan Bambu. Areal HKm ini relatif dekat dari kampung sehingga masyarakat intensif mengelola PS dan sudah menghasilkan produk untuk peningkatan pendapatan keluarga.

Observasi juga dilakukan di Desa Darat Gunung (Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka) di mana Anggota KPS Tere Wetan berdomisili. Kampung ini dekat dengan jalan raya, akan tetapi jauh dari lokasi PS yang mereka kelola dan dapatkan. Kabarnya dulu areal PS tersebut adalah pemukiman mereka hingga kemudian pemerintah menunjuk kawasan tersebut sebagai kawasan hutan pada tahun 1984 dan kemudian mereka pindah ke lokasi saat ini. Kampung tersebut kesulitan mendapatkan air bersih, juga fasilitas untuk MCK (mandi cuci kakus). Masih ada anak-anak yang putus sekolah dan terlihat ada yang terkena *stunting*. Masyarakat juga terlihat memelihara babi untuk memenuhi kebutuhan protein.

Observasi lain dilakukan di Desa Nangatobong, Kecamatan Waigate, Kabupaten Sikka. Desa ini merupakan domisili KPS Wair Wuat yang mendapatkan izin areal PS berupa HKm seluas 321 hektar. Beberapa rumah di desa tersebut terlihat bagus dengan dinding tembok dan lantai keramik. Akan tetapi kabarnya pendapatan utama dari pemilik rumah tersebut dari menyadap moke dari pohon lontar, bukan dari komoditi dari areal PS. Dari 71 Anggota KPS baru 17 orang yang intensif mengelola areal PS, dimana selain madu ada jambu mete dan asam yang mereka ambil hasilnya dari areal PS tersebut. Lokasi areal PS yang jauh dari kampung menjadi salah satu penyebab masyarakat kurang berminat mengelola areal PS tersebut.

Observasi di Kabupaten Sanggau dilakukan di Dusun Segumun, Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam. Walau tergolong Masyarakat Hukum Adat, masyarakat dusun ini terlihat maju dengan usaha air mineral yang mereka rintis dengan bantuan FP V. Pemukiman yang padat dengan kebutuhan air bersih yang besar serta potensi mata air di Hutan Adat membuat MHA Ketemenggungan Sisang menginisiasi usaha ini. Pengelola Hutan Adat juga membentuk 'pasukan patroli adat' untuk menjaga Hutan Adat dari gangguan pihak luar. Pengelola Hutan Adat juga menyiapkan berbagai jenis tanaman untuk merehabilitasi hutan-nya, terdapat bibit dana rea pembibitan tanaman di samping rumah salah satu pengurus Hutan Adat yang juga sebagai Kepala Dusun Segumun.

3.3 Analisis Data

Data-data di atas dianalisis secara kualitatif deskriptif dan kuantitatif sederhana. Data-data yang berupa data sekunder yang didapat dari tingkat KPS, desa, kecamatan, hingga Kabupaten Sikka dan Sanggau, data dan informasi terkait KPS, situasi lapangan berasal dari wawancara, FGD, dan hasil observasi lapangan dikumpulkan, kategorisasi, ditemukan polanya, triangulasi dan disimpulkan. Data-data berupa jenis-jenis dan sumber-sumber pendapatan yang kemudian dipilih dari areal PS dan Non PS untuk memperkuat data hasil kuesioner. Tujuannya agar mendapatkan gambaran dan data dasar pendapatan rumah tangga KPS yang berasal dari areal PS. Data dan informasi terkait persepsi, jenis pelatihan yang dibutuhkan dan aspek *gender* dianalisis

secara kualitatif untuk memberikan rekomendasi ke FP V dan mengetahui apakah dengan adanya KPS, pekerjaan perempuan semakin ringan dan juga keterlibatan perempuan semakin tinggi atau sebaliknya.

Sementara data yang dihasilkan dari kuesioner akan ditabulasi, dikuantifikasi dan disimpulkan secara kuantitatif sederhana. Data tabulasi tersebut menyangkut profil keluarga, struktur dan kepemilikan rumah tangga, pemilahan pendapatan rumah tangga dari areal perhutanan sosial dan yang bukan dari areal PS, biaya memproduksi komoditas yang dijual, jenis keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki dan yang sebaiknya dimiliki. Kesimpulan data kuantifikasi tersebut akan dilaporkan secara grafik maupun tabel dengan kategori per kabupaten dan per komoditas serta sebagian ada yang per KPS. Hasil analisis deskriptif kemudian diintegrasikan dengan hasil kuantitatif sehingga memperkuat kesimpulan terhadap baseline data ekonomi rumah tangga KPS di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sanggau. Hasil kedua analisis tersebut disintesiskan dan disimpulkan menjadi data baseline pendapatan anggota KPS di kedua Kabupaten tersebut untuk kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi ke depan.

Adapun cara mendapatkan angka Pendapatan Rumah Tangga KPS yang berasal dari area PS adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan dari komoditas yang dikonsumsi sendiri yaitu menghitung jenis komoditas yang dikonsumsi oleh responden per tahun dikali dengan harga rata-rata komoditas tersebut di dusun atau desa (total jumlah komoditas yang dikonsumsi sendiri per tahun x harga rata-rata komoditas di lokasi interview).
2. Pendapatan dari komoditas yang dijual yaitu dengan cara menghitung penerimaan (jumlah kuantitas panen setahun oleh responden dari masing-masing jenis komoditas yang dijual di kali dengan harga masing-masing komoditas yang dijual di kurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Singkatnya $\text{Pendapatan} = \text{penerimaan} - \text{biaya}$. Biaya yang dimaksud disini adalah biaya pembelian bibit, perawatan dan biaya transportasi penjualan komoditas/produk PS. Namun untuk biaya tenaga kerja petani KPS belum dihitung.

Dengan demikian pendapatan dari komoditas yang dijual adalah pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan petani untuk menghasilkan produk tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Kabupaten Sikka

Kabupaten Sikka adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Ibu kota Kabupaten adalah Maumere. Kabupaten Sikka merupakan daerah kepulauan dengan total luas daratan 1.731,91 km². Terdapat 18 pulau baik yang didiami atau pun tidak, di mana pulau terbesar adalah Pulau Besar (3,07 persen). Sedangkan pulau yang terkecil adalah Pulau Kambing (Pulau Pemana Kecil) yang luasnya tidak sampai 1 km². Dari 18 pulau yang terdapat di wilayah administratif Kabupaten Sikka, sebanyak 9 pulau merupakan pulau yang tidak dihuni.

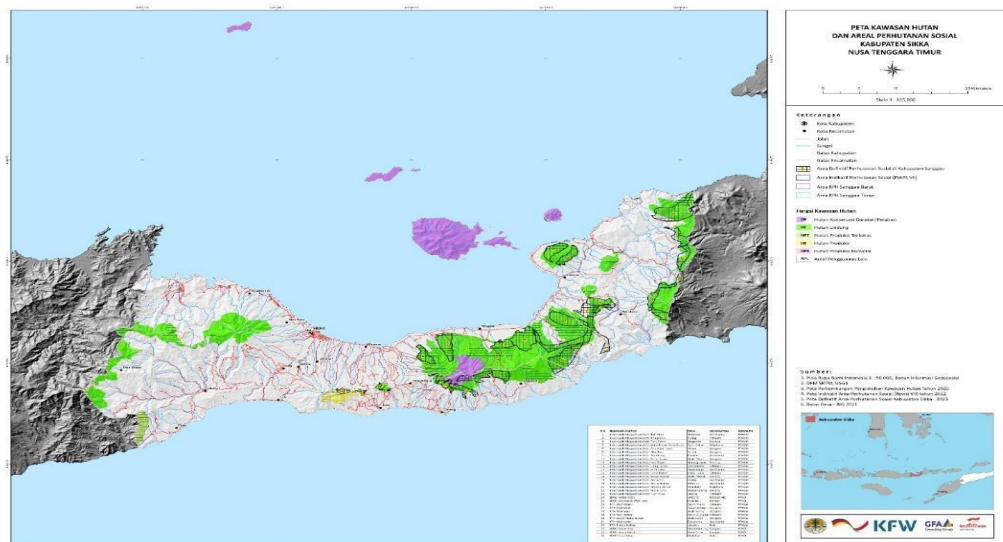
Jumlah penduduk Kabupaten Sikka adalah 321.953 jiwa dengan kepadatan 186 jiwa/km² (BPS Kabupaten Sikka, 2020) Sementara batas wilayah Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut:

Utara : Laut Flores,
Selatan : Laut Sawu,
Timur : Kabupaten Flores Timur,
Barat : Kabupaten Ende

Kabupaten Sikka secara geografis dibagi menjadi dua bagian yaitu Sikka Barat dengan topografi relatif datar dan Sikka Timur dengan topografi berbukit dengan kemiringan terjal. Kabupaten Sikka mayoritas dihuni oleh penduduk lokal, kecuali di kota Maumere dan kota-kota kecamatan telah banyak pendatang. Untuk desa-desa dimana ada areal PS, mayoritas penghuninya adalah masyarakat lokal atau adat.

4.1.1 Gambaran Singkat Perkembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Sikka

Terdapat 24 KPS yang menjadi target sasaran Program FP V di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur dengan luas kurang lebih 12.753,83 hektar dengan penerima manfaat 739 Kepala Keluarga. Pada umumnya areal PS yang ada di Kabupaten Sikka khususnya di Sikka Timur dengan topografi berbukit dan berstatus Hutan Lindung di wilayah KPHL Sikka. Peta Kawasan Hutan dan areal PS di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada gambar 1. Sedangkan nama-nama ke 24 SK Ijin/Persetujuan Pengelolaan PS di Kabupaten Sikka yang semuanya berbentuk skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dapat dilihat pada lampiran 7.



Gambar 1. Peta Kawasan Hutan dan Areal Perhutanan Sosial di Kabupaten Sikka

Secara umum, kondisi kawasan hutan yang dikelola masyarakat tersebut mempunyai tutupan hutan yang baik. Pengelolaan PS di Sikka berakar dari pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun temurun, dimana pengelolaan hutan berdasarkan adat masih terasa cukup kuat. Menurut kepala

KPHL Sikka seharusnya skema yang tepat adalah hutan Adat, namun dikarenakan pada saat dilakukan pengusulan PS 10 tahun yang lalu, skema hutan Adat masih belum terlalu direkomendasi oleh pemerintah dan prosesnya panjang, sehingga akhirnya dipilih skema HKM.

Sebagian besar HKM di Sikka mempunyai sistem zonasi berdasarkan adat, di mana secara prinsip kawasan hutan dibagi menjadi dua zona, yaitu zona hutan larangan, dan zona hutan pemanfaatan. Di zona hutan larangan, masyarakat dilarang melakukan proses penebangan dan budidaya, hanya bisa mengambil hasil hutan bukan kayu saja, semisal buah-buahan, rotan dan tanaman obat. Di zona pemanfaatan, terdapat variasi tanaman yang cukup kaya yang membentuk budidaya tanaman campur membentuk pola agroforestri, yang berupa pohon besar (mahoni, kelapa, kemiri, dan lainnya), MPTS (mete, bambu, kakao, cengkeh, buah-buahan, kopi, pala), tanaman bawah semisal hijauan pakan ternak, lebah madu, jagung dan padi) dan tanaman umbi (porang, singkong, ubi jalar, kacang tanah) serta sekarang tengah berkembang tanaman rambat (sirih, vanilli, dan lada). Area PS didominasi oleh lahan kering dengan kontur berlembah, berbukit serta berbatu.

Komoditas dominan yang dikelola KPS terutama kemiri dan mete yang sangat masuk akal mengingat kedua komoditas tersebut sangat cocok dengan jenis tanah, budaya masyarakat setempat dan terutama aksesibilitas area PS. Ditemukan masalah klasik dalam rantai pasok kedua komoditas tersebut, dimana terdapat beberapa pemain pasar (pedagang pengumpul) yang mengendalikan harga dan masyarakat sangat tergantung kepadanya karena mampu memberikan “uang cepat” (seringkali dengan sistem ijon) namun dengan pendapatan yang relatif rendah.

Masalah keterbatasan lahan dan aksesibilitas adalah dua hal yang banyak dikeluhkan masyarakat dan menjadi kendala pengembangan komoditas dari perhutanan sosial. Memang Sebagian besar petani HKM di Sikka sangat bergantung pada area PS sebagai modal alam untuk pengembangan ekonomi. Rata-rata mereka mengelola lahan yang lebih besar di area PS ketimbang di luar area PS. Topografi yang berbukit dengan kelerengan tingkat sedang (20-30 derajat) dan curam (> 30 derajat) di area PS menjadi kendala, terutama saat melakukan perawatan tanaman dan pengangkutan hasil panen yang hanya bisa mengandalkan tenaga manusia (dipikul).

4.1.2 Hasil Studi Baseline Pendapatan Rumah Tangga Anggota KPS di Kabupaten Sikka

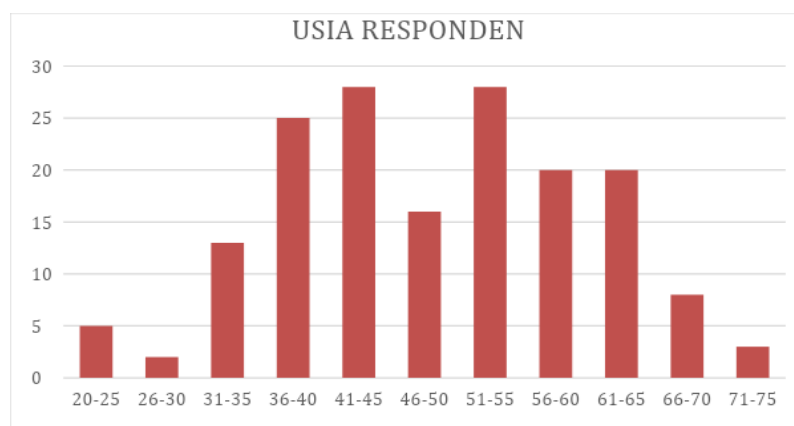
A. Identitas dan Rumah Tangga Responden

Sebanyak 168 responden (23%) dari 739 anggota KPS yang menjadi sampel yang disurvei di Kabupaten Sikka. Mayoritas responden adalah usia produktif antara 26-60 tahun dengan total 137 responden, sedangkan yang telah berumur 61 tahun ke atas atau usia tidak produktif sebanyak 31 orang. Responden di Kabupaten Sikka berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kelompok Umur Responden Berdasarkan Umur di Kabupaten Sikka

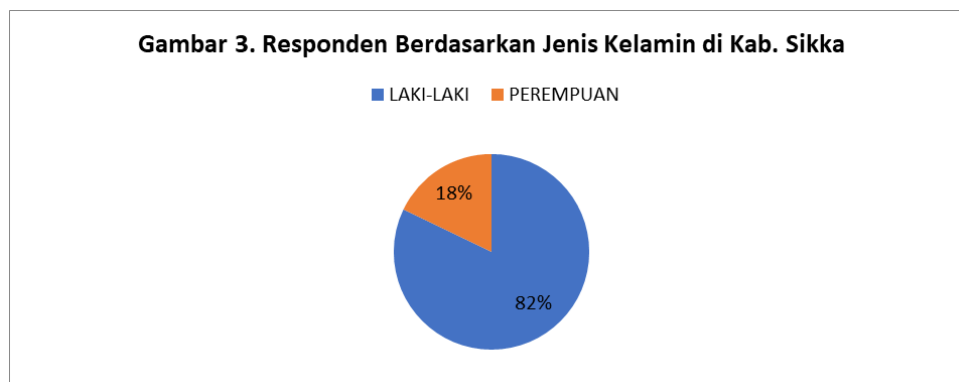
No	Kelompok Umur	Jumlah responden	Keterangan
1	< 26 tahun	5	
2	26-30 tahun	2	
3	31-35 tahun	13	
4	36-40 tahun	25	responden terbanyak 2
5	41-45 tahun	28	Responden terbanyak 1

6	46-50 tahun	16	
7	51-55 tahun	28	Responden terbanyak 1
8	56-60 tahun	20	Responden terbanyak 3
9	61-65 tahun	20	Responden terbanyak 3
10	66-70 tahun	8	
11	71 tahun ke atas	3	
	Total	168	



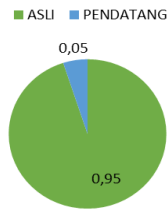
Gambar 2. Responden Berdasarkan Usia

Jika dilihat dari usia responden, maka KPS Sikka memiliki potensi besar dalam penyediaan tenaga kerja produktif, sehingga upaya budidaya tanaman, pengolahan produk paska panen, hingga pemasaran memiliki tenaga kerja yang cukup dan memiliki peluang besar untuk meningkatkan penghasilan. Responden berdasarkan aspek gender adalah sebanyak 138 responden (82%) adalah laki-laki dan 30 responden (18%) adalah perempuan (gambar 3).



Dilihat dari asal-usul responden, 95 persen merupakan penduduk asli dan 5 persen merupakan pendatang (Gambar 4). Kategori asli disini berdasarkan kategori dari masyarakat, di mana masyarakat membedakan asli dan pendatang suku-suku yang ada di Kabupaen Sikka dan diluar Sikka. Dalam hal ini peneliti mengkategorikannya suku asli dan pendatang berdasarkan kategori masyarakat tersebut.

Gambar 4. Responden Berdasarkan Asal-usul

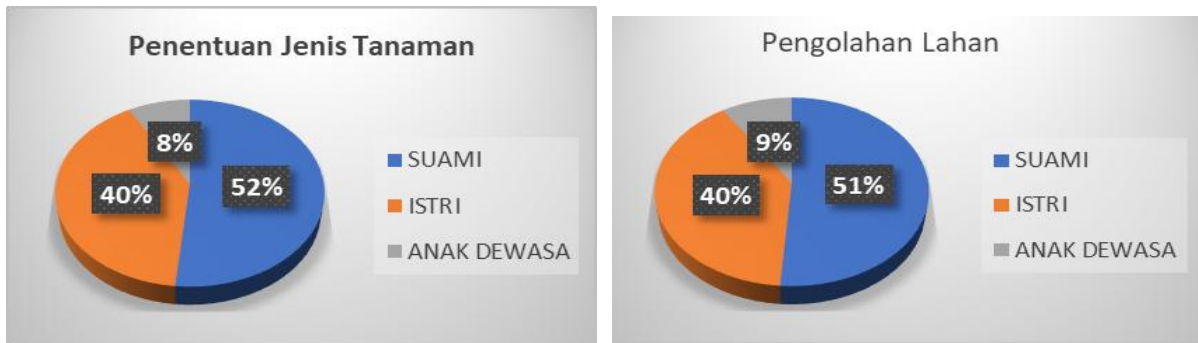


Dari 168 responden, total penguasaan lahan dalam areal KPS adalah 301,7 ha, sehingga rata-rata penguasaan lahan setiap responden/anggota KPS dalam areal Perhutanan Sosial adalah sebanyak 1,79 ha (lihat tabel 2). Sehubungan dengan tidak semua areal dapat dikelola secara produktif dikarenakan jenis tanah dan konturnya, maka wilayah garapan bagi per rumah tangga di Kabupaten Sikka masih dapat diperluas untuk ekstensifikasi pertanian.

Tabel 2. Penguasaan Areal PS Rata-rata oleh Anggota KPS/KK

NO	NAMA KPS	LUAS AREA PS (HA)	JUMLAH RESPONDEN/KPS	LUAS AREA DIKELOLA/KK
1	WATU TENAT	684,578	7	17,5
2	MAPIT DETUN TARA GAHAR	809,80	7	7
3	OBO BAO	1.587,63	7	14
4	KEBAR MERAK	124,192	7	10,5
5	WAIRKUNG	429,159	7	10,5
6	DU'A TORU	434,198	7	7
7	RIING GOLE	423	7	7
8	LA'A TAGAT	53	7	3,5
9	PEMA RUWA	1.140,38	7	17,5
10	TANA TUKAN	368,171	7	7
11	TIENG TOTAN	1.417,41	7	21
12	WAIR WUAT	321	7	4,2
13	WATU WULUN	254,144	7	17,5
14	TUAR TANA	347	7	7
15	WATU ATA	326,366	7	17,5
16	WAI HENIN	132	7	10,5
17	WAIR TOPO	1000	7	17,5
18	DU'A HOGAR	519	7	24,5
19	TION TOMA	48,6	7	14
20	GITA NIAN LUAH	707,721	7	10,5
21	RUHA NUKAK	408	7	7
22	SODANG GAHAR	316,85	7	17,5
23	TERE WETAN	403	7	21
24	BULI UHER	498,40	7	10,5
Total		10.305,022	168	301,7
	Rata-rata wilayah Garapan /KK			1,79

Dalam usaha wanatani atau agroforestri di areal Perhutanan Sosial, suami memiliki peran dominan mulai dari penentuan jenis tanaman hingga panen di KPS Kabupaten Sikka. Hal ini terlihat dari hasil survey, di mana peran suami 52 % untuk penentuan jenis tanaman, peran suami 52 % untuk pengolahan lahan, dan peran suami adalah 51 % dalam pemeliharaan tanaman. Hanya dalam hal panen, peran suami menurun menjadi 46 %, namun masih dominan. Gambar peran dominan anggota keluarga dalam usaha wanatani di areal PS dapat dilihat pada gambar 5 dan 6.



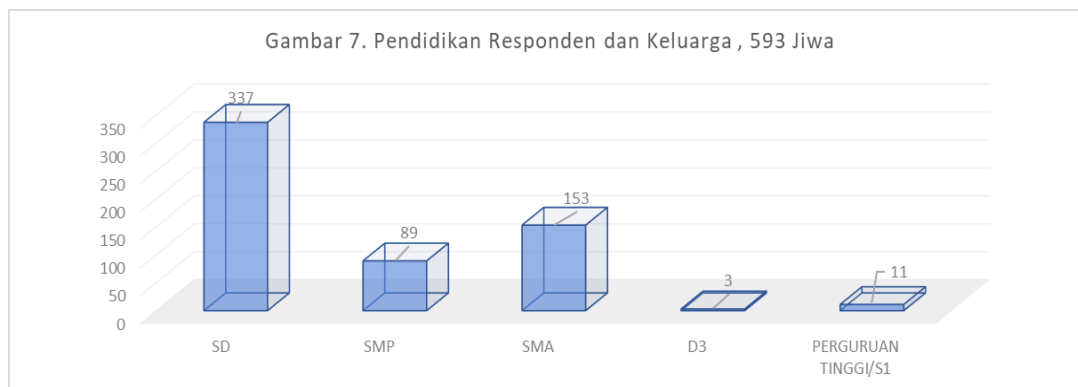
Gambar 5. Peran Dominan Anggota Keluarga dalam Penentuan Jenis Tanaman dan Pengolahan Lahan



Gambar 6. Peran Dominan Anggota Keluarga dalam Pemeliharaan Tanaman dan Panen

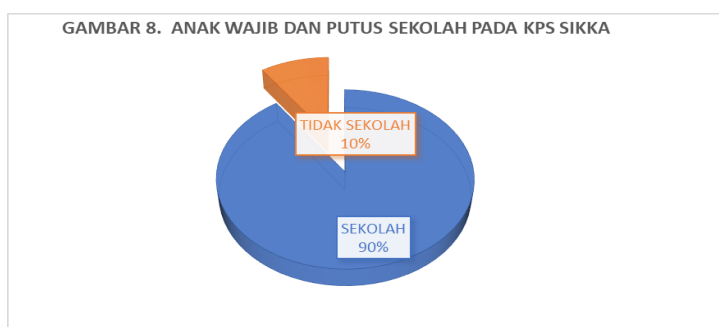
B. Pendidikan Anggota Keluarga KPS

Total anggota keluarga dari 168 responden adalah 593 orang, sehingga rerata satu keluarga adalah 4 jiwa. Sebanyak 57 % (337 jiwa) tamat SD, 15 % (89 Jiwa) tamat SMP, 26 % (153 jiwa) tamat SMA dan sisanya 2 % (14 Jiwa) tamat Perguruan tinggi. Dari tingkat pendidikan yang ada, maka sebagian besar adalah tamat SD diikuti dengan tamat SMA dan SMP. Dalam hal peningkatan kapasitas anggota KPS lebih mudah sehubungan dengan semua anggota KPS telah menenyam pendidikan minimal SD dan 41 % tamat SMP dan SMA.



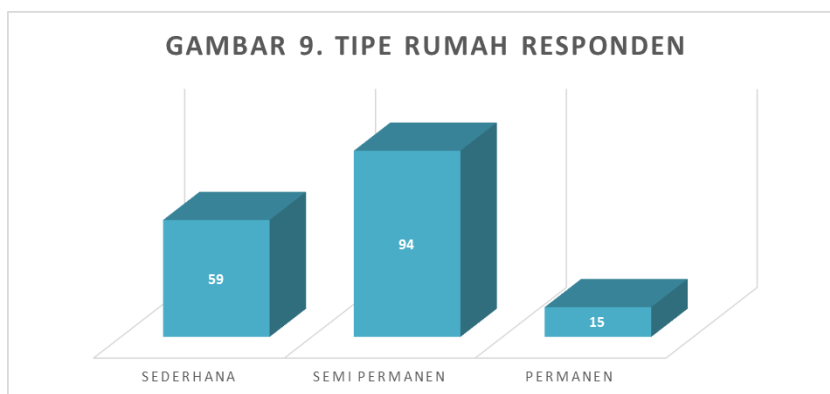
Sedangkan yang menjadi usia sekolah dari 593 jiwa tersebut adalah 160 orang, dan yang putus sekolah sebanyak 10 % atau 17 orang (gambar 8). Putusnya anak-anak bersekolah tersebut dikarenakan:

- Ekonomi keluarga, tidak mampu membayar biaya transport dan biaya sekolah karena ke SMP dan SMA harus ke Kecamatan dan Kabupaten.
- Lingkungan yang tidak mendukung
- kemampuan intelektual dan kemauan pribadi untuk bersekolah kurang.

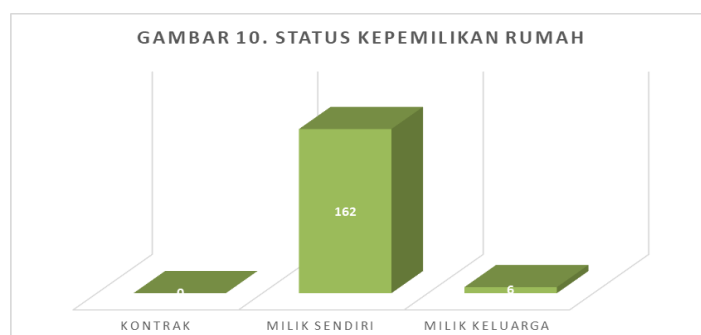


C. Infrastruktur Dasar Responden

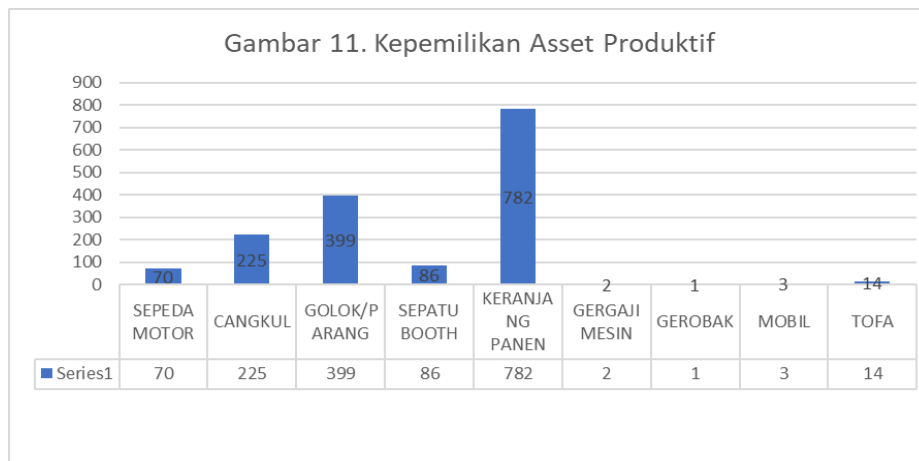
Mayoritas (56 %) tipe rumah responden adalah semi permanen (lantai semen, dinding papan atau batu), diikuti 35% responden memiliki kondisi rumah tidak permanen/ sederhana (lantai tanah, dinding papan/tepas/bambu, rumah panggung), 9% memiliki rumah yang kategori permanen (lantai keramik dan dinding batu, atap seng atau genteng) . Tipe rumah responden dapat dilihat pada gambar 9. Dari kepemilikan rumah tersebut, 91% responden memiliki rumah tidak permanen dan semi permanen yang berdasarkan kriteria PUPR megacu pada program nasional rumah layak huni, menjadi tidak layak huni, atau dapat dikategorikan anggota KPS di Kabupaten Sikka terkategori miskin.



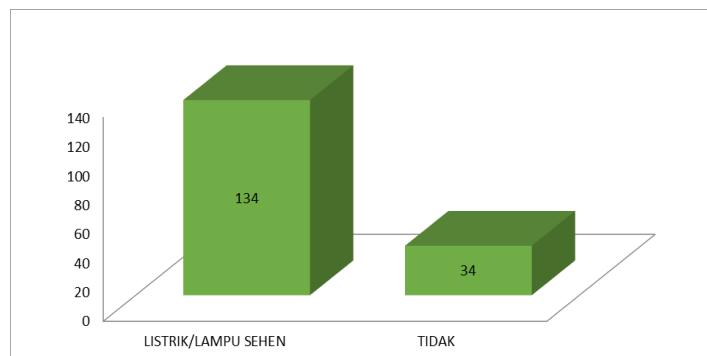
Sedangkan kepemilikan rumah adalah mayoritas yaitu 96% (162 responden) menjawab bahwa rumah adalah milik sendiri, sisanya 4 % (6 responden menjawab milik keluarga) dan tidak ada yang mengontrak (gambar 10).



Untuk menunjang kegiatan wanatani dan pendapatan rumah tangga di areal PS, para anggota KPS memiliki aset umumnya tempat keranjang panen, alat budidaya tanaman seperti golok, tofa (alat transportasi produksi kerja) dan cangkul. Sudah ada yang memiliki alat transportasi sebagai alat angkut seperti sepeda motor (70 buah), tofa (14 buah) dan mobil (3 buah). Kepemilikan aset produktif dapat dilihat pada gambar 11 sebagai berikut:

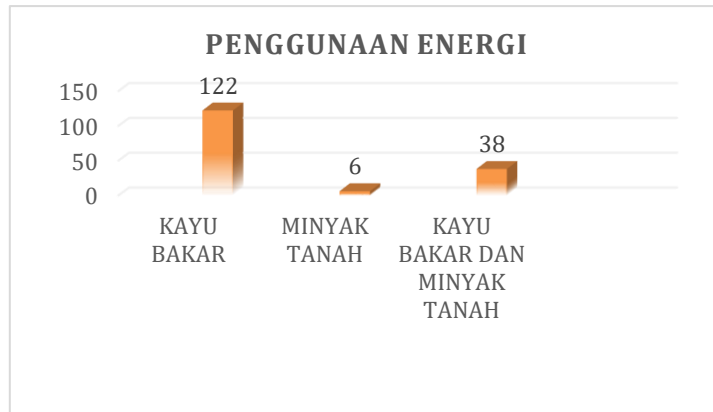


Dari 168 responden, terdapat 134 responden atau 80% anggota KPS memiliki akses ke listrik atau lampu seken, dan 34 responden atau 20% tidak memiliki akses terhadap listrik (Gambar 12). Dari sisi akses ke energi listrik untuk mendukung kegiatan produksi dan paska panen, telah memadai bagi mayoritas anggota KPS. Namun demikian masih ada 20% anggota KPS yang tidak memiliki akses listrik baik itu dari PLN maupun listrik swadaya.



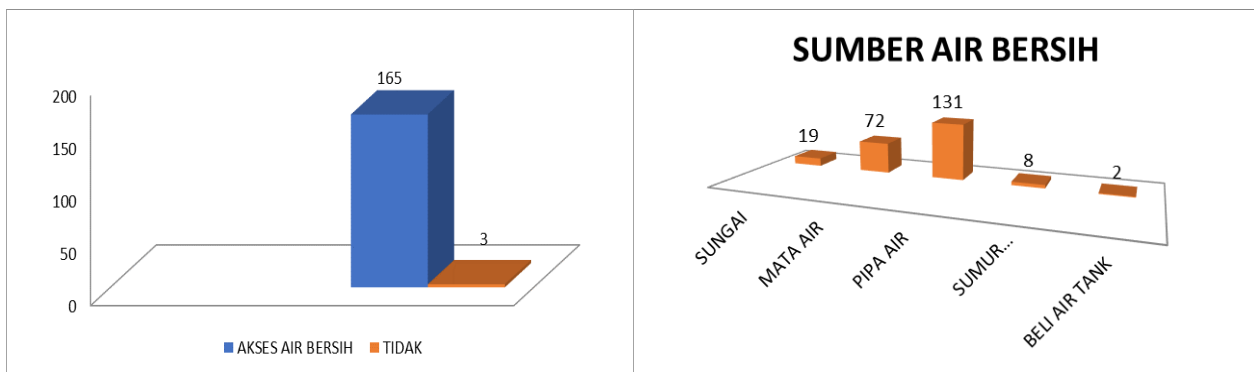
Gambar 12. Akses Anggota KPS di Sikka terhadap Listrik

Sumber bahan bakar utama keluarga KPS di Sikka adalah kayu bakar. Sebanyak 73% anggota KPS atau 122 responden menjawab menggunakan kayu bakar, 23% atau 38 responden menggunakan kayu bakar dan minyak tanah, sedangkan sisanya 4% atau 6 orang menggunakan minyak tanah. (Gambar 13). Kalau dilihat dari sisi penggunaan kayu bakar, maka mayoritas atau 73 % anggota KPS di Sikka adalah kategori miskin.



Gambar 13. Penggunaan Energi Anggota KPS di Sikka

Mayoritas anggota KPS di Sikka telah mendapatkan akses air bersih. Hal ini dapat dilihat dari 168 responden, 162 responden atau 98% telah mendapatkan akses air bersih. Hanya 2 % responden yang belum mendapatkan akses air bersih (Gambar 14). Namun demikian air bersih tersebut tidak dekat dan sebagian besar harus memikul untuk kebutuhan minum, cuci, mandi dan kakus.



Gambar 14. Akses Anggota KPS terhadap Air Bersih dan Sumber-sumber Air Bersih

Sumber-sumber air bersih dari anggota KPS terdiri dari sungai, mata air, pipa air yang dialirkan, sumur dan juga pengumpulan air hujan dengan menggunakan tangki air. Sumber air bersih responden yang terbanyak dari pipa air dan diikuti dengan mata air (Gambar 14). Pada saat musim kering hanya embung-embung besar, sungai dan pipa air yang berisi air. Secara umum pada musim kemarau, air cukup sulit di bagi anggota KPS di Kabupaten Sikka. Pipa air akan mengalir dari areal hutan atau PS jika kondisi hutan di PS baik. Untuk itu, kondisi dan tutupan hutan akan memberikan manfaat penting dalam penyediaan air pada musim kemaran.

D. Profil Hasil Hutan Bukan Kayu di 24 KPS Kabupaten Sikka

Anggota KPS masyarakat Sikka pada umumnya senang dengan pemberian ijin /persetujuan perhutanan sosial ini. Pada awalnya usulan dan konsep pengelolaan areal hutan di Sikka berbasis adat dan yang diinginkan adalah hutan adat. Namun sehubungan dengan rumitnya proses pengakuan Hutan Adat, maka ke-24 KPS ini mengusulkan bentuk HKM. Di samping itu, sebagian besar areal PS merupakan areal lindung dan sumber mata air.

Areal KPS sangat penting bagi masyarakat karena menjadi sumber makanan keluarga baik itu nabati dan protein. Jenis-jenis jenis nabati meliputi tanamn pangan tanaman buah-buahan, tanaman kacang-kacangan dan juga sayuran. Selain itu areal PS juga sumber ekonomi utama keluarga karena banyak produk HHBK tahunan yang didapatkan seperti dari kemiri, jambu mete, kelapa, cengke, durian, alpokat, kopi, kakao, pala, dan petai. Areal PS tersebut juga merupakan areal perladangan oleh nenek moyang mereka yang sudah ada tanaman tahunan seperti jambu mete, kemiri, kelapa, petai, dan lain-lain. Areal PS juga menjadi tempat

mengambil atau memburu beberapa hewan untuk kebutuhan protein seperti: babi, monyet, burung, dan hewan lainnya. Oleh karena itu, areal PS juga menjadi sumber makanan keluarga, sumber protein, sumber pendapatan utama, dan menjadi sumber air serta penyeimbang iklim.

E. Sumber Pendapatan Rumah Tangga Anggota KPS di Kabupaten Sikka

Sumber-sumber pendapatan rumah tangga anggota KPS di Kabupaten Sikka dapat dikategorikan menjadi tiga :

1. Komoditas atau hasil tanaman yang dikonsumsi sendiri yang dapat dihitung berdasarkan banyaknya jumlah panen dikalikan harga rerata di desa.
2. Komoditas atau hasil tanaman yang dijual baik itu ditingkat tapak, desa , kecamatan hingga kabupaten. Sumber pendapatan 1 dan dua masuk kategori sumber pendapatan dari areal PS.
3. Pendapatan di luar PS berupa sumber pendapatan yang diterima dari luar kegiatan PS

Adapun sumber pendapatan rumah tangga anggota KPS yang berasal dari areal PS di Kabupaten Sikka sebagai berikut:

1. Pendapatan dari komoditas yang dikonsumsi sendiri **Rp.923.376.900/tahun** atau rata-rata perkeluarga **Rp5.496.291/tahun** atau per keluarga **Rp. 458.024/bulan**.
2. Pendapatan dari komoditas yang dijual **Rp1.628.249.136/tahun** atau rata-rata per keluarga **Rp. 9.691.959/tahun** atau per keluarga **Rp.807.663/bulan**
3. Sedangkan pendapatan anggota KPS yang bersumber dari lain-lain (atau luar PS) adalah sebesar Rp.980.300.000.00/tahun atau **Rp5.538.418/KK/tahun** atau **Rp.486.260 /KK/bulan**.
4. Dengan demikian, rerata pendapatan rumah tangga KPS (yang bersumber dari areal PS dan lain-lain) Non areal PS di Kabupaten Sikka sebesar **Rp. 21.023.369/tahun** atau **Rp. 1.751.947/KK/bulan**.

Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan dalam tabel 3 yang menjadi sumber pendapatan rumah tangga KPS secara total dan yang dipisah berdasarkan pendapatan yang bersumber dari PS dan areal PS di Kabupaten Sikka dibawah ini.

Tabel 3. Summary Pendapatan Anggota KPS Kabupaten Sikka dari areal PS dan Non PS

No	Jenis pendapatan RT KPS	Kab. Sikka			Prosentase
		Total Pendapatan (Rp)	Pertahun/KK (Rp)	Perbulan/KK (Rp)	
1	Pendapatan dari komoditas dikonsumsi sendiri	923.376.900	5.496.291	458.024	26%
2	Pendapatan dari komoditas di jual	1.628.249.136	9.691.959	807.663	46%
	Sumber pendapatan dari PS	2.551.626.036	15.188.250	1.265.688	
3	Pendapatan lain	980.300.000	5.835.119	486.260	28%
	Grand Total	3.531.926.036	21.023.369	1.751.947	100%

Dari tabel 3 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga KPS di Kabupaten Sikka adalah **Rp.21.023.369/KK/tahun**, atau **Rp.1.751.947/KK/bulan**. Jika kita bandingkan pendapatan anggota KPS dari areal PS dan non PS, maka pendapatan dari areal PS adalah **72 %**, sementara dari areal non PS hanya **28 %**. Dengan kata lain, bahwa keberadaan PS sangat penting bagi masyarakat sebagai sumber ekonomi, dan pemenuhan pangan selain manfaat lainnya. Untuk penjelasan lebih rinci terkait pendapatan yang berasal dari PS baik yang dikonsumsi sendiri maupun dijual dan yang dari luar PS dapat dilihat pada poin di bawah ini.

E.1 Komoditas yang dikonsumsi sendiri dari areal PS.

Adapun jenis-jenis komoditas HHBK yang dimanfaatkan oleh anggota KPS untuk keperluan makan keluarga atau dikonsumsi sendiri adalah:

- (1) Tanaman pangan meliputi: padi, jagung, sorgum, singkong, keladi, dan ubi jalar
- (2) Tanaman buah-buahan meliputi: pisang, alpukat, nangka, nanas, pepaya, buah naga, dan kelapa.

Sedangkan yang termasuk

- (3) Tanaman kacang-kacang : kacang tanah, kacang hijau, dan kacang buncis, dan;
- (4) Tanaman sayuran dan ritual adat meliputi labu jepang, tomat, dan wortel, sirih dan pinang

Berdasarkan hasil perhitungan survey (tabel 4), maka total pendapatan anggota KPS yang berupa komoditas yang dikonsumsi sendiri yang berasal dari areal PS 923.376.900. Dengan demikian rerata pendapatan rumah tangga KPS yang berasal dari komoditas sendiri adalah **Rp.5.496.291/tahun** atau per keluarga Rp. **458.024/bulan**. Detail jenis komoditas dan jumlah pendapatan dari komoditas yang dikonsumsi sendiri dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 15 di bawah ini.



Gambar 15. Sumber Pendapatan untuk Komoditi yang dikonsumsi Sendiri

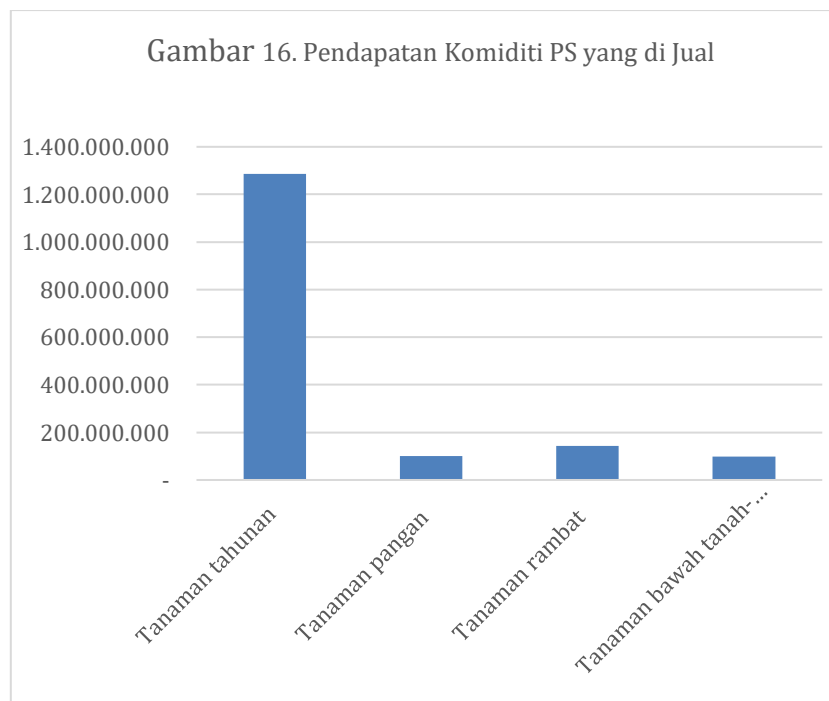
Tabel 4. Jenis Komoditas PS Yang dikonsumsi di Kab. Sikka			
1	Tanaman Pangan		
	Pangan	Jumlah Panen	Total Rp/Tahun
	Padi	25147	318.219.000
	Jagung	11.229	85.895.000
	Sorgum	250	1.750.000
	Singkong/ubi kayu	10.278	104.063.900
	Ubi jalar	3.910	25.370.000
	Keladi	64.676	50.058.000
	Kopi	15.075	79.069.000
	Sub total	130.565	664.424.900
2	Buah-buahan		
	Alpukat	859	11.965.000
	Nenas	104	500.005
	Pisang	3.910	51.166.000
	Pepaya	590	1.160.000
	Buah Naga	6.000	300.000
	Kelapa	57	2.730.000
	Sub Total	11.520	112.240.000
3	Kacang-kacangan		285.000
	Kacang Tanah	1151	23.182.000
	Kacang Hijau	474	6.240.000
	Sub Total	1625	29.422.000
4	Sayuran		
	Labu Jepang	3.504	35.100.000
	Tomat	500	250.000
	Wortel	440	4.760.000
	Boncis	480	4.800.000
	Sub Total	4.924	44.910.000
5	Bumbu		
	Lada	60	180.000
	Merica	25	1.200.000
	Cabai/lombok	460	5.500.000
	Jahe	2.673	42.135.000
	Kunyit	2.067	20.715.000
	Sub Total	5.285	69.730.000
6	Kebutuhan Ritual dan Budaya		
	Pinang	380	2.450.000
	Sirih	40	200.000
	Sub Total	420	2.650.000
	Grand Total		923.376.900
	Rerata per KK/tahun		5.496.291
	Rerata per KK/bulan		458.024

Dari Gambar 15 dan Tabel 4, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanaman pangan khususnya padi dan singkong memiliki total nilai pendapatan yang paling tinggi dan signifikan untuk memenuhi sumber pangan, dibandingkan dengan buah-buahan, kacang-kacangan, sayuran, bumbu dan kebutuhan ritual. Nilai pangan yang kedua tertinggi adalah tanaman buah-buahan. Nilai terkecil untuk komoditas yang dikonsumsi sendiri adalah tanaman untuk kebutuhan bumbu dan ritual adat. Berdasarkan data dan grafik di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa areal PS sangat penting menjadi sumber pangan bagi keluarga. Selain sebagai sumber pangan keluarga, areal PS juga sebagai sumber mencari alat-alat kebutuhan ritual dan adat.

Sumber pendapatan anggota KPS yang dikonsumsi sendiri dari hewani untuk kebutuhan protein tidak termasuk dalam perhitungan ini, karena pendapatan ini tidak menentu dan bukan menjadi pekerjaan rutin bagi anggota KPS. Kemudian tidak semua anggota KPS yang melakukan perburuan hewan-hewan yang ada didalam areal PS.

E.2. Pendapatan dari Komoditas yang dijual

Areal PS menjadi sumber utama penghasilan bagi anggota KPS. Di areal PS terdapat mayoritas tanaman tahunan yang menjadi andalan ekonomi seperti jambu mete, kemiri, pala, cengkeh, kopi, kelapa, kako, petai, pisang, dan alpukat. Selain itu terdapat juga tanaman merambat yang dijual seperti merica, lada, vanili, sirih, serta jenis komoditi lainnya. Dari hasil survey menemukan bahwa pendapatan paling tinggi dari komoditas yang dijual adalah tanaman tahunan dengan perbedaan yang sangat signifikan atau diatas 75%, diikuti dengan tanaman rambat, tanaman pangan dan tanaman bawah tanah seperti pada gambar 16.



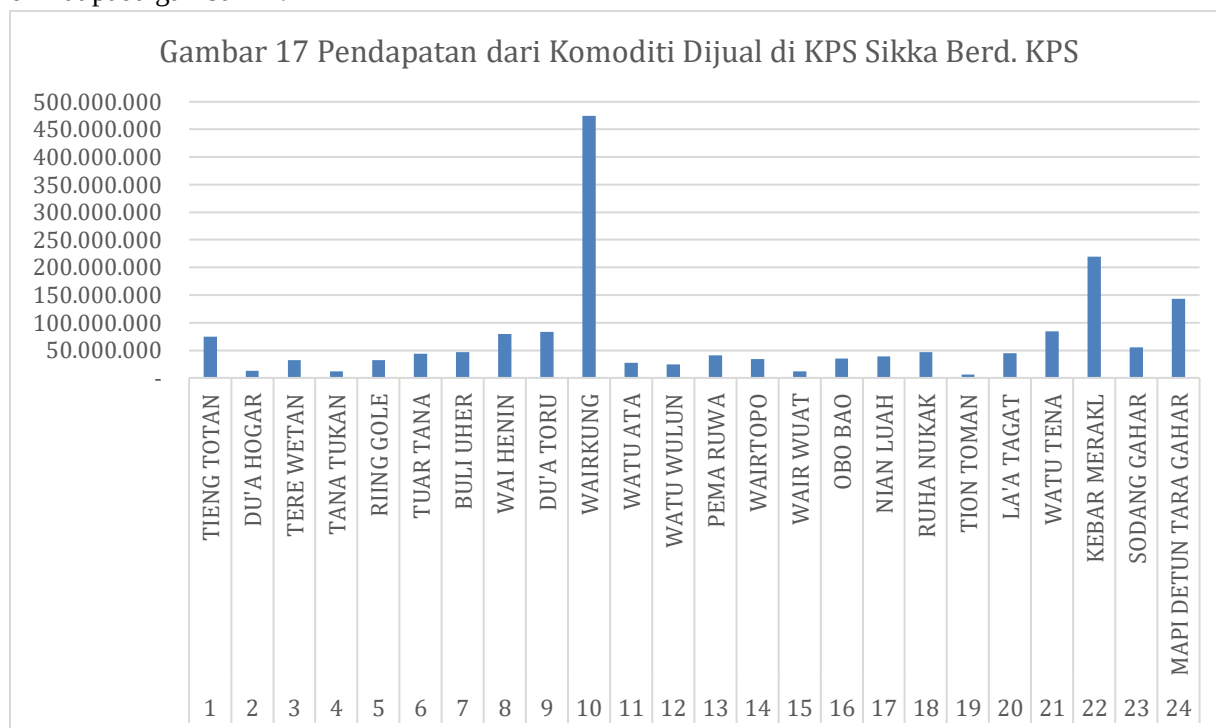
Adapun total pendapatan dari jenis komoditi yang dijual adalah Rp.1.628.249.136 atau pendapatan rata-rata per keluarga KPS adalah **Rp.9.619,659/tahun, atau Rp.807.663/bulan**. Detail sumber pendapatan dari komoditas yang dijual dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Sumber Pendapatan Anggota KPS dari Komoditas yang dijual

NO	Jenis Komoitas di Jual	Penjualan	biaya	Pendapatan
I	Tanaman tahunan			
1	Kemiri	539.676.000	12.350.000	527.326.000
2	Pala	158.320.000	8.940.000	149.380.000
3	Mete	373.601.336	8.112.200	365.489.136
4	Cengkeh	96.155.000	24.240.000	71.915.000
5	Kopi	64.155.000	3.330.000	60.825.000
6	Kakao	52.550.000	1.480.000	51.070.000
7	kelapa	24.659.000	1.290.000	23.369.000
8	Petai	600.000	50.000	550.000
9	Alpukat	36.640.000	900.000	35.740.000
			60.692.200	1.285.664.136
II	Tanaman Rambat dan Non Kayu			
1	Vanili	74.335.000	3.110.000	71.225.000
2	Merica	5.700.000		5.700.000
3	Madu	9.500.000	240.000	9.260.000
4	Bambu	1.600.000	50.000	1.550.000
5	Sirih	150.000		150.000
6	Pinang	5.600.000	1.000.000	4.600.000
7	Porang	5.700.000	-	5.700.000
8	Tembakau	2.500.000	100.000	2.400.000
		105.085.000	4.500.000	100.585.000
III	Tanaman pangan			-
1	Padi	9.000.000	4.250.000	4.750.000
2	Jagung	3.750.000	835.000	2.915.000
3	Singkong	78.450.000	1.090.000	76.980.000
4	Ubi Jalar	18.650.000	1.345.000	17.305.000
5	Pisang	38.445.000	1.765.000	36.380.000
6	Keladi	5.950.000	240000	4.760.000
			9.525.000	143.090.000
IV	Tanaman Bawah			-
1	Jahe	62.050.000	960.000	61.090.000
2	Kunyit	11.350.000	340.000	11.010.000
3	Lombok	27.650.000	1.070.000	26.580.000
4	Terung	250.000	20.000	230.000
			2.390.000	98.910.000
	Grand Total		77.107.200	1.628.249.136
	Rerata pendapatan PerKK/tahun		458.971	9.691.959
	Rerata pendapatan PerKK/bulan		38.248	807.663

Jenis pendapatan dari komoditas yang dijual di Kabupaten Sikka adalah merupakan pendapatan bersih karena telah dikurangi dengan biaya-biaya produksi komoditas dan ongkos transportasi penjualan produk/komoditas PS. Terdapat Rp.77.107.200 yang merupakan biaya produksi untuk menghasilkan pendapatan Rp.1.628.190 rupiah. Jika dihitung dengan pendapatan kotor, maka rata-rata penambahan pendapatan per tahun Rp.458.971 atau Rp.38.248 /KK/bulan. Sehingga pendapatan kotor rumah tangga KPS di Kabupaten Sikka adalah Rp. 845.911.

Berdasarkan KPS, pendapatan rumah tangga tertinggi dari 24 KPS dengan penghasilan 29 %, adalah KPS Waikung (gambar 17). Kemudian diikuti dengan 4 KPS teratas lainnya yaitu KPS Kebar Merak, KPH Mapi Detun Tara Gahar, KPH Watu Tena, dan KPH Du'a Toru. Sementara itu 5 KPH berpenghasilan terendah adalah KPH Tion Toman, Wair Wuat, Tana Tukan, Du'a Hogar, dan Watu Wulun. Penghasilan tertinggi di KPH Waikung berasal dari penjualan jambu mete dan kemiri, jika harga kedua komoditas ini dapat ditingkatkan, serta akses pasar dapat dibuka, maka pendapatan dari dua komoditas ini dapat dipertahankan dan meningkat. Untuk 5 KPH penghasil terbanyak, harus dipertahankan produksinya dan ditingkatkan nilai produksi dengan pengolahan produk. Sementara 5 KPH dengan pendapatan terendah dapat ditingkatkan diversitas dan produktifitas tanaman yang dapat dijual dan difasilitasi akses pasarnya. Gambaran pendapatan per KPS dapat dilihat pada gambar 17.

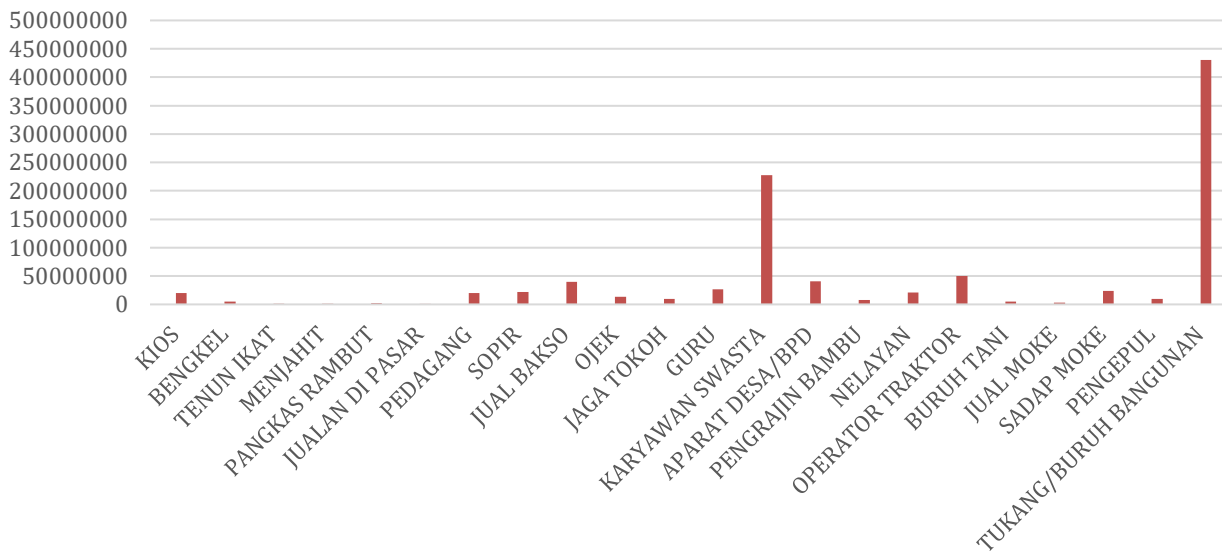


E. 3 Pendapatan Lain dari Luar Agroforestry

Ada 22 jenis pekerjaan atau sumber pendapatan di luar kegiatan agroforestry/PS. Sumber utama pendapatan lain adalah dari pekerjaan sebagai buruh bangunan sebanyak 19 % (31 responden), diikuti dengan pekerjaan menyadap moke dan kios masing-masing 3 % (5 responden) dan guru 2 % (4 responden) serta diikuti dengan pekerjaan serabutan lainnya dari 18 sektor lainnya. Detail sumber pendapatan di luar PS dapat dilihat pada gambar 18 dan tabel 6).

Adapun total pendapatan lain-lain (di luar agroforestri) adalah sebesar Rp.980.300.000 dari 66 responden yang memiliki sumber pendapatan lain. Jika dirata-ratakan dengan 168 responden, maka rata-rata pendapatan rumah tangga dari sumber penghasilan lain (dari non PS) per KK adalah **Rp.5.835.119/tahun atau Rp.486.260/bulan**. Jika dibandingkan dengan pendapatan dari areal PS, maka pendapatan di luar PS hanya menyumbang 28 % dari total pendapatan per KK anggota KPS di Kabupaten Sikka.

Gambar 18 Sumber Pendapatan Lain di luar Agroforestri



Tabel 6. Sumber Pendapatan Lain di Luar Agroforesti Anggota KPS di Kabupaten Sikka

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	TOTAL PEMASUKAN/THN
1	KIOS	5	19.600.000
2	BENGKEL	1	5.000.000
3	TENUN IKAT	1	1.000.000
4	MENJAHIT	1	1.000.000
5	PANGKAS RAMBUT	1	1.800.000
6	JUALAN DI PASAR	1	500.000
7	PEDAGANG	1	20.000.000
8	SOPIR	2	22.000.000
9	JUAL BAKSO	1	40.000.000
10	OJEK	3	13.000.000
11	JAGA TOKOH	1	9.600.000
12	GURU	4	26.400.000
13	KARYAWAN SWASTA	1	228.000.000
14	APARAT DESA/BPD		40.800.000
15	PENGRAJIN BAMBU	1	8.000.000
16	NELAYAN	2	21.200.000
17	OPERATOR TRAKTOR	1	50.000.000
18	BURUH TANI	1	5.000.000
19	JUAL MOKE	1	3.000.000
20	SADAP MOKE	5	24.000.000
21	PENGEPUL	1	10.000.000
22	TUKANG/BURUH BANGUNAN	31	430.400.000
	Total	66	980.300.000
	Rerata sumber pendapatan lain	168	5.835.119

E.4 Paska Panen dan Pemasaran Komoditas Perhutanan Sosial

Pada umumnya hasil produk yang dijual berupa bahan mentah dan setengah jadi, seperti: kemiri, kelapa, vanili dan cengkeh. Ada juga produk yang dijual dalam bentuk bahan mentah seperti: alpukat, asam dan mete serta produk yang dijual berupa bahan setengah jadi, antara lain pala, merica dan kopi. Penjualan bahan mentah ini dikarenakan penduduk ingin cepat mendapatkan uang kas dan juga sistem ijon yang menjerat anggota KPS sehubungan dengan kebutuhan rumah tangga dan sekolah anak.

Pemasaran produk PS cukup mudah karena dengan adanya pengepul di desa, pedagang kaki lima/kaki tiga yang melintasi kampung-kampung setiap hari dan juga dapat dijual di kecamatan atau kabupaten. Dengan adanya pengepul di desa, pedagang kaki lima/kaki tiga, maka masyarakat cenderung menjual hasil produk di desa tempat mereka tinggal.

Ada juga yang menjual hasil produk di kecamatan dan kabupaten, tetapi tidak sebanyak masyarakat yang menjual hasil produknya di desa. Namun belum ada yang mengekspor hasil produk ke luar negeri. Biasanya hasil produk yang dijual di kecamatan atau kabupaten adalah produk yang nilai jualnya tinggi dan dalam jumlah yang banyak, seperti pala, cengkeh dan vanili. Komoditi yang dijual ke toke keturunan Tionghoa (Cina) harganya lebih baik, ketimbang pengepul dan pedagang lokal. Namun akses yang jauh dan desakan kebutuhan harian memaksa masyarakat menjual hasil produk di desa dengan selisih harga antara Rp.1000-2000 per kilogram. Jika akses jalan dan pasar dapat difasilitasi, maka harga-harga komoditas tersebut di atas akan meningkat dan memberi tambahan pendapatan bagi masyarakat. Informasi terkait jenis komoditi, olahan pasca panen, dan pemasaran dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Paska Panen dan Pemasaran Jenis Komoditi PS di Kabupaten Sikka

NO	Jenis Komoditi	Pasca Panen			Dijual Ke			Lokasi Pemasaran		
		Bahan mentah	Setengah jadi	Bahan jadi	Pedagang Besar	Pedagang Kaki lima	Pengepul	Desa	Kec	Kab
1	KEMIRI	✓	✓		✓		✓	✓		
2	PALA		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	KELAPA	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ALPUKAT	✓				✓		✓		
5	MERICA		✓			✓	✓	✓		
6	ASAM	✓				✓	✓	✓		
7	KOPI		✓			✓	✓	✓		
8	CENGKEH	✓	✓		✓		✓			✓
9	VANILI	✓	✓		✓		✓	✓		✓
10	METE	✓			✓	✓	✓	✓	✓	

F. Analisis Mata Pencanharian

Berdasarkan sumber-sumber pendapatan rumah tangga KPS di Kabupaten Sikka, maka sumber pendapatan utama untuk komoditas yang dikonsumsi sendiri adalah tanaman pangan, diikuti pendapatan dari buah-buahan dan bambu. Sumber-sumber pendapatan ini perlu ditingkatkan karena menjadi sumber ketahanan pangan bagi petani KPS. Sedangkan yang menjadi sumber pendapatan utama untuk komoditas dijual bagi petani KPS adalah tanaman tahunan seperti kemiri, jambu mete, cengkeh, kopi, kakao/coklat, petai dan alpukat. Jenis komoditas ini umumnya tanaman tua dan berada di areal-areal KPS yang aksesnya terbatas, selain itu akses pasar masih dikuasai oleh tengkulak dan pedagang besar dimana terdapat selisih harga sampai Rp.2.000-3.000 per kg khususnya kemiri dan jambu mete (Yulius 2023, pers com). Untuk itu, perlu petani KPS mengorganisir dan mengumpulkan hasil komoditas dan dijual langsung ke pedagang besar sehingga harganya lebih tinggi.

Perhutanan Sosial di Kabupaten Sikka, selain memberikan dukungan terhadap sumber pangan dan ekonomi, tetapi Perhutanan Sosial juga memberikan benefit yang tidak dapat dihitung secara angka-angka yaitu:

- Sumber protein, dimana masyarakat dapat memburu babi, burung, monyet, dan juga menangkap ikan di sungai-sungai.
- Sumber air, karena Kabupaten Sikka terkategori wilayah yang sulit air, maka dengan adanya perhutanan sosial dan penanaman jenis tanaman tahunan dan hutan kayu, maka penduduk dapat menikmati air yang dialirkan melalui pipa-pipa atau dari embung yang ada. Namun masih ada KPS-KPS yang sulit mendapatkan air karena lokasi KPS jauh di atas dan kondisi terdegradasi. Masih diperlukan penanaman dan pembuatan embung-embung untuk air keperluan tanaman dan juga rumah tangga.
- Sumber papan/rumah, di mana areal PS tempat mengambil bambu untuk dinding rumah, atap, kayu-kayu sebagai tiang dan lantai/dinding rumah.
- Penyeimbang iklim mikro, karena Kabupaten Sikka yang cenderung curah hujan sedikit dan cuaca panas, maka keberadaan PS sangat penting dalam menyeimbang iklim mikro.

Untuk mendapatkan dan memberikan strategi peningkatan pendapatan bagi petani KPS di Kabupaten Sikka, maka diperlukan analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman atau di kenal dengan istilah *Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats* (SWOT) sebagai berikut (Gambar 19):

<i>Internal</i> <i>Eksternal</i>	OPPORTUNITIES 1. Perpres 28 tahun 2023 tentang percepatan pengelolaan PS yang melibatkan 12 Kementerian dan Lembaga terkait ada peluang peningkatan ketrampilan dalam budidaya, pengolahan produk dan pasar 2. Ada peluang pasar domestic dan internasional 3. Pasar digital tersedia (tiktok, shopee, Tokopedia, dll) 4. Dukungan bibit , training dari Pemerintah dan FP V	THREATS 1. Kekeringan tanaman 2. Kebakaran hutan dan lahan 3. Produksi menurun dan gagal panen 4. Sulit mengeluarkan hasil produksi karena akses tidak ada 5. Hama tanaman coklat, tanaman tahunan dan pangan
	STRENGTHS 1. Sudah mendapat akses legal 2. Memiliki komoditas tahunan dan tanaman pangan 3. Ketrampilan dalam budidaya tanaman pangan dan tahunan 4. <i>Local Knowledge</i> pengelolaan hutan dan lahan 5. Memiliki KPS/KUPS dan pendamping PS per KPS 6. Areal PS akan dilindungi karena sumber air masyarakat	Strategi untuk memanfaatkan Peluang melalui Kekuatan KPS di Sikka 1. Meningkatkan produksi tanaman dengan mendapatkan bibit unggul 2. Memperluas Garapan karena masih tersedia lahan 3. Meningkatkan nilai tambah bagi komoditas dijual 4. Menciptakan pasar lokal, kabupaten dan global dengan digital marketing Strategi untuk mencegah Ancaman melalui Kekuatan KPS di Sikka 1. Menanami areal terbuka dengan tanaman <i>midle crop</i> dan <i>longterm crop</i> 2. Membuka akses transportasi produksi 3. Menciptakan embung-embung air di areal PS 4. Memelihara mata air

WEAKNESS	Strategi memanfaatkan Peluang untuk meminimalkan Kelemahan	Strategi untuk meminimalkan potensi bahaya terletak pada sektor dimana Kelemahan bertemu dengan Ancaman
1. Ingin cepat uang kas dan terjerat sistem ijon. 2. Akses jalan produksi sangat minim dan areal KPS sangat jauh dari permukiman. 3. Akses pasar terbatas 4. Tata kelola Kawasan, kelembagaan dan usaha masih minim	1. Meretas sistem ijon 2. Menciptakan KUPS/Koperasi menjadi simpan pinjam 3. Membuka akses pasar 4. Meningkatkan pemahaman dan ketrampilan dalam tata kelola kelembagaan, Kawasan dan ekonomi	1. Menggunakan pengetahuan lokal untuk melindungi dan menanami secara bersama areal rawan terbakar 2. Membuka akses transportasi produksi bersama KPS dan mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah 3. Peningkatan ketrampilan budidaya tanaman termasuk sistem tetes air, dan pengendalian hama

Gambar 19. Analisis SWOT KPS di Kabupaten Sikka

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka strategi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendukung peningkatan tutupan hutan dengan kekuatan dan kesempatan yang dimiliki KPS yang sejalan dengan pengelolaan hutan berkelanjutan adalah:

- Untuk meningkatkan **pendapatan yang dikonsumsi** sendiri maka diperlukan beberapa strategi yaitu meningkatkan pendapatan dari *cash/short crops* dengan cara memberikan bibit unggul untuk jenis tanaman pangan unggulan masing-masing KPS, peningkatan ketrampilan budidaya termasuk sistem tetes air, pengendalian hama.
- Untuk menambah **pendapatan dalam jangka menengah**, maka memperkaya tanaman *cash crop* dengan ditanami minimal 100 batang tanaman *middle crop* (coklat, vanili, pisang atau jenis komoditas lainnya). Selain itu, memperluas wilayah garapan karena masih ada tersedia areal PS yang dapat digarap dan ditanami dengan komoditas kombinasi penanaman *cash crop* dan *middle crop*. Untuk penanaman tentunya disesuaikan dengan musim hujan dan juga menggunakan sistem tetes atau pipa air.
- Untuk meningkatkan pendapatan dari **komoditas yang akan dijual** ke pasar baik *tanaman cash crop*, *middle crop* dan *long term crop* (tahunan) diperlukan akses pasar. Pengolahan paska panen untuk pasar *offline* (pasar yang memfasilitasi hasil PS) dan digital (*market place*) sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah produk seperti jambu mete, kemiri, pala, asam, dll. Selain itu memberikan bibit unggul untuk komoditas primadona akan sangat diperlukan untuk peningkatan produksi dalam jangka panjang.
- Untuk peningkatan pendapatan petani KPS dari kedua jenis tanaman tersebut sangat diperlukan **akses transportasi, meretas sistem ijon, dan juga menciptakan pasar** di kecamatan, kabupaten dan provinsi sebagai unggulan produk petani PS. Di samping itu menyiapkan *digital marketing*, sehingga dapat diakses dari dalam dan luar negeri. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka KUPS di 24 KPS ini bisa naik kelas ke platinum.
- Pengurus KPS dan pendamping PS beserta dukungan BPSKL dapat menghubungi 11 Kementerian lainnya yang saat ini masuk dalam Pokja Nasional, Pokja Provinsi dan Pokja Daerah Percepatan Perhutanan Sosial. Saat ini anggaran desa melalui Kemendagri, Kemendes dapat berkontribusi bagi pengembangan usaha dan pendampingan Perhutanan Sosial yang sebelumnya tidak bisa sehubungan dengan keterbatasan aspek legal. Dengan Perpres 28 tahun 2023, maka 12 Kementerian dan Lembaga sudah dapat mendukung percepatan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Sedangkan Strategi untuk mencegah Ancaman melalui Kekuatan KPS di Sikka adalah

1. Menanami areal terbuka dengan tanaman *midle crop* dan *longterm crop* sehingga areal-areal tidak mudah terbakar dan sebagai sumber air.
2. Membuka akses transportasi produksi sehingga produksi PS dapat dikeluarkan dengan cepat dan harga lebih baik.
3. Menciptakan embung-embung air di areal PS sehingga tersedia air untuk kebutuhan penyiraman tanaman maupun untuk dikonsumsi.
4. Memelihara mata air dengan tetap mempertahankan hutan-hutan dan tanaman tahunan.

Kemudian strategi untuk meminimalkan potensi bahaya terletak pada sektor di mana Kelemahan KPS bertemu dengan Ancaman

1. Menggunakan pengetahuan lokal untuk melindungi dan menanami secara bersama areal rawan terbakar dengan tanaman *middle crop* dan *long term crop*.
2. Membuka akses transportasi produksi bersama KPS dan mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah
3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengendalian hama bagi komoditas coklat, dan jenis tanaman lainnya.
4. Peningkatan ketrampilan budidaya tanaman termasuk sistem tetes air, dan pengendalian hama

G. Persepsi Masyarakat terkait Perhutanan Sosial

Dengan diberikannya hak kelola oleh pemerintah melalui Perhutanan Sosial khususnya HKm di Kabupaten Sikka, maka persepsi masyarakat terhadap Perhutanan Sosial dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- Merasa senang karena diberikan hak dan akses legal dalam mengelola hutan dengan berbagai pendampingan.
- Memiliki semangat lagi dalam menanam tanaman pangan, buah-buahan, dan juga tanaman lainnya dan akan mendukung ekonomi keluarga.
- Merasa terbantu karena ada lahan pertanian baru yang bisa ditanam dan dapat memberikan sumber pendapatan keluarga.
- Dengan adanya PS ada kepastian dan juga perlindungan hutan sebagai sumber air
- Anggota perempuan dalam KPS juga terlibat dalam pengelolaan lahan di kawasan hutan serta ada program Pemberdayaan kaum perempuan dalam KPS.
- Keberadaan areal PS membantu memberikan kepastian anggota /masyarakat dalam hal pengelolaan hutan lebih baik untuk masa depan anggota dan anak cucu.
- Keberadaan areal PS anggota / masyarakat KPS dapat memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan secara legal dan mudah menentukan jenis tanaman yang cocok secara lebih terstruktur dan pendapatan dapat lebih baik
- Adanya PS dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sehingga hutan terjaga dan masyarakat menikmatinya.
- PS mengembalikan tanah nenek moyang kami sehingga akhirnya dapat kami kelola kembali.

Masyarakat juga memiliki perbedaan persepsi terhadap areal hutan yang sebelum dan setelah dapat izin/persetujuan PS. Terdapat variasi persepsi dimana secara umum dengan adanya PS maka dari sisi kepastian lahan, tata kelola lahan, tata kelola kelembagaan dan tata kelola ekonomi meningkat. Detail perbedaan persepsi hutan sebelum jadi areal PS dan setelah menjadi areal PS dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Perbedaan Persepsi dan Pengelolaan Areal PS Sebelum di berikan Izin dan Setelahnya

Isu	Areal hutan Sebelum PS	Sesudah mendapatkan izin PS
Kelola lahan	Takut dan ragu-ragu dalam pengelolaan hutan	Terarah dalam pengelolaan kawasan
	Tidak adanya pendampingan khusus dalam kelola kawasan, bekerja sendiri dalam budidaya tanaman	Diberi kesempatan mengelola kawasan sesuai aturan berlaku, ada pendamping
	Takut masuk ke kawasan hutan, ada Polhut	Merasa nyaman dalam mengelola kawasan
	Banyak perambahan dan penebangan liar	Berkurang kegiatan illegal
	Tidak ada rencana bersama, tidak ada arahan	Ada RKPS & Rencana kerja tahunan
	Jenis tanaman hanya yang lokal	Jenis tanaman variatif bernilai ekonomi
	Hutan berkurang, longsor, air susah	Hutan dilindungi dengan adanya program FP V
Ekonomi	Tidak ada dukungan modal	Ada dukungan modal dari FP V
	Hidup susah karena ada pelarangan garap lahan	Mendapatkan berbagai sumber pendapatan
	Tidak adanya pelatihan dalam rangka pemberdayaan	Sudah banyak pelatihan dari pemerintah/FP V
	Susah untuk mencari pangan karena hutan tidak bisa dikelola	Tersedia lahan untuk menanam sumber pangan, juga sumber protein
	Sangat terbatas hasil hutan karena takut	Tanaman pangan, tahunan dan jangka panjang
Konflik	Konflik perebutan lahan garapan	Konflik berkurang
	Adanya pelarangan masuk kawasan hutan, padahal kawasan tersebut dari orang tua kami	Sudah mendapat izin 35 tahun. Sudah ada manajemen kelola area melalui KPS
	Takut, cemas, bekerja seperti pencuri	Nyaman dan lebih fokus
Gender	Keterlibatan perempuan kecil	Keterlibatan perempuan diprioritaskan
Kelembagaan	Tidak ada yang memberikan pendampingan dan pengembangan organisasi kelompok	Sudah ada pendamping dari tenaga lokal, ada KPS, ada KUPS

H. Kebutuhan Pelatihan dan Masukan terhadap FP V

Kebutuhan training tematik dan yang dibutuhkan oleh anggota KPS di Kabupaten Sikka adalah budidaya tanaman yang lebih modern dan pengolahan produk paska panen dan pemasaran. Untuk detail ketrampilan yang dimiliki saat ini dan kebutuhan ketrampilan kedepan dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Tematik dan Kebutuhan Ketrampilan Anggota KPS dalam Peningkatan Pendapatan

Tematik	Ketrampilan dimilik saat ini	Ketrampilan dibutuhkan
Budidaya Tanaman	Pengelolaan kawasan hutan dan lahan secara tradisional	Teknik pertanian yang baik/modern yang lebih produktif
	Pembibitan (memilih, memelihara, menyediakan bibit dengan pola lama, dll)	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tentang pembibitan, termasuk persiapan benih, okulasi, stek, sambung, dll
	Budidaya tanaman bervariasi (tumpang sari, HHBK, tanaman komoditas, dan tidak teratur)	Pengembangan pengetahuan dalam budidaya tanaman pertanian modern, termasuk pemilihan komoditi

	Pengolahan pupuk organik	Pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida organik
	Menanam tanaman komoditi yang turun-temurun di kawasan dan bernilai ekonomi untuk peningkatan pendapatan (kemiri, kelapa pala, kakao dan vanili)	Peningkatan kapasitas (pengetahuan, ketrampilan, dll) tentang pengolahan lahan & pemanfaatan hutan sehingga memiliki nilai ekonomi tinggi
	Reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan (penanaman, konservasi tanah dengan terasering, dll).	Pelatihan tentang cara melakukan perlindungan tanaman, terasering, dan praktik pembuatan irigasi tetes.
		Peningkatan pengetahuan tentang pengolahan PS (workshop, pelatihan, studi banding, dll)
		Pelatihan pengendalian hama coklat, dan jenis-jenis tanaman lainnya
Pengelolaan Produk	Pengolahan mete (kacang, anggur, abon, dll),	Pelatihan keterampilan mengolah hasil hutan khusus bagi ibu-ibu untuk jenis mete, anggur, abon dan komoditas lainnya.
	Membuat anyam-anyaman dari bahan lokal (bambu, daun lontar, dll)	Ketrampilan pembuatan anyaman yang modern dan laku di pasar
	Pembuatan bumbu pecel dari kacang tanah	Pengembangan usaha (kerajinan bambu, pengolahan minyak kemiri, pembuatan kacang telur, kripik pisang dan singkong, madu hutan, asam manis, dll)
	Pengolahan kemiri (minyak kemiri)	Pelatihan membuat minyak kelapa murni (VCO)
	Ketrampilan meubeler dari bambu, kayu, dll	Peningkatan ketrampilan meubeler dari bambu, kayu, rotan, dll
	Pengolahan makanan (keripik, kue, perkedel, bakso, dll)	Pelatihan pasca panen semua komoditi (mete, kemiri, ubi-ubian dan lain-lain)
	Pengolahan paska panen (penjemuran dan pemasaran)	Pengetahuan dan keterampilan pengolahan pangan lokal
	Pengolahan madu (pengirisan, penyaringan, pengemasan dll) dan produk turunannya (sabun, dll)	Evaporasi dan kemasan produk madu yang menarik, SNI dan menarik. Pelatihan pembuatan pakan ternak dengan menggunakan buah mete
Akses produksi	Umumnya dari tempat kediaman petani ke areal KPS hanya jalan setapak	Memfasilitasi pembukaan jalan akses produksi ke pemerintah daerah atau jika memungkinkan support dari FP V
	Pembuatan arak tradisional	Pelatihan pengolahan arak yang dikemas secara modern dan menarik
Pemasaran	Pengetahuan tentang pemasaran produk dari penjualan kemiri dan mete	Pelatihan pengembangan usaha dan strategi pemasaran produk hasil hutan yg lebih baik
		Keterampilan manajemen bisnis dan mengelola produk, misal pala menjadi manisan
		Pelatihan menggunakan media sosial dan digital marketing ke petani KPS

Kelembagaan	Ketrampilan dalam mengorganisir banyak orang	Peningkatan kualitas SDM (pelatihan, magang, dll)
	Identifikasi potensi kawasan di area PS	Pelatihan pembuatan proposal dan mencari modal usaha
	Membuat RKPS dan RKT	Pelatihan manajemen kelompok (tata kelola kelembagaan)
		Pelatihan manajemen keuangan keluarga/rumah tangga

I. Masukan Terhadap FP V.

Ada banyak masukan yang diberikan responden untuk FP V, salah satunya agar program FP V dapat dilanjutkan tidak hanya 4 tahun ke depan. Secara umum masukan terhadap FP V adalah:

- FP V menjembatani pemerintah daerah dan kementerian dan lembaga terkait untuk pembukaan akses jalan, pengembangan usaha melalui dasar hukum dan kebijakan Perpres 28 tahun 2023 tentang percepatan pengelolaan PS.
- FP V sebaiknya dapat membantu menyiapkan pasar produk bagi para kelompok HKM
- Memberikan bibit produk unggul ke anggota KPS sehingga produksi dan kualitas baik.
- Menjembatani Kerjasama antara KPS dengan pihak swasta sehingga dapat meningkatkan hubungan baik dan harga produk juga meningkat.
- Meningkatkan ketrampilan dan menjembatani KPS dengan Lembaga donor, bantuan pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pendanaan pengembangan dan pengelolaan produk perhutanan sosial.

Perhutanan sosial di Sanggau berada di areal kerja dua KPH yaitu KPH Sanggau Barat di Kota Tayan dan KPH Sanggau Timur di Kota Sanggau dengan luasan total 17.109 Ha. Secara umum pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial di Sanggau masih kental nuansa adatnya, walaupun secara skema sebagian besar menggunakan skema HKm (11 HKm), dan sebagian lagi menggunakan skema HTR (3 HTR). Nuansa adat ditemukan dalam bentuk model-model pengelolaan dan zonasi adat yang berada baik di dalam areal PS maupun di luarnya.

Secara adat, masyarakat di Sanggau membagi area hutannya menjadi dua zona, yaitu zona rimba (yang merupakan hutan yang dilindungi secara adat) dan zona pemanfaatan dalam bentuk Parua (tembawang muda) maupun Tembawang. Di luar area hutan mereka mengenal istilah ladang yang merupakan tempat bercocok tanaman semi intensif terutama untuk komoditas padi ladang dan sayur mayur. Parua dan Tembawang merupakan area bekas pondok ladang, yang sekarang berbentuk hutan sekunder, ditanami berbagai tumbuhan terutama karet, buah-buahan (durian, duku, laik, dll) serta tengkawang. Di seluruh areal PS ditemukan pola serupa, di mana terjadi penurunan ketergantungan masyarakat secara ekonomi terhadap komoditas dari Tembawang dan Rimba, dan digantikan dengan komoditas baru yang sedang membaik yaitu kelapa sawit.

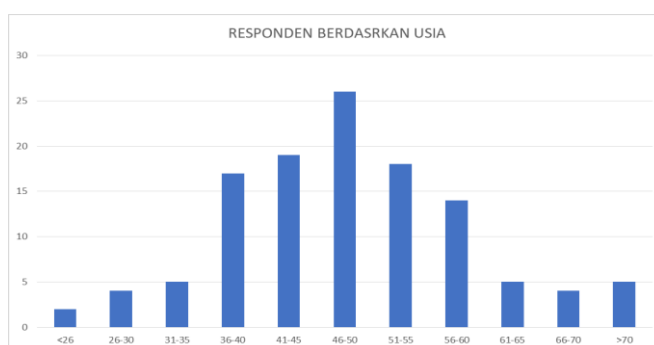
Tidak diragukan lagi apabila masyarakat pengelola PS mempunyai pendapatan dominan dari karet dan sawit. Getah karet diproduksi baik di area hutan maupun APL disekitar hutan, sementara kelapa sawit ditanam kebanyakan dari area APL di sekitar hutan. Namun ada banyak spot-spot lokasi tanaman kelapa sawit masuk ke dalam area hutan. Ini mengindikasikan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit merupakan ancaman serius untuk keberlanjutan hutan di Kabupaten Sanggau.

Di satu sisi tanaman karet kebanyakan adalah tanaman tua hasil peremajaan proyek sekitar 30 tahun yang lalu dengan produktivitas yang rendah dengan kecenderungan jumlah populasi tanaman menurun. Disisi lain tanaman sawit secara sukarela dikembangkan oleh masyarakat (dan seringkali menggantikan tanaman karet yang sudah tua) dikarenakan hasil pendapatannya lebih banyak dan kerjanya lebih sedikit sehingga tren-nya cenderung meningkat¹. Tren meningkatnya populasi tanaman sawit hingga merambah ke Kawasan hutan merupakan ancaman serius yang harus ditangani oleh program FP V. Selain melalui penegakan aturan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menyediakan sumber pendapatan alternatif yang sesuai dengan konteks dan kultur masyarakat di Kabupaten Sanggau.

4.2.2. Studi Baseline Pendapatan Rumah Tangga Anggota KPS di Kabupaten Sanggau

A. Identitas dan Rumah Tangga Responden

Sebanyak 119 responden dari 17 anggota KPS yang menjadi sampel yang disurvei di Kabupaten Sanggau. Mayoritas responden atau 88 % (105 responden) adalah usia produktif antara 26-60 tahun sedangkan yang telah berumur 61 tahun ke atas atau usia tidak produktif hanya 12 % (14 orang). Responden di Kabupaten Sanggau berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 10 dan gambar 21.



Gambar 21. Responden Berdasarkan Usia

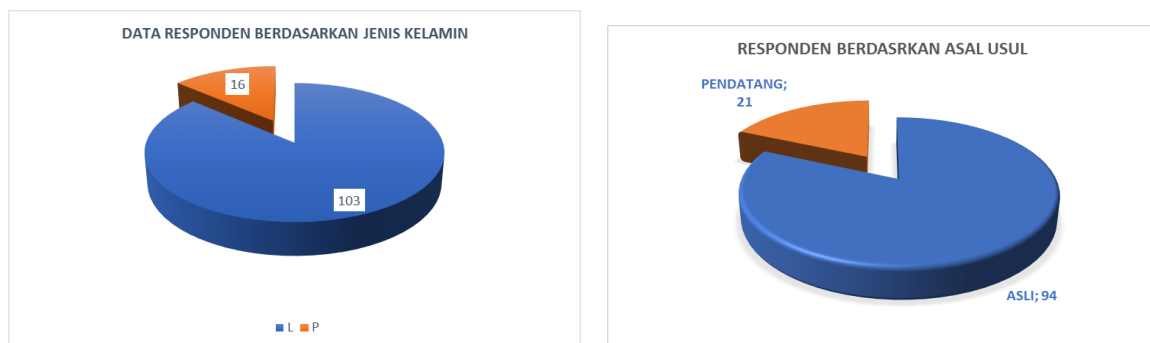
¹ Salah satu KPS bahkan 95% arealnya ditanami oleh komoditas sawit (HKM Kopbun Meket Bisamah).

Tabel 10. Kelompok Umur responden berdasarkan umur di Kabupaten Sanggau.

No	Kelompok Umur	Jumlah responden	Keterangan
1	< 26 tahun	2	
2	26-30 tahun	4	
3	31-35 tahun	5	
4	36-40 tahun	17	
5	41-45 tahun	19	responden terbanyak 2
6	46-50 tahun	26	responden terbanyak 1
7	51-55 tahun	18	responden terbanyak 3
8	56-60 tahun	14	
9	61-65 tahun	5	
10	66-70 tahun	4	
11	71 tahun ke atas	5	
	Total	119	

Berdasarkan gambar 20 dan tabel 11 di atas, maka usia produktif mendominasi atau 88%, sehingga tidak ada kendala dalam memproduksi komoditas PS. Dominasi usia produktif dalam anggota KPS menjadi peluang besar dalam KPS untuk meningkatkan nilai produktifitas maupun nilai pendapatan per rumah tangga KPS.

Sedangkan responden dilihat berdasarkan aspek gender, sebanyak 88 % responden adalah laki-laki dan 22 % adalah perempuan (gambar 21). Keterlibatan perempuan dalam survey ini dibawah 30 % namun sudah merepresentasi sehubungan dengan budaya lokal dan sistem agama cenderung pada patrilokal.

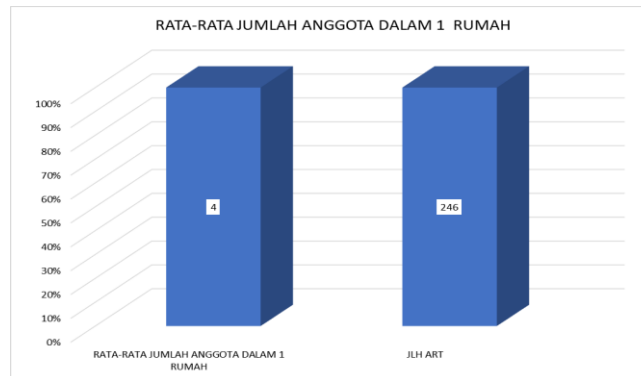


Gambar 22. Responden berdasarkan Jenis Kelamin Asal usul

Jika dilihat dari asal-usul responden, 94 responden atau 80 % merupakan penduduk asli dan 21 responden atau 20 % merupakan pendatang (Gambar 22). Kategori asli disini berdasarkan kategori dari

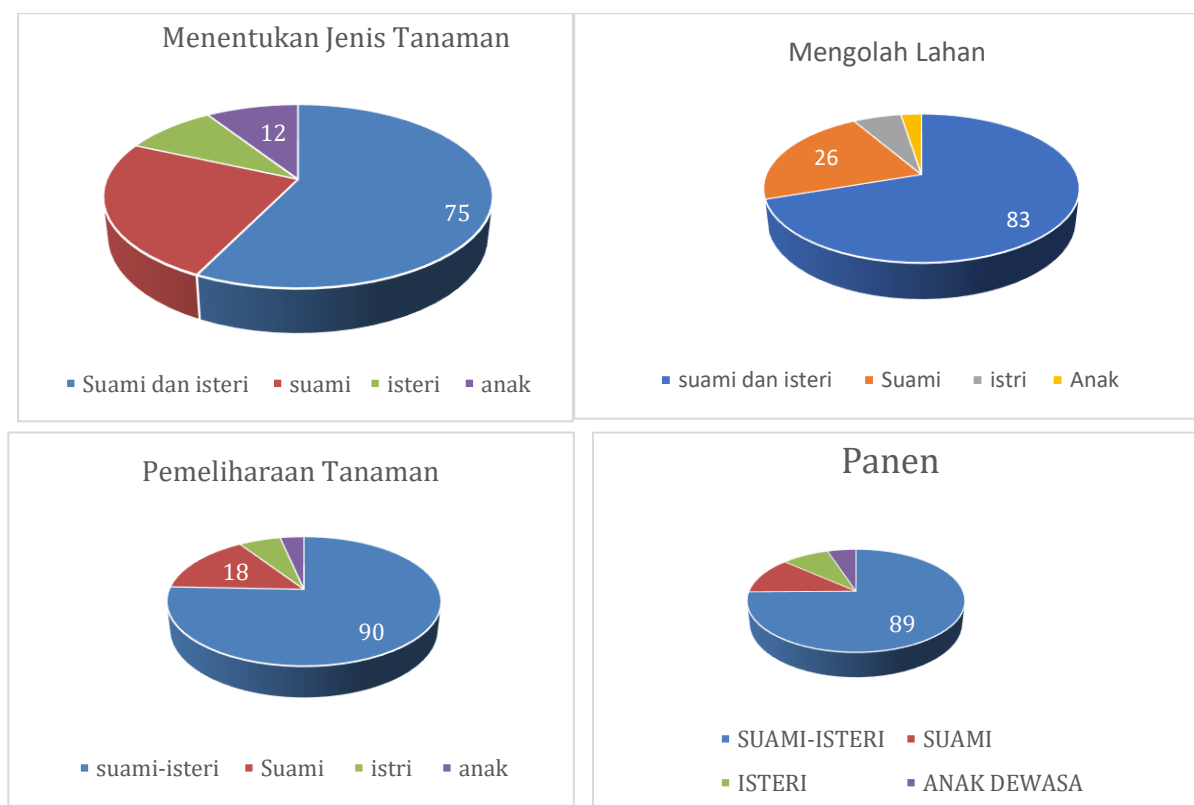
masyarakat, di mana masyarakat membedakan asli dan pendatang berdasarkan sub suku Dayak. Misalnya, jika Dayak nya berbeda dengan Dayak yang ada di Desa tersebut, maka sudah dikategorikan pendatang. Dalam hal ini peneliti mengkategorikannya sebagai pendatang berdasarkan kategori masyarakat tersebut.

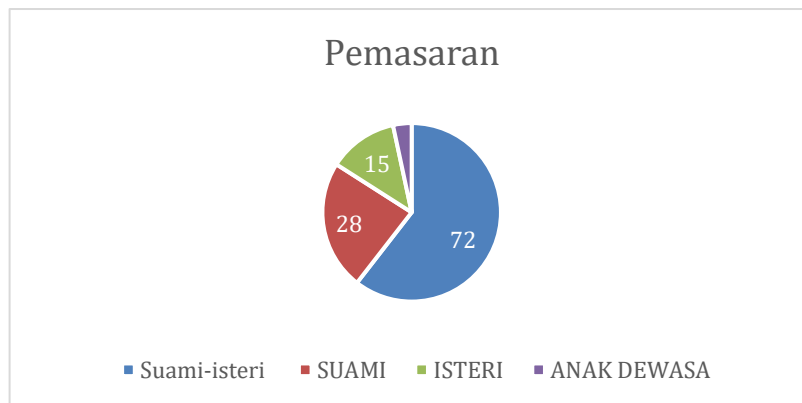
Dari 119 responden yang diwawancarai, jumlah anggota keluarga sebanyak 246 jiwa, sehingga rata-rata jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga adalah 4 orang (Gambar 23).



Gambar 23. Rata-rata jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga

Dalam usaha agroforestri di areal Perhutanan Sosial, suami dan isteri secara bersama memiliki peran dominan mulai dari penentuan jenis tanaman hingga panen. Penentuan jenis tanaman, mengolah lahan hingga panen memang cukup unik di Kabupaten Sanggau dimana tidak ada dominasi mayoritas oleh laki-laki. Hal ini terlihat dari hasil survey, dimana untuk penentuan jenis tanaman peran bersama suami-isteri 64%, untuk pengolahan lahan peran suami 69%, dalam pemeliharaan tanaman peran suami adalah 76%, dan dalam panen tanaman peran suami 74%. Hanya dalam pemasaran, peran suami menurun menjadi 72%, namun masih dominan. Gambar peran dominan anggota keluarga dalam penentuan jenis tanaman, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman dan panen dapat dilihat pada gambar 24.

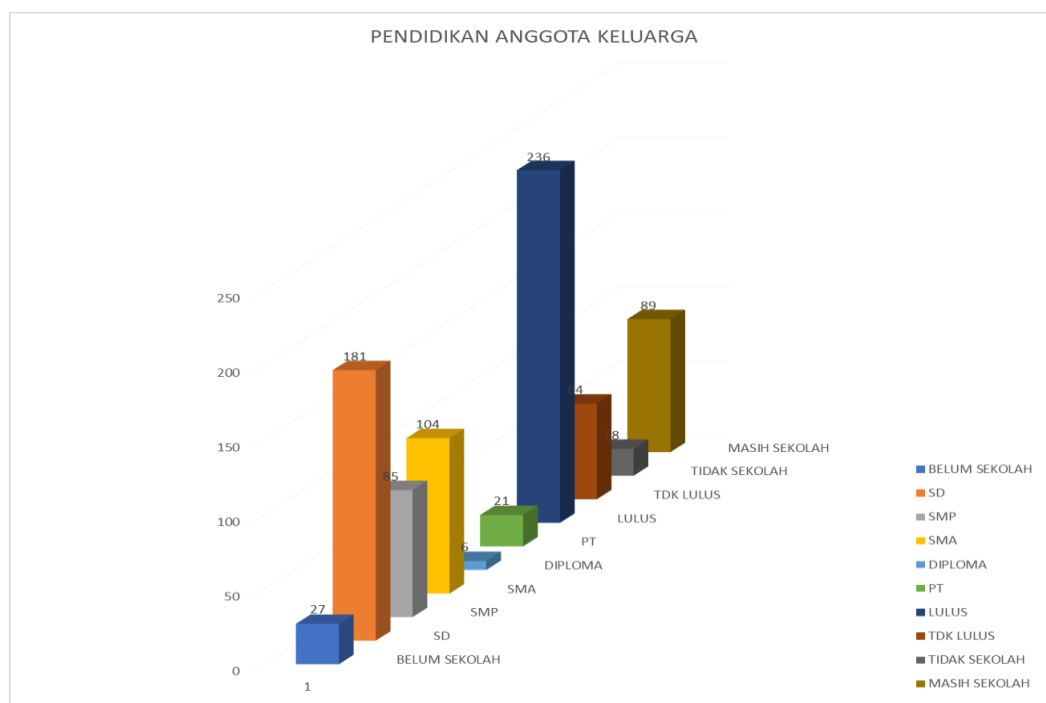




Gambar 24. Peran anggota keluarga dalam penentuan budidaya tanaman dan pemasaran

B. Pendidikan

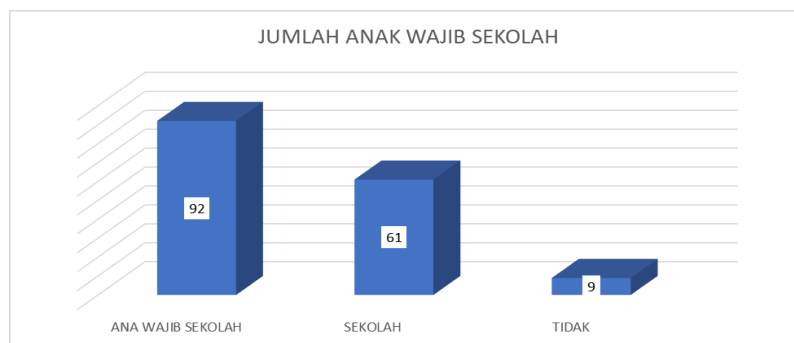
Dari total 119 responden terdapat 514 jiwa anggota keluarga yang artinya, rata-rata satu rumah tinggal sebanyak 5 keluarga. Dari jumlah 514 anggota keluarga, maka sebanyak 117 orang tidak tamat SD, 181 orang tamat SD, 85 orang tamat SMP, 104 orang tamat SMA dan 21 orang tamat Perguruan Tinggi (tabel 11 dan gambar 25). Artinya ada 58 % anggota KPS di Sanggau paling tinggi pendidikannya amat SD, sehingga sumberdaya manusia yang diukur dari tingkat pendidikan sangat rendah.



Gambar 25. Pendidikan Anggota Keluarga Responden

Tabel 11. Pendidikan Anggota Keluarga KPS di Kabupaten Sanggau

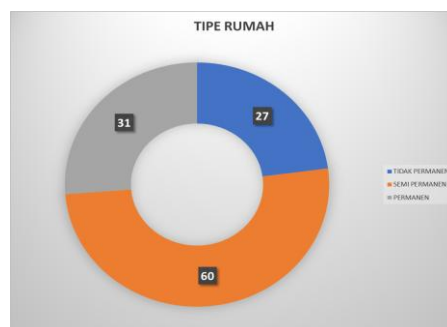
No	Jenjang Pendidikan	Jumlah orang	Prosentase
1	Tidak Tamat SD	117	23%
2	SD	181	35%
3	SMP	85	17 %
4	SMA	104	21%
5	Perguruan Tinggi	21	4 %
	Jumlah	514	100%



Gambar 26. Jumlah anak wajib sekolah Kab. Sanggau

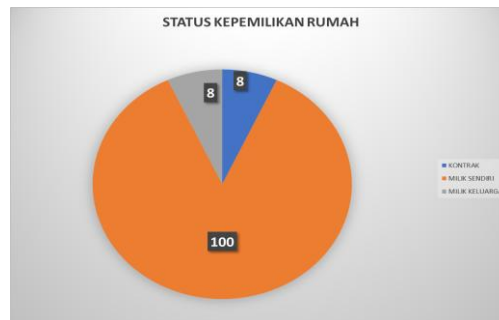
C. Infrastruktur Dasar Responden

Mayoritas tipe rumah responden (atau 50 % /60 jiwa) adalah semi permanen (lantai semen, dinding papan atau batu), 26 % (31 responden) memiliki rumah permanen (lantai keramik dan dinding batu, atap seng atau genteng) dan diikuti 24 % (27 responden) yang memiliki rumah yang kategori tidak permanen (lantai tanah, dinding papan/tepas/bambu, rumah panggung), lihat pada gambar 27. Dari aspek kondisi rumah, maka ada 74 % anggota KPS di Kabupaten Sanggau yang memiliki rumah sederhana dan semi permanen. Dari kondisi kepemilikan rumah, maka mayoritas anggota KPS terkategori miskin.



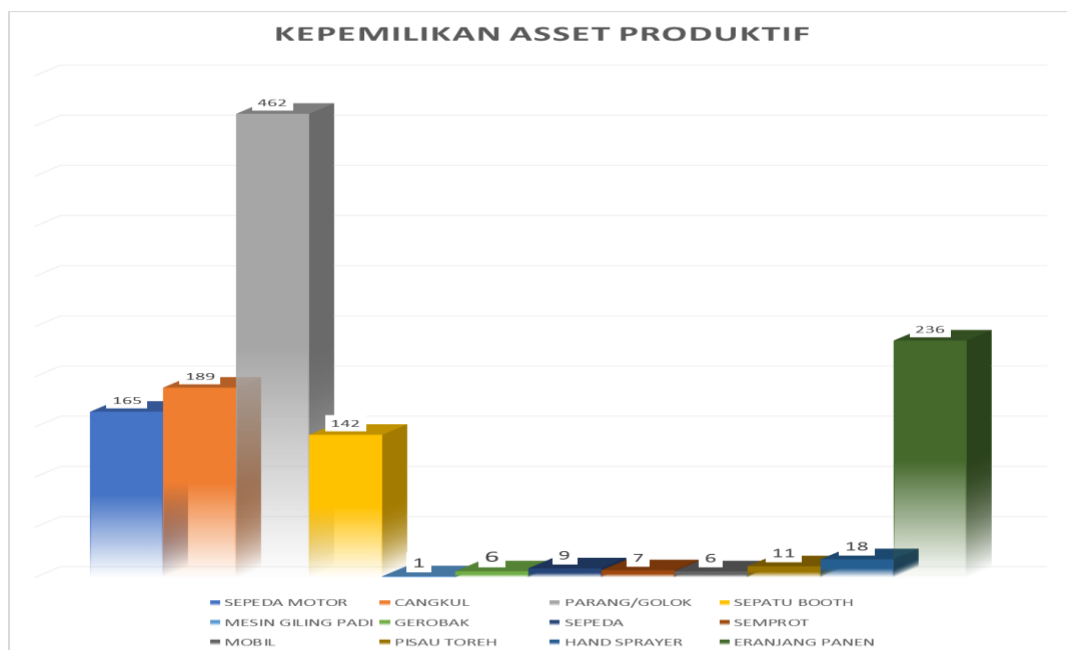
Gambar 27. Tipe Rumah Responden

Sedangkan kepemilikan rumah adalah mayoritas atau 84% (100 responden) menjawab milik sendiri, 7 % milik keluarga, dan 7% rumah masih mengontrak, serta 2 % (tiga responden) tidak menjawab (gambar 28). Jika dilihat dari tipe rumah responden dan juga kepemilikan rumahnya, maka ada 74 % petani KPS di Kabupaten Sanggau masih memiliki rumah sederhana/tidak permanen dan semi permanen, sehingga petani KPS ini dapat dikategorikan miskin dan mayoritas memiliki rumah kurang layak.



Gambar 28. Status Kepemilikan Rumah

Untuk menunjang kegiatan wanatani atau agroforestri dan peningkatan pendapatan rumah tangga di areal PS Kabupaten Sanggau, para anggota KPS memiliki aset sebagai berikut (gambar 29). Aset ini sangat penting dalam menghasilkan produk dari areal PS. Asset tertinggi yang dimiliki adalah gerobak angkut barang dan sepeda. Kemudian diikuti oleh cangkul, sepeda motor dan sepatu booth.

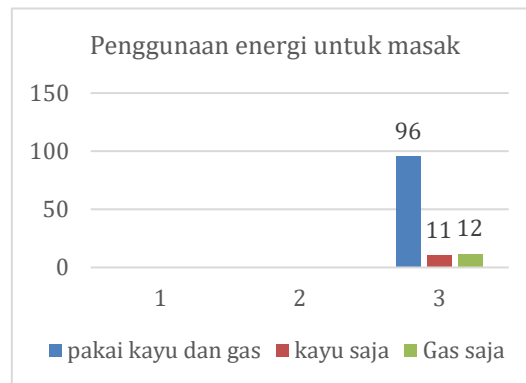


Gambar 29. Kepemilikan aset produktif

Sedangkan mayoritas atau 82 % responden/ kepala rumah tangga memiliki akses listrik, dan 28% keluarga tidak memiliki akses listrik (Gambar 30). Energi yang digunakan untuk memasak yaitu kayu bakar 9% atau 11 responden, gas aja 10 % atau 12 responden, dan memakai kombinasi kayu dan gas 81 % atau 96 responden (Gambar 31).

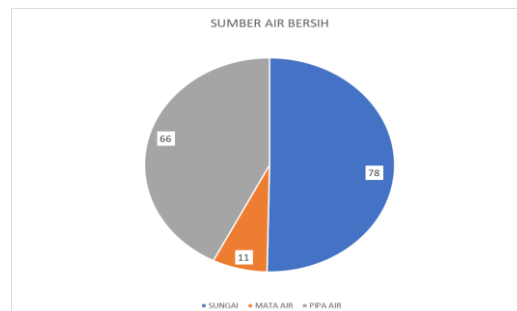


Gambar 30. Rumah Tangga yang memiliki akses listrik



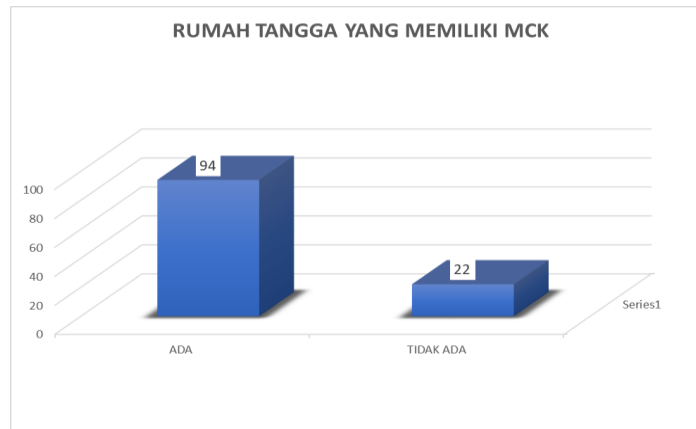
Gambar 31. Penggunaan bahan bakar

Semua responden memiliki akses air bersih yang bersumber dari sungai 66 % , memiliki akses mata air 10 % dan memiliki akses air ledeng/air pipa sebanyak 24 % (Gambar 32).



Gambar 32. Sumber air bersih

Sedangkan yang memiliki akses ke Mandi Cuci Kakus (MCK) sebanyak 79% (94 responden) dan yang tidak memiliki akses Mandi Cuci Kakus (MCK) sebanyak 21%, lihat gambar 33. Rata-rata anggota KPS mandi dan membersihkan pakaian ke sungai.



Gambar 33. Rumah tangga yang memiliki MCK

Dari data kepemilikan infrastruktur ini, secara umum yang dimiliki adalah peralatan dasar dan juga alat-alat produksi dasar. Sehingga dapat disimpulkan anggota KPS di kabupaten Sanggau terkategori miskin dan perlu disupport dengan peralatan yang lebih baik dalam menghasilkan produksi di areal PS.

D. Profil Pendapatan Rumah Tangga dari Hasil Hutan Bukan Kayu di areal PS

Anggota KPS masyarakat Sanggau pada umumnya senang dengan pemberian izin/persetujuan perhutanan sosial ini. Hal ini dikarenakan, areal PS tersebut menjadi sumber pangan keluarga, penopang utama ekonomi rumah tangga anggota KPS, dan tempat mencari kebutuhan adat dan ritual. Menjadi sumber makanan keluarga karena dari areal PS menghasilkan padi, jagung, ubi, umbut rotan, rebung, sayuran, serta hewan sebagai sumber protein seperti dari tupai, monyet, ayam hutan dan ikan di sungai. Selain itu, areal PS juga merupakan areal perladangan oleh nenek moyang mereka sehingga masih terdapat tanaman tahunan dan jangka panjang yang masih dimanfaatkan sampai sekarang seperti durian, cempedak, petai, jengkol, buah mentawak dan lain-lain.

Areal PS menjadi sumber ekonomi keluarga karena di areal tersebut terdapat banyak tanaman karet, durian dan jengkol yang hingga saat ini menjadi unggulan pendapatan keluarga. Selain itu, terdapat tanaman tahunan lainnya yang menghasilkan seperti cempedak, dan mentawak.

E. Sumber Pendapatan Rumah Tangga Anggota KPS di Kabupaten Sanggau

Sumber-sumber pendapatan rumah tangga KPS di Kabupaten Sanggau dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu :

1. Sumber pendapatan dari areal PS yang terdiri dari
 - (1) Komoditas atau hasil tanaman yang dikonsumsi sendiri yang dapat dihitung berdasarkan banyaknya jumlah panen dikalikan harga;
 - (2) Komoditas atau hasil tanaman yang dijual baik itu di tingkat tapak, desa, kecamatan hingga kabupaten.

Adapun baseline pendapatan rumah tangga anggota KPS di Kabupaten Sanggau berdasarkan sumber dari areal PS adalah **Rp. 13.061.333 / tahun dan Rp. 1.088.444 /bulan**. Detail Pendapatan dari areal PS di Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel 13.

2. Pendapatan di luar PS

Sementara pendapatan anggota KPS yang berasal dari luar agroforestry atau PS adalah sebesar **RP.948.836.000 /tahun** atau rata-rata pendapatan per keluarga **Rp. 7.973.412 /tahun atau Rp. 664.451/bulan**.

3. Sehingga Total pendapatan anggota KPS yang bersumber dari areal PS dan non PS menjadi **Rp. 2.503.134.600** /tahun atau rata-rata per keluarga adalah **Rp.21.034.745** /tahun atau **Rp.1.752.895** /bulan. Ringkasan dari baseline pendapatan per keluarga KPS di Sanggau yang berasal dari areal PS dan Non PS dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Ringkasan Baseline Data Pendapatan Rumah Tangga KPS di Kabupaten Sanggau

No	Jenis pendapatan	Kab. Sanggau			Prosentase
		Total Pendapatan (Rp)	Pertahun/KK (RP)	Perbulan/KK (Rp)	
1	Pendapatan dari konsumsi sendiri	767.176.600	6.446.862	537.239	32%
2	Pendapatan dari komoditas di jual	Rp 787.122.000	6.614.471	551.206	
	Sumber pendapatan dari PS	1.554.298.600	13.061.333	1.088.444	32%
3	Pendapatan lain	948.836.000	7.973.412	664.451	36%
	Grand Total	2.503.134.600	21.034.745	1.752.895	100%

Dari tabel di atas, pendapatan yang berasal dari konsumsi sendiri dan komoditas yang dijual sama yaitu masing-masing 32% untuk yang dijual sehingga pendapatan rumah tangga KPS di Sanggau dari areal PS menjadi dominan dengan persentasi 64%. Dan Pendapatan lain-lain di luar PS hanya 36% . Hal ini menunjukkan betapa pentingnya areal PS bagi sumber pangan dan sumber ekonomi/ kehidupan anggota KPS Masyarakat Sanggau. Detail perhitungan sumber pendapatan dari kedua jenis tersebut dapat dilihat pada poin-poin di bawah ini.

E.1 Komoditas yang dikonsumsi sendiri dari areal PS.

Adapun jenis-jenis komoditas HHBK yang dimanfaatkan oleh anggota KPS untuk keperluan makan keluarga adalah (1) tanaman pangan meliputi : padi, beras ketan, jagung, singkong. (2) tanaman buah-buahan meliputi : durian, rambutan, kelapa, langsung, jambu, nangka, cempedak dan mentawak. Sedangkan yang termasuk (3) tanaman sayuran meliputi labu kuning, daun singkong, rebung, pakis, terong, labu, pucuk rotan, petai, sawi ladang, cabai, mentimun, dan jengkol. Pendapatan tertinggi dari komoditas yang dikonsumsi sendiri berasal dari tanaman pangan seperti beras dan beras ketan, kemudian buah-buahan khususnya durian. Dari jenis tanaman yang dikonsumsi sendiri dapat disimpulkan bahwa areal PS sangat penting dalam penyediaan sumber makanan keluarga (gambar 34) .



Gambar 34. Pendapatan dari komoditi yang dikonsumsi sendiri berdasarkan jenis tanaman.

Pendapatan total dari 119 responden dari komoditas PS yang dikonsumsi sendiri adalah Rp. 767.176.600/tahun atau rata-rata pendapatan per keluarga dari komoditas PS yang dikonsumsi sendiri adalah Rp. **6.448.862/tahun atau Rp.537.239/bulan**. Adapun detail pendapatan dari komoditas yang dikonsumsi sendiri dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Komoditas PS yang dikonsumsi sendiri Per Responden/RT

NO	KOMODITI	TOTAL PANEN/THN/KG	TOTAL RUPIAH/TH
1	BERAS LOKAL	50.965	Rp 617.563.600
2	BERAS KETAN	50	Rp 850.000
3	UBI/SINGKONG	4.050	Rp 4.080.000
4	JAGUNG	50	Rp 250.000
5	BUAH MENTAWAK	50	Rp 250.000
6	BUAH CEMPEDAK	60	Rp 180.000
7	BUAH LANGSAT	130	Rp 1.300.000
8	BUAH DURIAN	8.790	Rp 86.450.000
9	BUAH NAGKA	145	Rp 665.000
10	KELAPA	280	Rp 380.000
11	BUAH RAMBUTAN	562	Rp 4.350.000
12	BUAH LANGSAT	130	Rp 850.000
13	BUAH JAMBU	302	Rp 1.510.000
14	REBUNG	1.805	Rp 8.824.000
15	DAUN UBU/DAUN SINGKONG	1.098	Rp 4.654.000
16	PAKIS	1.048	Rp 4.460.000
17	TERONG	400	Rp 3.500.000
18	LABU	1.170	Rp 7.800.000
19	UMBUT ROTAN/PUCUK ROTAN/RUAK	100	Rp 1.000.000
20	PETAI	190	Rp 1.970.000
21	SAWI LADANG	330	Rp 2.460.000
22	CABAI	5	Rp 200.000
23	MENTIMUN	760	Rp 5.190.000
24	LABU KUNING	60	Rp 480.000
25	JENGKOL	1277	Rp 7.960.000
	TOTAL	73.807	Rp 767.176.600
	Pendapatan Per KK/Tahun		Rp 6.448.862
	Pendapatan Per KK/Bulan		Rp 537.239

Sumber pendapatan anggota KPS dari hewani seperti tupai, ayam hutan dan ikan di sungai untuk kebutuhan protein sulit dihitung karena sumber pendapatan ini tidak menentu dan bukan menjadi pekerjaan rutin bagi anggota KPS sehingga tidak termasuk dalam perhitungan pada tabel 14.

Jika dilihat dari jenis komoditi PS yang dikonsumsi, maka komoditi beras memiliki nilai yang paling tinggi dan signifikan hampir 90%, sementara persentase jenis komoditas lainnya sangat kecil (durian dan jengkol, labu, rambutan, dll) dengan 10 %. lihat gambar 34.

Sedangkan jika komoditas yang dikonsumsi sendiri berdasarkan KPS, maka HKm Poktan Bokai memiliki nilai yang paling tinggi, diikuti oleh HKm Keltan Boriski, MHA Mayao, MHA Sisang Segumon dan HA Tae dan HKM Poktan Harapan Maju. Nilai komoditas yang dikonsumsi sendiri paling kecil adalah MHA Dayak Sam, diikuti oleh HTR Meranti, HTR Keruing, dan HKM Dorit Bosi yang jumlahnya nilai komoditasnya di bawah Rp. 10 juta. Sedangkan HTR Kopkar Rimba tidak ada komoditas yang dikonsumsi sendiri. Detail Pendapatan dari komoditas yang dikonsumsi sendiri dapat dilihat pada gambar 35.

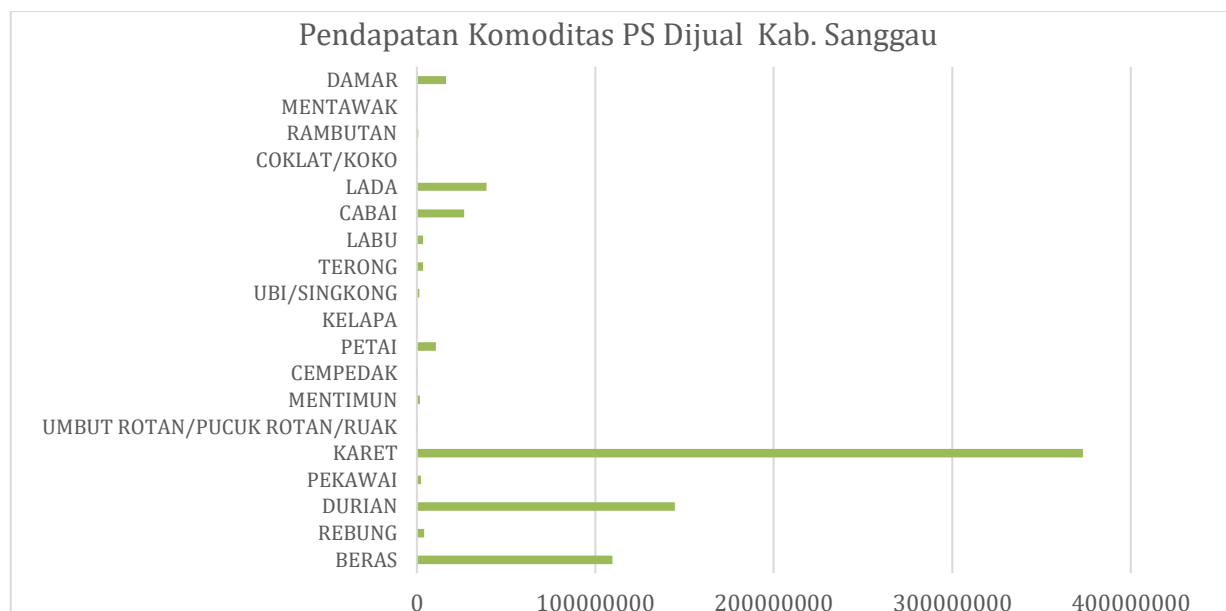


Gambar 35. Pendapatan PS yang dikonsumsi Sendiri di Kabupaten Sanggau Berdasarkan KPS

E.2 Pendapatan yang berasal dari komoditas PS yang dijual

Adapun komoditas yang bernilai ekonomi dan dijual sebagai sumber pendapatan keluarga berupa (1) tanaman pangan (beras dari padi, ubi, umbut rotan), (2) Tanaman buah-buahan (durian, pekawai, cempedak, rambutan, mentawak, coklat, kelapa, petai) (3) sayuran dan bambu (mentimun, rebung, terong, labu, cabai, lada, (4) tanaman tahunan (karet). Total Pendapatan dari komoditas-komoditas tersebut pertahun sebesar Rp.787.122.000 atau rata-rata perkeluarga memperoleh pendapatan Rp.6.614.741 /tahun, atau Rp.551.126/bulan. Detail pendapatan anggota KPS dari Komoditas yang dijual dan rata-rata pendapatan per keluarga dari komoditas yang dikonsumsi sendiri dapat dilihat pada gambar 36 dan tabel 14.

Dikaitkan dengan Permen KLHK No 35 tahun 2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu, maka komoditas kelapa sawit bukan bagian dari jenis komoditas hutan. Berdasarkan hal tersebut, pendapatan petani dari kelapa sawit tidak masuk dalam hitungan pada tabel di atas. Sehingga petani yang mengembangkan kelapa sawit sebelum areal PS diberikan tidak masuk dalam responden yang dipilih. Jika ada responden yang memiliki kelapa sawit, maka pendapatan dari kelapa sawit tidak dihitung dalam perhitungan pendapatan pada tabel 15. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan 26% anggota KPS yang memiliki rumah permanen, hal tersebut diprediksi dari pendapatan kelapa sawit. Karena dengan pendapatan 1,752.895/KK/bulan tidak mungkin dapat membangun rumah permanen. Selain itu, untuk pendapatan yang bersumber dari perburuan hewan yang dijual tidak dihitung dalam tabel 15 karena pendapatannya tidak menentu dan bukan menjadi pekerjaan rutin oleh anggota KPS.



Gambar 36. Pendapatan Komoditas PS dijual berdasarkan jenis komoditi

Pendapatan keluarga KPS di Kabupaten Sanggau adalah pendapatan bersih di mana pendapatan tersebut telah dikurangi dengan biaya produksi. Dari tabel 15, terdapat biaya produksi sejumlah Rp.163.020.000 untuk menghasilkan pendapatan bersih Rp.787.122.000. Secara pendapatan kotor, maka anggota KPS Sanggau memiliki pendapatan dari komoditas yang dijual per tahun Rp. 7.984.387 atau Rp.665.366 /KK/bulan.

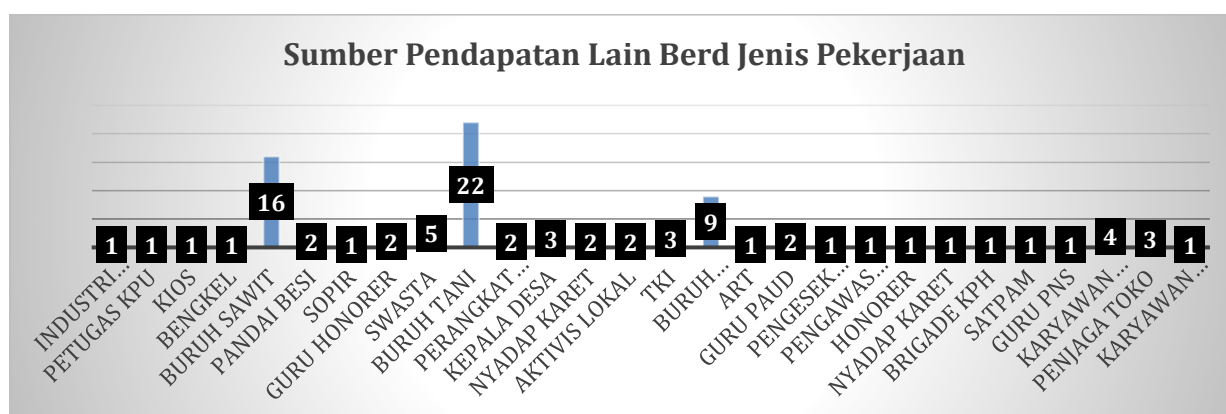
Tabel 14. Pendapatan Anggota KPS di Kabupaten Sanggau Per Komoditas

No	Komoditi	Hasil Jual	Biaya Produksi	Pendapatan
1	BERAS	170950000	Rp 28.800.000	Rp 142.150.000
2	UBI/SINGKONG	2000000	Rp 600.000	Rp 1.400.000
3	DURIAN	Rp 171.968.000	Rp 27.544.000	Rp 144.424.000
4	PEKAWAI	Rp 3.250.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 2.250.000
5	CEMPEDAK	Rp 850.000	Rp 300.000	Rp 550.000
6	KELAPA	Rp 180.000	Rp 60.000	Rp 120.000
7	COKLAT/KOKO	Rp 390.000	Rp 78.000	Rp 312.000
8	RAMBUTAN	Rp 780.000	Rp 50.000	Rp 730.000
9	MENTAWAK	Rp 600.000	Rp 20.000	Rp 580.000
10	UMBUT ROTAN/PUCUK ROTAN/RUAK	Rp 400.000		Rp 400.000
11	MENTIMUN	Rp 2.580.000	Rp 953.000	Rp 1.627.000
12	PETAI	Rp 11.300.000	Rp 660.000	Rp 10.640.000
13	TERONG	Rp 4.500.000	Rp 1.000.000	Rp 3.500.000
14	LABU	Rp 4.500.000	Rp 1.000.000	Rp 3.500.000
15	CABAI	Rp 29.250.000	Rp 2.700.000	Rp 26.550.000
16	LADA	Rp 42.300.000	Rp 3.230.000	Rp 39.070.000
17	KARET	Rp 478.094.000	Rp 85.025.000	Rp 393.069.000
18	DAMAR	Rp 26.250.000	Rp 10.000.000	Rp 16.250.000
	TOTAL	Rp 950.142.000	Rp 163.020.000	Rp 787.122.000
	Pendapatan Per tahun/KK	Rp 7.984.387	1.369.916	Rp 6.614.471
	Pendapatan Per bulan/KK	Rp 665.366	114.160	Rp 551.206

E.3 Pendapatan Lain dari Luar Agroforestry

Selain dari pendapatan di areal PS, maka anggota KPS juga mendapatkan penghasilan dari 28 sumber lain diantaranya buruh tani, buruh sawit, buruh bangunan, pedagang, karyawan swasta dan lain-lain (lihat detail pada gambar 37). Dari data ini terlihat bahwa pendapatan lain-lain berasal dari buruh tani khususnya di kebun kelapa sawit yang saat ini berkembang masif di Kabupaten Sanggau.

Dari Pendapatan sumber lain atau di luar PS tersebut, maka pekerjaan yang paling banyak adalah buruh tani, buruh sawit, buruh bangunan dan wiraswasta serta karyawan swasta. Adapun total pendapatan sumber lain adalah Rp.948.836.000/tahun, sehingga pendapatan rata-rata perkeluarga adalah **Rp.7.973.412/tahun, atau Rp. 664.451/ bulan** (lihat tabel 16). Jika ditambahkan dengan pendapatan yang berasal dari areal PS, maka total pendapatan per KK/bulan Rp.1.716.856 . Sehingga pendapatan yang berasal dari areal PS menjadi dominan sebesar 64 % dan pendapatan yang berasal dari luar PS Hanya 36 %. Berdasarkan data ini, maka areal PS memberikan kontribusi pendapatan yang utama ketimbang pendapatan yang berasal dari luar PS.



Gambar 37. Sumber Pendapatan Lain dari Luar Agroforestry Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel 15. Pendapatan anggota KPS dari luar /PS berdasarkan pekerjaan

No	JENIS PEKERJAAN	Jumlah	Pendapatan
1	INDUSTRI RUMAH TANGGA	1	36.000.000
2	PETUGAS KPU	1	38.400.000
3	KIOS	1	211.000.000
4	BURUH SAWIT	16	14.400.000
5	PANDAI BESI	2	33.600.000
6	SOPIR	1	6.036.000
7	GURU HONORER	2	45.000.000
8	SWASTA	5	96.960.000
9	BURUH TANI	22	15.780.000
10	PERANGKAT DESA	2	87.600.000
11	KEPALA DUSUN	3	800.000
12	NYADAP KARET	2	15.600.000
13	AKTIVIS LOKAL	2	50.520.000
14	TKI	3	38.140.000
15	BURUH BANGUNAN	9	10.800.000
16	GURU PAUD	2	1.600.000

17	PENGESEK KAYU	1	48.000.000
18	PENGAWAS RUMAH SAKIT	1	12.000.000
19	HONORER	1	800.000
20	NYADAP KARET	1	18.000.000
21	BRIGADE KPH	1	54.000.000
22	KARYAWAN SWATA	4	103.000.000
23	KARYAWAN FOTOCOPY	1	10.800.000
	Total		948.836.000
	Rerata per responden		7.973.412

F. Paska Panen dan Pemasaran

Pada umumnya hasil produk yang dijual berupa bahan mentah seperti: beras, sayur, karet, rambutan, durian, pekawai, labu, terong, mentimun, petai, rebung, umbut rotan, lada, coklat, cabai, ubi/singkong, buah tengkawang, ayam kampung, kelapa, mentawak, cempedak, langsung, damar dan jengkol. Ada juga produk yang dijual dalam bentuk bahan mentah seperti: beras, sayur, karet, rambutan, durian, pekawai, labu, terong, mentimun, petai, rebung, umbut rotan, lada, coklat, cabai, ubi/singkong, buah tengkawang, ayam kampung, kelapa, mentawak, cempedak, langsung, damar dan jengkol.

Pemasaran produk PS cukup gampang dan mudah karena ada pengepul di desa juga dapat dijual di kecamatan. Dengan adanya pengepul di desa, maka masyarakat cenderung menjual hasil produk di desa tempat mereka tinggal. Ada juga yang menjual hasil produk di kecamatan, tetapi tidak sebanyak masyarakat yang menjual hasil produknya di desa. Biasanya hasil produk yang dijual di kecamatan adalah produk yang nilai jualnya tinggi dan dalam jumlah yang banyak, seperti lada, coklat dan cabai. Paska Panen dan pemasaran produk PS dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 16. Paska Panen dan Pemasaran Produk PS di Kabupaten Sanggau

NO	Jenis Komoditi	Pasca Panen			Dijual Ke			Lokasi Pemasaran		
		Bahan mentah	Setengah jadi	Bahan jadi	Dusun/desa	Pasar	Pengepul	Desa	Kec	Kab
1	BERAS LOKAL	✓			✓		✓	✓		
2	SAYURAN	✓			✓			✓		
3	KARET	✓					✓	✓		
4	RAMBUTAN	✓			✓			✓		
5	DURIAN	✓			✓		✓	✓		
6	PEKAWAI	✓					✓	✓		
7	LABU	✓			✓			✓		
8	TERONG	✓			✓			✓		
9	MENTIMUN	✓			✓		✓	✓		
10	PETAI	✓			✓	✓	✓	✓		
11	REBUNG	✓			✓			✓		
12	UMBUT ROTAN	✓			✓			✓		

13	LADA	✓			✓			✓	✓	
14	COKLAT	✓					✓		✓	
15	CABAI	✓			✓		✓	✓	✓	
16	INGKONG	✓					✓	✓		
17	BUAH TENGGAWANG	✓					✓	✓		
18	AYAM KAMPUNG	✓			✓			✓		
19	KELAPA	✓					✓	✓		
20	MENTAWAK	✓					✓	✓		
21	CEMPEDAK	✓					✓	✓		
22	LANGSAT	✓			✓			✓		
23	DAMAR	✓					✓	✓		
24	JENGKOL	✓			✓		✓	✓		

G. Analisis Mata Pencapaian

Berdasarkan tabel 14. bahwa sumber pendapatan tiga tertinggi yang berasal dari komoditas dikonsumsi sendiri adalah beras, durian dan rebung bambu. Sementara untuk jenis komoditas yang berasal dari areal PS yang dijual adalah karet, durian dan juga beras. Untuk pendapatan komoditas sawit tidak termasuk dikarenakan kelapa sawit bukan merupakan Hasil hutan Bukan Kayu berdasarkan Permen LHK No.35 tahun 2007. Untuk responden yang dipilih diupayakan responden yang tidak memiliki kelapa sawit. Jika memiliki sawit di areal PS karena keterlanjuran, maka hasilnya tetap tidak di hitung. Hal ini membuat mengecilnya pendapatan petani KPS dari areal PS. Sementara jika dilihat kondisi rumah, 31% permanen dan 50% semi permanen. Diindikasikan bagusnya rumah-rumah responden dikarenakan adanya penghasilan lain dari kelapa sawit khususnya yang di luar PS . Untuk tananman karet sebagian masyarakat masih tertarik dan telah lama dimiliki. Sehingga karet-karet yang ada di areal PS tidak akan ditebang. Yang mereka minta adalah mendapatkan jenis karet unggul dan bersertifikat sehingga dapat diperkaya karet yang lama.

Sebagian besar komoditas yang berasal dari areal PS merupakan bahan mentah. dan dijual di desa. Hanya lada, coklat dan cabai yang dijual sampai ke kota kecamatan dan tidak ada komoditas yang dijual hingga ke kabupaten. Untuk itu sangat diperlukan pengolahan komoditas menjadi bahan setengah jadi dan jadi. Permintaan setiap KPS diadakan bengkel atau workshop pengolahan produksi menjadi sangat relevan untuk difasilitasi. Selain itu, diperlukan pengorganisasian pengumpulan hasil produk bahan mentah atau setengah jadi dan difasilitasi oleh koperasi / KUPS dalam penjualannya ke pedagang besar sehingga harganya tinggi. Untuk melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman bagi KPS dalam peningkatan ekonomi hingga 15% diakhir proyek, peneliti melakukan analisis SWOT untuk KPS di Sanggau yang dapat dilihat pada gambar 38.

Berdasarkan analisis SWOT pada gambar 38, maka strategi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendukung peningkatan berdasarkan kekuatan dan kesempatan yang ada sehingga dapat mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan di areal KPS Sanggau adalah:

- Meningkatkan produksi *cash crops* atau tanaman pangan khususnya beras dan jenis komoditas yang dapat dipanen secara cepat (sayuran, buah-buahan, tanaman rambat dll) dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi produk dilakukan dengan pemberian bibit unggul atau training pembuatan bibit unggul padi/jenis lainnya, mendapatkan subsidi pupuk dan menciptakan pupuk organik, training budidaya tanaman cepat menghasilkan, dan pengendalian hama. Ekstensifikasi dengan cara memperluas wilayah garapan pada areal yang terdegradasi (areal terbuka, semak belukar) untuk ditanami komoditas *cash crop*, *middle crop* dan *long term crop*.

- Untuk meningkatkan pendapatan jangka menengah dan menambah tutupan hutan, maka areal-areal yang ditanami dengan tanaman pangan, sayuran dikayakan dengan 100 batang tanaman *middle crops* seperti pisang, durian unggul, kopi, coklat, sehingga untuk 3-4 tahun mendatang dapat memberikan penghasilan tambahan juga.
- Untuk HTR yang belum memiliki produksi yang dijual (HTR Rimba Jaya, HTR Meranti, HTR Kruing, HA Dayak Sami, HA TAE), maka penanaman coklat, pisang, lada dan jenis tanaman tahunan seperti durian, jengkol dapat dilakukan.
- Untuk komoditas yang dijual baik itu tanaman *cash crops*, *middle crops* dan *longterm crop* harus ditingkatkan nilai tambah, dan produk harus diolah dan tidak dijual bahan mentah. Nilai tambah produk dapat dilakukan dengan 3 strategi (1) meningkatkan akses jalan yang dapat dibantu dengan melibatkan Kementerian Desa dan Mendagri, dimana jalan-jalan produksi perlu ditingkatkan dan dapat menggunakan dana Anggaran Dana Desa (ADD) atau program-program dari Kemen PUPR. (2) menciptakan produk setengah jadi dan bahan jadi sehingga nilai tambah komoditas meningkat, misalnya lempuk durian, jenis roti dari tepung beras dan ketan, dan lain-lain, dan sesuai dengan usulan di setiap KPS harus ada bengkel produksi komoditas unggulan yang dimiliki KPS. (3) menciptakan pasar di Desa, Kecamatan dan Kabupaten dan juga *digital marketing*.
- Terkhusus untuk karet, karena masih menjadi sumber pendapatan utama petani KPS, maka diperlukan intensifikasi dan pengayaan karet dengan tanaman unggulan, memfasilitasi koperasi untuk dapat menjual langsung ke pabrik sehingga harga cenderung stabil dan tidak menjual ke toke di desa.
- Mendapatkan dukungan dari 12 Kementerian/Lembaga untuk mendukung pengelolaan Perhutanan sosial khususnya produksi dengan menggunakan Perpres 28 tahun 2023 dan kebijakan turunannya.

<i>Internal</i> <i>Eksternal</i>	OPPORTUNITIES	THREATS
	1. Perpres 28 tahun 2023 tentang percepatan pengelolaan PS yang melibatkan 12 Kementerian dan Lembaga terkait untuk usaha dan pendampingan 2. Ada peluang peningkatan ketrampilan dalam budidaya, pengolahan produk dan pasar 3. Ada peluang pasar domestic dan international 4. Tersedia pasar digital (tiktok, shopee, Tokopedia, dll) 5. Dukungan bibit, training dari Pemerintah dan FP V 6. Produk unggulan lokal durian dan jengkol, karet, lada, beras untuk ketahanan pangan	1. Ekspansi kelapa sawit 2. Perambahan dari luar anggota KPS dan luar desa 3. Jika tidak diregulasi, dibuat perencanaan dan pengawasan yang ketat, HTR Kruing dan Meranti rawan untuk menebang hutan dan menggantikannya dengan komoditas sawit. 4. Iming-iming dari investor untuk menanam sawit di HTR

STRENGTHS 1. Kelompok sudah mendapat akses legal PS dlm bentuk HKm, HTR & Hutan Adat 2. Memiliki komoditas tahunan (karet, durian, jengkol, petai) dan tanaman pangan dan sumber plasma nutfah durian 3. Ada modal dasar petani dalam budidaya tanaman pangan dan dan tanaman tahunan 4. Local Knowledge pengelolaan hutan dan lahan (tembawang/parua) 5. Memiliki KPS/KUPS dan pendamping PS per KPS 6. Areal PS merupakan hutan tersisa dan sumber air. 7. MHA Dayak Sami yang pengelolaannya berbasis komunal 8. HTR Koperasi Rimba Jaya pengelolaan secara komunal, sudah ada komoditas yang dikonsumsi sendiri	Strategi untuk memanfaatkan Peluang melalui Kekuatan KPS 1. Meningkatkan produktifitas dan bibit unggul tanaman pangan dan tahunan (karet, durian, jengkol, lada, coklat) 2. Penanaman tanaman yang <i>cash crop</i> dan <i>middle crop</i>, sehingga mendapatkan income rutin sebelum hasil tanaman tahunan. 3. Memperluas garapan karena masih tersedia lahan kecuali HTR Rimba Jaya dan MHA Dayak Sami. 4. Meningkatkan nilai tambah bagi komoditas jengkol, lada, durian, petai. 5. Menciptakan pasar lokal, kabupaten dan global termasuk pasar digital 6. Melakukan peningkatan ketrampilan ayaman bagi Perempuan 7. Meningkatkan ketrampilan pengolahan produk setengah jadi dan barang jadi bagi kelompok Perempuan 8. Mencari komoditas yang nilainya tinggi untuk HTR yang belum produksi	Strategi untuk mencegah Ancaman melalui Kekuatan KPS 1. Melakukan patroli secara rutin dan bergantian 2. Penegakan hukum kegiatan illegal dengan menggunakan SK legal PS dan aparat penegak hukum 3. Mengatur dan meregulasi anggota KPS secara kuat agar tidak menanam sawit baru 4. Memperkaya tanaman sawit dengan tanaman lain dengan pola agroforestri dengan komoditas yang kompetitif 5. Memelihara hutan sebagai sumber mata air, dan sumber HHBK lainnya 6. Mencari komoditas yang dapat mengimbangi hasil produktifitas sawit , missal dengan tanam durian monthong, lada, dan lokal berkualitas. 7. Membuat dan melaksanakan sanksi adat di areal-areal KPS
WEAKNESSS 1. Kemampuan pengolahan hasil komoditas terbatas, sehingga jika panen jual bahan mentah. 2. Akses pasar juga terbatas 3. Tata kelola Kawasan, kelembagaan KPS dan usaha masih minim 4. Ada 3 HTR Rimba Jaya, (Kruing dan Meranti) belum menghasilkan produk yang belum dijual	Strategi memanfaatkan peluang untuk meminimalkan Kelemahan 1. Memperkuat KPS/KUPS dalam pengelolaan areal PS, dan tata kelola Lembaga 2. Membuka akses pasar dan meningkatkan akses produksi 3. Meningkatkan pemahaman dan ketrampilan dalam budidaya dan pengolahan tanaman 4. Membuat bengkel kelompok tani di areal-areal KPS 5. Mendapatkan dukungan dan bantuan dari 12 Kementerian - Lembaga dalam mendukung	Strategi untuk meminimalkan potensi bahaya terletak pada sektor dimana Kelemahan bertemu dengan Ancaman 1. Membentuk tim dan system patrol hutan yang kuat 2. Menyepakai dan mengimplementasikan sanksi adat bagi pembuka hutan dan kegiatan illegal lain di areal PS. 3. Mencari dan mengembangkan komoditas yang dapat mengalahkan kelapa sawit

5. HTR Rimba Jaya belum maksimal dalam mengelola areal	pengelolaan dan pengembangan usaha PS	4. Peningkatan ketrampilan budidaya tanaman karet unggul, tanaman coklat,
6. Khusus HKM Lueh Maba Sua, izin areal berbeda dengan yang diusulkan dan berada di luar dusun.		5. Merevisi lokasi HKM Lueh Maba Sua

Gambar 38. Analisis SWOT KPS Di Kabupaten Sanggau

Adapaun strategi untuk mencegah Ancaman melalui Kekuatan KPS yang ada di Kabupaten Sanggau adalah:

1. Melakukan patroli secara rutin dan bergantian dengan menggunakan kearifan lokal dan sanksi adat.
2. Mengatur dan meregulasi anggota KPS secara kuat agar tidak menanam sawit baru
3. Memperkaya tanaman sawit dengan tanaman lain dengan pola agroforestry dengan komoditas yang kompetitif
4. Memelihara hutan sebagai sumber mata air, dan sumber HHBK lainnya
5. Mencari komoditas yang dapat mengimbangi hasil produktifitas sawit , misal dengan tanam durian monthong, lada, dan lokal berkualitas.
6. Peningkatan ketrampilan budidaya tanaman karet unggul dan tanaman coklat.

Sedangkan strategi untuk meminimalkan potensi bahaya terletak pada sektor dimana Kelemahan bertemu dengan Ancaman pada KPS di Sanggau:

1. Membentuk tim dan sistem patroli hutan yang kuat yang didasarkan pada kearifan local dan budaya adat setempat.
2. Penegakan hukum kegiatan illegal dengan menggunakan SK legal PS dan aparat penegak hukum
3. Menyepakai dan mengimplementasikan sanksi adat bagi pembuka hutan, menanam sawit di areal PS dan kegiatan illegal lain di areal PS.
4. Mencari dan mengembangkan komoditas yang dapat mengalahkan kelapa sawit misalnya durian monthong atau durian local yang kemudian dibudidayakan sehingga produksinya banyak dan rasanya enak.
5. Menyurati Dirjen PSKL agar merevisi lokasi HKM Lueh Maba Sua agar sesuai dengan areal yang diusulkan.

H. Persepsi Masyarakat terkait Perhutanan Sosial

Persepsi Masyarakat Sanggau terhadap keberadaan Perhutanan Sosial beranekaragam. Namun secara umum mereka sangat senang dengan adanya izin/psetujuan PS dan nyaman mengelola lahan. Beberapa garis besar persepsi Masyarakat adalah :

- Baru mengetahui PS dan HKm dari program FP V, dan sangat bersyukur bisa mendapatkan akses legal hingga 35 tahun.
- Program kehutanan masuk ke dusun dan program PS sangat membantu Masyarakat petani hutan di Kabupaten Sanggau
- Mendapat wawasan dan cara mengelola hutan dengan baik tanpa merusak lingkungan dan lebih tertata dengan bantuan dan dukungan pendamping PS.
- Adanya Kelompok PS memudahkan masyarakat mendapat bantuan dari pihak luar
- Memajukan para petani meningkatkan sumberdaya manusia, adanya pelatihan dan studi banding ke luar daerah
- Masyarakat sangat terbantu karena ada bantuan bibit, terutama bibit durian karena pohon durian tinggal sedikit sekarang, dilatih juga untuk mendapatkan bibit durian yang unggul dan tahan.

- Menambah tutupan lahan pada areal PS dan sebagai sumber air
- Menguntungkan masyarakat dan memberi peluang untuk bekerja dan penghasilan
- Program FP V menanam modal untuk anak cucu
- Sampai saat ini dampak/manfaat secara langsung belum kelihatan karena belum ada pembeli yang membeli komoditi dari areal PS dengan nilai yang tinggi, namun kedepan masih ada harapan.

Masyarakat juga mempersepsikan, merasakan dan membandingkan pengelolaan hutan sebelum ada izin dan setelah ada izin yang dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17. Persepsi Masyarakat berdasarkan tematik sebelum dan setelah ada izin

Isu	Sebelum PS	Sesudah PS (saat ini)
Tatakelola kawasan/lahan	1) tidak tau mana hutan lindung dan mana hutan produksi 2) sering terjadi kebakaran hutan yang besar 3) bertani dengan sistem ladang berpindah	1) mengetahui areal hutan lindung dan hutan produksi 2) kebakaran hutan dapat di minimalisir oleh kelompok 3) bertani modern
	1) masyarakat bingung dalam pengelolaan kawasan 2) tidak ada aturan dalam pengelolaan kawasan hutan	1) terbentuknya kelompok PS 2) adanya bantuan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti pengedaan bibit 3) kawasan mulai di tata
	Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan masih terbatas karena ada kekhawatiran belum mendapat ijin kelola perhutanan sosial	Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan lebih leluasa apalagi sekarang KPS diberi dukungan dari pemerintah berupa bantuan bibit melalui program FP V kerjasama dengan pihak Jerman
	Belum mengetahui cara mengelola lahan tanpa merusak lingkungan	Mengetahui cara mengelola lahan tanpa merusak lingkungan dan memahami pentingnya menjaga lingkungan
	Pengelolaan lahan belum tertata, masih adanya ladang berpindah-pindah	Tertata atau sudah dia atur oleh pengurus adat, pembukaan ladang sudah menetap dengan cara bersawah
	Lahan tembawang tidak beraturan tumbuhannya serta banyak tumbuhan yang tidak produktif	Lahan menjadi produktif dikarenakan banyak ditanam bibit unggul
	belum ada status areal yang jelas, lahan tidak produktif	Status areal jelas, adanya bantuan kepada anggota KPS, masyarakat (anggota KPS) diberdayakan
	Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan alakadarnya (menyesuaikan jenis tanaman yang ada dan dianggap mampu menjadi sumber mata pencaharian contohnya mengelola usaha kebun karet)	Pengelolaan sumber daya hutan mulai dikembangkan dengan diberikannya bantuan bibit tanaman kepada KPS untuk ditanam dan dipelihara guna menambah jenis tanaman yang produktif dan cepat panen
	Parua/tembawang susah dijangkau dikarenakan akses jalan yang rusak	Akses jalan menuju ke parua bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua
	Tidak tahu apa itu PS, tidak tahu areal HKM dan pembagiannya	Mengetahui adanya areal lindung dan produksi/pemanfaatan. Paham PS

Tata kelola usaha/ Ekonomi	Masih takut dan ragu untuk memanfaatkan dan memanen kayu	Anggota memiliki tanaman keras sebagai bahan bangunan dan kebun buah-buahan
	Tidak teratur dalam pemanfaatan, tanaman tidak produktif	Adanya aturan dan larangan
Budidaya tanaman/ Silvikultur	Masyarakat belum memahami teknik menanam tanaman yang produktif	Mengerti tentang teknik menanam tanaman yang produktif
	Lahan semak belukar dan tidak ada bantuan	Banyak kegiatan seperti penanaman berbagai jenis buah seperti durian, jengkol dan petai
	Belum tergerak untuk memperbanyak tanaman pada lahan yang dimiliki yang berada di areal PS	Banyak program, bisa mengelola areal dan menanam bibit buah-buahan dari bantuan FP V
	Menanam tanaman seadanya	Sudah lebih baik karena disediakan bibit dan pupuk
Tata kelola kelembagaan	Belum ada kelompok PS, belum tau batas wilayah HKM	Adanya kelompok PS, batas HKM sudah diketahui
	Tidak ada kelompok HKM	Adanya kelompok HKM dan selalu mendapatkan pelatihan
	Belum ada kegiatan kelompok di KPS HTR Rimba Jaya	Sudah ada usaha kelompok

Tabel 18. Ketrampilan yang Dimiliki Anggota KPS Sanggu dan yang Dibutuhkan

Tematik	Ketrampilan dimilik saat ini	Ketrampilan dibutuhkan
Budidaya tanaman dan Pternakan	Perawatan tanaman seperti durian dan petai	Perawatan dan pemupukan
	Berladang, berkebun dan berternak	Study banding, peningkatan kapasitas untuk usaha pertanian, perkebunan dan peternakan
		Penanaman dan pemeliharaan tanaman
	Cara merawat dan menyadap karet	1) perbanyak bibit secara vegetatif 2) pelatihan pengolahan hasil panen 3) pelatihan pengawetan produk/hasil panen
	Bertani secara tradisional, beternak madu kelulut	Bertani secara modern, beternak (sapi, kambing dan babi), penampung madu kelulut
Pengelolaan produk	1) Pengelolaan ekonomi keluarga 2) produksi alat pertanian (parang/golok)	1) Pelatihan ilmu pertanian 2) pelatihan pengelolaan lahan
	Keterampilan membuat kerajinan tangan dari bahan dasar rotan seperti bidai (tikar dari rotan) penampik padi, jarai, bakul dan keranjang	Keterampilan membuat kerajinan tangan dari bahan dasar rotan seperti bidai (tikar dari rotan) penampik padi, jarai, bakul dan keranjang
	Keterampilan dalam mengelola usaha tani	Keterampilan dalam membangun jaringan pemasaran supaya apa yang sudah dihasilkan/diproduksi bisa laku di pasar

	Membuat anyaman	Ketrampilan dalam mengolah hasil sumber daya hutan menjadi barang bernilai ekonomis
	Pandai besi dan menyadap karet	pembuatan bibit unggul, pembuatan pupuk organik
		Pelatihan pertukangan, bisnis, manajemen, keterampilan pemasaran
Pemasaran	Keterampilan bertani dan memasarkan hasil pertanian	Keterampilan membudidayakan tanaman yang dapat menambah pendapatan keluarga
	Memasarkan hasil lahan yang sudah di kelola	Keterampilan dalam mengembangkan usaha tani yang sudah ada
	Membuat rebung kering, membuat kue dodol durian, membuat anyaman, membuat bibit akulasi dan sambung	Peningkatan kapasitas di bidang pembibitan, anyaman, dan pengolahan bahan mentah seperti rebung kering, dan dodol durian
		Packing barang/finising sebelum ke pasar
		keterampilan menganalisis peluang pasar

I. Masukan Terhadap FP V

Adapun masukan dari anggota KPS untuk perbaikan pengelolaan PS dan peningkatan ekonomi berdasarkan masukan dari informan dan responden adalah:

- Proyek FP V harus dilanjutkan, FP V harus memfasilitasi usaha-usaha KPS di luar penanaman contoh: peternakan, usaha-usaha yang bersifat jangka pendek agar dapat cepat dirasakan manfaat ekonominya termasuk usaha jangka menengah.
- Program pelatihan untuk budidaya ditingkatkan seperti budidaya durian, budidaya karet unggul dan buah-buahan yang bernilai ekonomi tinggi ‘
- Pelatihan perawatan dan pemeliharaan ternak itik, hewan dan penambahan bibit ternak yang dapat dikembangkan di areal PS sebagai bentuk agroforestry.
- Membantu pemasaran produk-produk hasil hutan dan memfasilitasi penjualan karet langsung ke pabrik, dan membangun rumah produksi di Parua
- Pelatihan untuk kelompok perempuan seperti anyaman, dan budidaya sayuran.
- Kejelasan kawasan HKm Lueh Maba Shua tolong ditindaklanjuti
- FP V harus membuat program sampai tuntas, jangan berhenti di tengah jalan seperti SFDP
- Pelatihan pembuatan pupuk organik dan juga memfasilitasi mendapatkan pupuk subsidi
- Pengadaan bengkel kerja dan alat kerja di setiap KPS berdasarkan jenis komoditas unggulan di setiap KPS.
- Pelatihan pengolahan produk PS sehingga bernilai ekonomi tinggi atau ada nilai tambah ekonomi.
- Membantu membangun jaringan pasar di kecamatan, kabupaten sampai ke luar daerah baik itu secara offline dan juga digital
- Perlu peningkatan kemampuan pendamping dari sisi fasilitasi, komunikasi efektif dan negosiasi untuk dapat terus menjembatani dan memfasilitasi KPS dan juga hasil-hasil produk KPS.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Studi rumah tangga KPS di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat bermaksud untuk menyediakan data dasar pendapatan rumah tangga khususnya yang berasal dari areal PS sebagai *baseline* alat ukur dalam melihat peningkatan ekonomi dari implementasi proyek FP V dan salah satu indikator keberhasilannya adalah peningkatan pendapatan rumah tangga dari areal PS 15%. Studi *baseline* ini dilakukan bulan November dan Desember 2023 dengan metode kualitatif dan kuantitatif sederhana. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan primer. Data sekunder berupa: profil KPS, laporan, hasil studi dan publikasi terkait PS di dua kabupaten tersebut yang diperoleh dengan pengumpulan langsung dan penelusuran internet. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner untuk 287 responden yang diambil secara *purposive* yaitu masing-masing 7 responden dari 24 KPS di Kabupaten Sikka dan juga dari 17 KPS di Kabupaten Sanggau. Pemilihan responden dengan kriteria responden (1) aktif mengelola areal PS (2) telah berhasil membuat produk, (3) memiliki produk unggulan. Selain penyebaran kuesioner, data primer juga diambil dari Diskusi Kelompok terpimpin sebanyak 4 kali, interview tokoh dan juga observasi lapangan areal PS dan desa-desa.

Adapun sumber pendapatan dari areal PS dihitung berdasarkan (1) komoditas yang dikonsumsi sendiri dan (2) Komoditas yang di jual. Komoditas yang dikonsumsi sendiri berupa tanaman pangan, tanaman buah-buahan, kacang-kacangan, sayuran dan yang digunakan untuk upacara ritual. Sedangkan Sumber pendapatan dari komoditas yang dapat dijual umumnya adalah tanaman tahunan di antaranya kemiri, jambu mete, pisang, kelapa, karet, durian, petai, jengkol, kako, dan lain-lain walaupun ada juga tanaman pangan.

Hasil survey menemukan bahwa data dasar rata-rata pendapatan rumah tangga KPS yang berasal dari areal PS di Kabupaten Sikka **Rp. 15.188.250/tahun** atau **Rp1.265.688/ bulan**. Untuk pendapatan yang berasal dari komoditas di Jual adalah pendapatan bersih setelah dikurangi dengan biaya produksi. Sementara pendapatan rumah tangga dari luar areal PS adalah sebesar **Rp.5.835.119/tahun** atau **Rp.486.260/bulan**. Sehingga rata-rata pendapatan rumah tangga KPS di Kabupaten Sikka sebesar **Rp.21.023.369/tahun** atau **Rp.1.751.947/bulan**. Jika dibandingkan pendapatan yang berasal dari areal PS menjadi dominan yaitu 72 % dibandingkan dengan pendapatan diluar PS di Kabuaptan Sikka yang hanya 28 %.

Sedangkan rata-rata pendapatan rumah tangga yang berasal dari areal PS di Kabupaten Sanggau adalah **Rp. 13.061.333/tahun** atau **Rp.1.088.444/keluarga/bulan**, dan pendapatan rata-rata rumah tangga KPS yang berasal dari lain-lain (areal non PS) adalah **Rp.7.973.412/tahun** atau **Rp.664.451/bulan**. Sama seperti di Kabupaten Sikka, bahwa PS sangat penting bagi sumber pangan dan sumber pendapatan anggota KPS. Di Kabupaten Sanggau, kontribusi pendapatan yang berasal dari areal PS sebesar 64% sementara dari non areal PS hanya 36 %. Resume baseline pendapatan rumah tangga KPS Sikka dan Sanggau dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 19. Summary Baseline data pendapatan rumah tangga petani KPS berdasarkan Kabupaten

No	Jenis pendapatan	Kab. Sikka			Kab. Sanggau		
		Total (Rp)	Pertahun/KK (Rp)	Perbulan/KK (Rp)	Total Rp	Pertahun/KK (Rp)	Perbulan/KK (Rp)
1	Pendapatan dari konsumsi sendiri	923.376.900	5.496.291	458.024	767.176.600	6.446.862	537.239
2	Pendapatan dari komoditas di jual	1.628.249.136	9.691.959	807.663	Rp 787.122.000	6.614.471	551.206
	Sumber pendapatan dari PS	2.551.626.036	15.188.250	1.265.688	1.554.298.600	13.061.333	1.088.444
3	Pendapatan lain	980.300.000	5.835.119	486.260	948.836.000	7.973.412	664.451
	Grand Total	3.531.926.036	21.023.369	1.751.947	2.503.134.600	21.034.745	1.752.895

Jika dibandingkan dengan kriteria BPS 2023 di mana pendapatan per kapita Rp.535.547/orang/bulan atau Rp.2.32 juta per keluarga/bulan adalah batas garis kemiskinan, maka seluruh anggota KPS yang ada di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sanggau karena pendapatan per keluarga di Kabupaten Sikka Rp.1.751.947 dan Sanggau Rp1.752.895 per keluarga per bulan, maka masuk dalam kategori miskin. Selain dari aspek pendapatan, kategori miskin dipertimbangkan berdasarkan variable Pendidikan Dimana mayoritas masih berpendidikan SD dan tidak tamat SD, kondisi rumah yang mayoritas (di atas 60%) termasuk dalam kategori sederhana dan semi permanen, dan juga akses terhadap air bersih terbatas pada saat musim panas, dan listrik serta mayoritas menggunakan kayu bakar sebagai bahan energi. Walaupun masuk dalam kategori miskin, namun anggota KPS memiliki ketahanan pangan yang kuat karena pangan tersedia di alam, dan anggota KPS mendapatkan manfaat ekonomi lainnya seperti sumber protein hewani, manfaat ekologi karena sumber air dan penyeimbang iklim mikro, dan sumber papan karena sebagai tempat untuk mendapatkan peralatan pembuatan rumah. Dalam perhitungan pendapatan di atas, ketiga manfaat ini tidak dihitung atau tidak termasuk. Jika terjadi resesi di Indonesia, maka kelompok-kelompok petani KPS jauh lebih kuat dibandingkan kelompok masyarakat di kota walaupun pendapatannya mungkin lebih tinggi.

KPS-KPS yang ada di Kabupaten Sikka dan Sanggau memiliki kekuatan di mana areal PS sudah mendapatkan izin /persetujuan pengelolaan PS melalui sekema HKm (Sikka), sekema HKm, HTR dan HA (di Kabupaten Sanggau) selama 35 tahun. Di areal PS tersebut sudah terdapat tanaman tahunan yang menghasilkan seperti kemiri, jambu mete, cengkeh, pala, dan juga tanaman pangan, serta pengetahuan budidaya dari orang tua mereka. Di samping itu, areal PS menjadi sumber air, sumber ekonomi keluarga dan juga sudah ada pendamping PS di setiap KPS. Dengan adanya kebijakan Perpres RI No28 tahun 2023 tentang Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang melibatkan dan mengintegrasikan 12 Kementerian dan Lembaga untuk mempercepat pengelolaan PS, pengembangan usaha dan pendampingan, menjadi kesempatan bagi KPS untuk mendapatkan dukungan infrastruktur ekonomi dari Kementerian terkait melalui dinas-dinas Dimana sebelumnya sangat terbatas pada KLHK. Adanya pendamping dan program FP V, sehingga mendapatkan asistensi dan pelatihan di lapangan yang memberikan pemahaman dan akses pasar ke luar daerah bagi KPS-KPS.

Selain kekuatan dan kesempatan, KPS di Kabupaten Sikka dan Sanggau memiliki kelemahan seperti rendahnya ketrampilan budidaya tanaman pangan dan tahunan, minimnya pengetahuan pengolahan produk menjadi bahan setengah jadi dan jadi, dan kurangnya akses pasar baik itu yang non digital (pasar offline) dan online. Sedangkan yang menjadi ancaman seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan oleh pihak luar serta ekspansi kelapa sawit di Kabupaten Sanggau.

Keberadaan PS tersebut sangat dirasa manfaatnya bagi masyarakat baik secara ketahanan pangan, ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Keberadaan PS di dua Kabupaten tersebut menjadi sumber pangan karena sebagai sumber beras, jagung, sorgum, sayuran, dan buah-buahan. Secara ekonomi, areal PS menjadi sumber pendapatan dominan. Secara sosial budaya, di mana PS mengembalikan lahan-lahan yang dikuasi oleh nenek moyang dan orang tua, tempat mencari bahan papan rumah, serta bahan ritual dan adat.

Secara umum, mereka sangat senang dengan diberikan izin/persetujuan PS. Hal ini dikarenakan: ada kepastian dalam pengelolaan hutan dan lahan dan mendapatkan pendampingan dalam tata kelola kawasan, tata kelola ekonomi dan tata Kelola kelembagaan. Disamping itu, adanya dukungan dari pemerintah dan FP V dalam peningkatan ekonomi dan peningkatan keterampilan dan wawasan. Agar ekonomi meningkat, anggota KPS sangat berharap program FP V dapat meningkatkan produktifitas *cash crop* (tanaman pangan, sayuran, buah-buahan), memperkaya areal dengan tanaman *middle crop* dan *longterm crop*, pengolahan produk paska panen dan akses produksi serta pasar.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil survey, FGD, interview dan pengamatan di lapangan, data-data dan hasil analisa di bab 2 - 4 serta analisis SWOT, maka ada beberapa rekomendasi untuk peningkatan ekonomi rumah tangga KPS di Kabupaten Sikka:

- a) Meningkatkan produktifitas komoditas baik itu yang dikonsumsi sendiri (khususnya beras, durian, pisang, keladi) maupun yang dijual (jambu mete, kemiri, lada, vanili, pala, cengkeh, kopi, coklat. Strateginya memberikan peningkatan pengetahuan petani untuk budidaya tanaman mulai dari pemilihan bibit kualitas, pemupukan, pengendalian hama dan system irigasi (tetes, atau membuat embung air). Selain itu untuk meningkatkan produksi dapat menambah areal garapan.
- b) Memperkaya areal tanaman yang sudah ada. Jika areal saat ini hanya ditanami dengan tanaman pangan, sayuran dan jenis-jenis tanaman pendek lainnya, dapat diperkaya dengan tanaman *middle crop* seperti coklat, vanili, lada, pisang.
- c) Melakukan penanaman dan pengayaan untuk areal-areal terdegradasi dengan tanaman *middle crop* dan *long term crop* yang sifatnya dapat menghasilkan untuk 3 tahun kedepan dan seterusnya. Tujuannya agar tidak terjadi kebakaran dan dapat menyimpan air.
- d) Meningkatkan nilai tambah produk dengan cara mengolah produksi bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan jadi. Membantu membuat kemasan yang bagus dan menarik serta menciptakan produk khas PS atau masing-masing KPS.
- e) Perbaiki tata kelola pasar meliputi: pembukaan jalan akses produksi, penyiapan koperasi yang menampung hasil, dan penyediaan pasar *offline* di Kecamatan dan Kabupaten termasuk pasar *online*.

Sedangkan rekomendasi untuk peningkatan KPS Di Kabupaten Sanggau, rekomendasi untuk peningkatan ekonomi petani KPS adalah:

- a) Meningkatkan produktifitas komoditas baik itu yang dikonsumsi sendiri (khususnya beras, ubi, rebung, keladi dan sayuran) maupun yang dijual (karet, durian, jengkol, kopi dan coklat. Strateginya memberikan peningkatan pengetahuan petani untuk budidaya tanaman mulai dari pemilihan bibit kualitas, pemupukan, dan pengendalian hama. Selain itu untuk meningkatkan produksi dapat menambah areal garapan.
- b) Memperkaya areal tanaman yang sudah ada. Jika areal saat ini hanya ditanami dengan tanaman pangan, sayuran dan jenis-jenis tanaman pendek lainnya, dapat diperkaya dengan tanaman *middle crop* seperti coklat, vanili, lada, pisang dan *longterm crop* seperti durian, karet, jengkol, dan jenis komoditi unggulan lainnya.
- c) Memastikan areal-areal PS tidak ditanami kelapa sawit baik itu dari anggota KPS maupun luar kelompok. Membuat aturan adat dan sanksi terhadap orang yang membuka hutan dan menanam kelapa sawit.
- d) Terkhusus untuk HTR dan HA yang belum ada produksi untuk dijual, maka harus merencanakan penanaman buah-buahan dan kayu untuk dapat menghasilkan dalam jangka menengah dan panjang. Penanaman yang disarankan adalah coklat, kopi, dan pisang.
- e) Meningkatkan nilai tambah produk dengan cara mengolah produksi bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan jadi. Membantu membuat kemasan yang bagus dan menarik serta menciptakan produk khas PS atau masing-masing KPS. Setiap KPS menginginkan ada bengkel produksi pengolahan produk di setiap KPS di Sanggau.
- f) Perbaiki tata kelola pasar meliputi: peningkatan akses jalan produksi, penyiapan koperasi yang menampung hasil sebagai jembatan ke produsen, menjembatani penjualan karet langsung ke pabrik, dan penyediaan pasar *offline* di Kecamatan dan Kabupaten termasuk pasar *online*.

Rekomendasi untuk FP V dan Dirjen PSKL/BPSKL adalah:

- a) Keberhasilan program FP V sangat tergantung dari fasilitasi pendamping KPS. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan kapasitas pendamping PS dalam bidang: komunikasi efektif, tehnik fasilitasi, pemahaman tentang tata kelola kawasan, tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha.
- b) Mendukung peningkatan produktifitas tanaman jangka pendek dan menengah berdasarkan jenis komoditas unggulan masing-masing KPS melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi.
- c) Mendukung peningkatan nilai produk dari PS dengan pengolahan produk setengah jadi dan produk jadi. Hal tersebut harus didukung dengan peningkatan pengetahuan dan infrastruktur terkait dengan menggandeng kementerian dan lembaga terkait, pemerintah provinsi dan daerah dengan menggunakan legal basis Perpres 28 tahun 2023.
- d) Melakukan survey pendapatan rumah tangga anggota KPS di Kabupaten Sikka dan Sanggau dalam pertengahan proyek tersisa untuk mengetahui apakah program intervensi sudah berjalan dengan baik dan akan dapat mendukung peningkatan ekonomi 15 % dari baseline data. Kemudian melakukan penilaian akhir di akhir proyek FP V.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Penanganan Konflik dan Hutan Adat. 2021. Laporan Pelaksanaan Asesmen Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dalam rangka Pelaksanaan FPV. Forest Programme V. Jakarta

Forest Programme V. 2022. Laporan Assesment Potensi Produksi dan Bsnis Ramah Iklim Program FPV Kabupaten Sanggau. Jakarta

Forest Programme V. 2022. Laporan Assesment Potensi Produksi dan Bsnis Ramah Iklim Program FPV Kabupaten Sikka. Jakarta.

<https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/63c505e613f9b/penghasilan-di-bawah-rp-2-3-jutabulan-masuk-kriteria-keluarga-miskin>.

<https://sikkakab.bps.go.id/>

<https://sanggaukab.bps.go.id/>

<https://gokups.menlhk.go.id/>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pengelolaan Persetujuan HKm di Kabupaten Sikka

NO	SKEMA	KECAMATAN	DESA	NAMA KPS	NO SK	LUAS (Ha)
1	HKm	Talibura	Lewomada	Tieng Totan	SK 129/ HK/ 2012	1.417,413 ha
2	HKm		Darat Pantai	Du'a Hogar	SK. 6642/MENLHK-PSKL/ /PSL'012017	±519 Ha
3	HKm		Darat Gunung	Tere Wetan	SK.6643/MENLHK - PSKL/PKPS/PSL.0 /12/2017	403 Ha
4	HKm		Timu Tawa	Tana Tukan	SK.292/HK/2012	368,171 Ha
5	HKm		Ojang	Ri'ing Gole	SK. 355/HK/2013	423 Ha
6	HKm		Hikong	Tuar Tana	SK. 127/HK/2012	347 Ha
7	HKm	Waiblama	Natarmage	Du'a Toru	SK.296/HK/2012	434,198 Ha
8	HKm		Werang	Watu Wulun	SK. 295/HK/2012	254,144 Ha
9	HKm		Iling Medo	Buli Uher	SK.356/HK/2013	498,40 Ha
10	HKm		Tanarawa	Wai Henin	SK.10268/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0 /12/2019	2.236,5 Ha
11	HKm		Pruda	Watu Ata	SK.293/HK/2012	326,366 Ha
12	HKm		Tua Bao	Wairkung	SK. 128/HK/2012	429,159 Ha
13	HKm	Waigete	Watu Diran	Pema Ruwa	SK.358 / HK / 2013	1.140.38 ha
14	HKm		Wair Terang	Wair Topo	SK.6639/MENLHK - PSKL/PSL0112/12	1000 Ha
15	HKm		Nangatobong	Wair Wuat	SK.6641 / MENLHK – PSKL / PSL.0 / 12 / 2017	321 Ha

16	HKm		Hoder	Gita Nian Luah	SK. 294/HK/2012	707,721Ha
17	HKm		Runut	Obo Bao	SK.357/HK/ 2013	1.587,63 Ha
18	HKm		Wairbleler	Hoder Ruha Nukak	SK. 6640/MENLHK-SKL/PKPS/PSL.0/12/2017	408 Ha
19	HKm	Doreng	Watu Merak	Kebar Merak	SK.290/HK/2012	124,192 Ha
20	HKm		Wolomotong	Watu Tena	SK.291/HK/2012	684, 578 ha
21	HKm		Wogalirit	Tion Toma	SK.361 / HK / 2013	48,60 Ha
22	HKm		Kloangpopot	La'a Tagat	SK.360/HK/2013	53 Ha
23	HKm		Nen Bura	Sodang Gahar	SK.359/HK/2013	316,85 ha
24	HKm	Mapitara	Egon Gahar	Mapi Detun Tara Gahar	SK.354/HK/2013	809.80 ha

Lampiran 2. Daftar Pengelolaan Persetujuan HKm di Kabupaten Sanggau

NO	DESA	NAMA KPS	NO SK	TANGGAL	LUAS (Ha)	KPH
1	Sei Dangin	Gapoktan Nogo Bauh	565/Tahun 2012	26/12/2012	490	Sanggau Timur
2	Sei Dangin	Gapoktan Bokal Onak Sungkuh	566/Tahun 2012	29/12/201	870	Sanggau Timur
3	Dusun Rosak Desa Pisang	KT Tamai Ogong Pusaka	SK. 4392/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017	21/08/2017	1.060	Sanggau Timur
4	Dusun Entawak Desa Pisang	KT Borosik	SK. 4393/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017	21/08/2017	1.060	Sanggau Timur

5	Dusun Telogah Desa Idas	KT Dorit Bosi	SK. 4394/Menlhk- PSKL/ PKPS/PSL.0/8/20 17	21/08/2017	665	Sangga u Timur
6	Dusun Kobuk Desa Idas	KT Ontah Botuh Nyama	SK. 4395/Menlhk- PSKL/ PKPS/PSL.0/8/20 17	21/08/2017	180	Sangga u Timur
7	Dusun Sei Merah Desa Idas	KT Lueh Maba Shua	SK. 4494/Menlhk- PSKL/ PKPS/PSL.0/8/20 17	24/08/2017	420	Sangga u Timur
8	Desa Moboi	Gapoktan Harapan Maju	575/Tahun2012	27/12/2017	2.100	Sangga u Timur
9	Desa Sejuah	Gapoktan Bokal Kumu	576/Tahun2012	27/12/2017	700	Sangga u Timur
10	Desa S Dangi	Gapoktan Bauh Mongkat	577/Tahun2012	27/12/2017	990	Sangga u Timur
11	Entikong Nekan	Koperasi Perkebunan Meket Bisamah	SK. 6685/Menlhk- PSKL/ PKPS/PSL.0/8/20 19	07/08/2019	728	Sangga u Barat

Lampiran 3. Daftar Pengelolaan Persetujuan HKm di Kabupaten Sanggau

NO	DESA	KPS	NO SK	TANGGAL	LUAS (Ha)	KPH
1	Malenggang	KTH Meranti	NOMOR 549 TAHUN 2013	29/11/2013	63	Sanggau Timur
2	Malenggang	KTH Karuing	OR 550 TAHUN 2013	29/11/2013	63	Sanggau Timur
3	Mawang Muda	Koperasi Karyawan Rimba Jaya	238/EKBANG/201 6	21/04/2016	673,68	Sanggau Barat

Lampiran 4. Daftar Penetapan Hutan Adat di Kabupaten Sanggau

NO	DESA	NAMA MHA	NO SK	TANGGAL	LUAS (Ha)	KPH
1	Tae	Ketemenggungan Tae	.5770/MENLHK PSKL/PKTHA/ SL.1/9/ 2018	0/07/2018	2.189	Sanggau Barat
2	Lubuk Sabuk	Ketemenggungan Sisang Kampung Segumon	K.5771/MENLH KPSKL/PKTHA/ PSL.1/9/ 2018	10/07/2018	851	Sanggau Barat
3	Upe & Tunggul Boyok (Kec Bonti) dan Maringin Jaya (Kec Parindu)	Dayak Mayao	K 903/MENLHK PSK/PKTHA/PS L.1/12/ 2021	Desember 2021	4.166	Sanggau Timur

**Kuesioner Survei Pendapatan Rumah Tangga Anggota KPS
Forest Program V**

Persetujuan Responden

[Baca Lembar informasi personal responden ini, Jika responden setuju untuk berpartisipasi, lengkapi form persetujuan ini]

Nama saya adalah, sebagai *enumerator* yang bekerja untuk proyek FP V dan mengatasnamakan Yayasan Kehutan Masyarakati Indonesia (YKMI) atau dikenal FKKM. Hari ini saya menginginkan Bapak/ibu untuk berpartisipasi dalam studi ini. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pendapatan anggota Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) sebagai data dasar. Jika Anda setuju, maka saya akan melakukan wawancara dan akan merekam jawaban dalam lembar pertanyaan ini.

Apakah Bapak/Ibu mau terlibat dalam survey ini?	1 = Ya	0 = tidak
---	--------	-----------

Nama enumerator :

Hari/tanggal :

Waktu :

A. RUMAH TANGGA RESPONDEN

1. Nama/umur :/.....tahun
2. No HP :
3. Jenis Kelamin : Laki Perempuan
4. Alamat
Dusun :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
5. Asal kependudukan:
Pendatang Suku Asli
6. Nama KPS :
7. Luas lahan dikuasai :
8. Jumlah anggota rumah tangga: orang

9. Apakah peran paling dominan dari masing-masing anggota keluarga usahatani?

Komoditas	Status dalam Keluarga	Menentukan Jenis Tanaman	Mengolah Lahan	Pemeliharaan Tanaman	Panen	Pemasaran
	Suami/isteri/ anak					

Penjelasan:

2. PENDIDIKAN

1. Jelaskan latar belakang pendidikan anggota keluarga

Nama	Umur (tahun)	Tingkat Pendidikan	Lulus/Tidak Lulus L/TL

2. Umlah anak yang berada dalam usia wajib sekolah (7-18th)? orang

Apakah yang bersangkutan masih bersekolah? Ya. / Tidak

Jika tidak, mengapa?

.....

3. INFRASTRUKTUR DASAR RUMAH TANGGA RESPONDEN

1. Tipe rumah

Lantai tanah/panggung, dinding papan/tepas (tidak permanen)

Lantai semen, dinding papan atau batu (Semi permanen)

Lantai keramik, dinding batu (permanen)

2. Kepemilikan rumah: kontrak, milik sendiri, menempati milik keluarga

3. Kepemilikan asset produktif

Jenis	Kuantitas (banyaknya)
Sepeda	
Cangkul	
Golok	
Sepatu both	
Keranjang panen	
Sepeda Motor	
Mobil	

3. Apakah memiliki akses ke listrik? Ya. / Tidak

4. Bagaimana akses ke air bersih? Ya. / Tidak

Sungai

Mata air

Pipa air

5. Apakah memiliki akses ke Mandi Cuci Kakus Ya. / Tidak

6. Bahan bakar untuk memasak ?

Kayu

Gas

4. SUMBER PENDAPATAN RUMAH TANGGA

4.1 Komoditas yang dikonsumsi sendiri (Dalam areal PS) termasuk protein

Sumber pemasukan dari agroforestri untuk konsumsi sendiri per tahun (natura)

Komoditi	Jumlah Kg setiap Panen/tahun	Frekwensi produksi/tahun	Total panen/tahun (kg)	Harga	Total Rupiah /tahun

Catatan: beras, ubi, sayuran, buah-buahan, obat-obatan, dll

4.2 Pendapatan lain dari luar agroforestri (industri rumah tangga, bengkel, kios, buruh bangunan dll)

No	Siapa yang Bekerja	Jenis Pekerjaan	Penerimaan(Rp)/tahun
1			
2			
3			
4			

4.3 Pemasukan dari Komoditas yang Dijual per Tahun (di dalam areal PS)

Untuk komoditas kayu, agroforestry, dan sumber protein

Komoditi	Paska panen Ya/ tidak	Kg/ Panen/tahun	Frekwensi produksi per tahun	Harga Jual /Kg	Hasil penjualan tahun (Rp)/tahun	Biaya Produksi dan pemasaran (benih dll)	Pendapatn pe Tahun

4.4. Pemasaran Komoditas Agroforesty dari areal PS

Komoditi	Jenis komoditi: (bahan mentah, setengah jadi, bahan jadi)	Dijual ke siapa	Lokasi penjualan? (desa, kecamatan, kabupaten)	Keterangan

5. SURVEI PERSEPSI MASYARAKAT TERKAIT PS

5.1 Apa pendapat bapak/ibu tentang keberadaan areal PS

.....

.....

.....

5.2 Apakah ada perbedaan dalam pengelolaan/pemanfaatan sumber daya hutan sebelum PS dan sesudah PS (saat ini)

Jika ya, sebutkan

Sebelum PS	Sesudah PS (saat ini)

5.3 Pengetahuan dan keterampilan apa saja yang dimiliki oleh anggota KPS dalam mengelola PS untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga?;

.....

.....

.....

.....

5.4 Keterampilan apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan PS dan peningkatan pendapatan?

.....

.....

.....

5.5 Dukungan seperti apa yang diharapkan dari pemerintah Desa, Kabupaten, KPH dan Forest Program V untuk pengembangan PS ke depan?

Pemerintah Desa	Pemerintah Kabupaten	KPH	Forest Program (FP-V)

5.6 Apa masukan-masukan Bapak/ibu terhadap Forest Program - FP V

.....

.....

.....

Lampiran 6. Daftar Enumerator Kabupaten Sikka

NO	NAMA ENUMERATOR	NAMA KPS	DESA	KECAMATAN
1	Theresia Veriyanti	Tien Totan	Lewomada	Talibura
2	Maria Tesa Parera	Du'a Hogar	Darat Pantai	
3	FransiskusRobson, S.Pd	Tere Wetan	Darat Gunung	
4	Thomas Teru	Tana Tukan	Timu Tawa	
5	Helniati, S.Si	Ri'ing Gole	Ojang	
6	Yansius Rocy Markiano	Tuar Tana	Hikong	
7	Henderikus Sinong	Du'a Toru	Natarmage	Waiblama
8	Yohanes Hendra Chastanto	Watu Wulun	Werang	
9	Damianus Dole Gobang	Buli Uher	Ilin Medo	
10	Markus Mekanis	Wai Henin	Tanarawa	
11	Yustinus Yanto	Watu Ata	Pruda	
12	Yohanes Aristakus Sem, S.Fil	Waikung	Tua Bao	
13	Frederikus Meze Tai, S.Fil., M.M	Pema Ruwa	Watu Diran	Waigete
14	Adventa Natalia, S.Hut	Wair Topo	Wair Terang	
15	Simong Petrus Seng	Wair Wuat	Nangatobong	
16	Adrianus Lawe	Gina Nian Luah	Hoder	
17	Nobertus Pora Dowa	Obo Bao	Runut	
18	Nur Khalik Majid, D.Pdi	Hoder Ruha Nukak	Wairbleler	
19	Fransiskus Seskodius Rakeng	Kebar Merak	Watu Merak	Doreng
20	Adeodatus Maring	Watu Tena	Wolomotong	
21	Alfonso Hery	Tion Toma	Wogalirit	
22	Yosefinus Ediwato Bara	La'a Tagat	Kloangpopot	
23	Mus Muliadi	Sodang Gahar	Nen Bura	
24	Feisitas Lusclarita	Mapi Detun Tara Gahar	Egon Gahar	Mapitara

Lampiran 7. Daftar Enumerator Kabupaten Sanggau

NO	NAMA ENUERATOR	NAMA KPS	DESA	KECAMATAN
1	Angelina Melamora Fhodita	HKm KT Dorit Bosi	Idas	Noyan
2	Bernado Da Billy	HKm KT Ontah Botuh Nyama	Idas	
3	Benedictus Adang Brehmukti, A. Md	HKm Gapoktan Nongo Bauh	Sungai Dangin	
4	Cindi Safitri, S.Hut	HKm KT Lueh Maba Shua	Idas	
5	Hermes Tomi Pranata. S	HKm Gapoktan Bokal Onak Sungkuh	Sungai Dangin	
6	Paulus Ulna	HKm Gapoktan Baoh Mongkat	Sungai Dangin	
7	vipania Poetry Engda, S.Si	HKm Gapoktan Bokal Kumuo	Sejuah	Kembayan
8	Priscila Shelda	HKm Gapoktan Harapan Maju	Mobui	Jangkang
9	Rosalia Irma	HKm KT Tamai Ogong Pusaka	Pisang	
10	Heriyanto	HKm KT Borisiki	Pisang	
11	Idrus Alip, S.Ag	HTR KTH Meranti	Malenggang	Sekayam
12	Anwar Pилanus	HTR KTH Keruing	Malenggang	
13	Mateus Pirdaus	MHA Mayao	Maringin Jaya, Upe dan Tunggul Boyok	Parindu dan Bonti
14	Dadang Sutadi	MHA Dayak Sami	Sami dan Bonti	Bonti
15	Katarina Sakira	MHA Tae	Tae	Balai
16	Lorensius S.M	HTR Kopkar Rimba Jaya	Mawang Muda	Beduai

17	Syavira Paradita	MHA Sisang Segumon	Lubuk Sabuk	Sekayam
----	------------------	--------------------	-------------	---------

Lampiran 8. Dokumentasi Pembekalan Enumerator Kabupaten Sikka





Lampiran 9. Dokumentasi FGD & Observasi di Kabupaten Sikka





Lampiran 10. Pengambilan Data Lapangan Dengan Kuesioner di Kabupaten Sikka



KPS TIENG TOTAN DESA LEWOMADA
-8°23'27", 122°40'0", 60,6m
2023-11-19 14:27:32

Lampiran 11. Dokumentasi Pembekalan Enumerator Kabupaten Sanggau





Lampiran 13. Pengambilan Data Lapangan dg Kuesioner di Kabupaten Sanggau



Lampiran 14 Data Base Sosek- Pendapatan Rumah Tangga KPS. Kabupatek Sikka
Dapat dilihat pada Lampiran terpisah

Lampiran 15 Data Base Sosek- Pendapatan Rumah Tangga KPS. Kabupatek Sanggau
Dapat di lihat pada Lampiran terpisah